

ILIRAN DAN ULUAN:
Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural
Palembang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ILIRAN DAN ULUAN:
Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural
Palembang**

Dedi Irwanto M. Santun
Murni
Supriyanto

Eja Publisher, 2010

Iiran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi
Sejarah Kultural Palembang
©Dedi Irwanto M. Santun, Murni, Supriyanto

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit *Eja Publisher*, Yogyakarta, Oktober, 2010
Kronggahan, Gamping, Sleman, 085228114879
Email: eja_publisher@yahoo.com

Penulis: Dedi Irwanto M. Santun, Murni, Supriyanto
Editor: Tim Eja
Layout/Cover: Aqil NF
Pracetak: Azet

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Iiran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi
Sejarah Kultural Palembang
Yogyakarta: Eja Publisher, 2010
xxi + 180 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-979-1407-23-6

Untuk
Sahabat dan guru kami
Nan tak terlupakan.....
Alm. Marzuki AB Yass

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWAJAYA

Assalamu'aikum Wr Wb.

Diiringi rasa syukur ke hadiratan Allah Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku yang merupakan bagian dari Penelitian Strategis Nasional (Stranas) DIPA Universitas Sriwijaya tahun 2010 berjudul "*Iliran-Uluhan: Dikotomi sekaligus Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*". Buku sejenis ini memang sangat diperlukan tidak saja oleh masyarakat Palembang khususnya, Sumatera Selatan umumnya, namun juga oleh masyarakat Indonesia secara luas. Sebagai bagian dari Proyek Penelitian Strategis Nasional (Stranas) DIPA Universitas Sriwijaya Tahun 2010, buku ini memang sesuai dengan roh tematik tentang integrasi bangsa dan harmonisasi sosial, termasuk kebudayaan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang bermaksud membuat sebuah bahan ajar, terutama bersifat suplemen, tentang sejarah kebudayaan lokal, dengan menafsirkan dekonstruksi konsep iliran dan uluhan, yang dilihat dari sejarah masa lalu dengan menghubungkan yang terjadi pada kekinian, yang kemudian coba diterapkan dan diaplikasikan oleh tim peneliti ke sekolah-sekolah di Kota Palembang yang menjadi sampel penelitian.

Gambaran yang diilustrasikan oleh tiga orang penulis buku

ini, yang merupakan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, bukanlah bermaksud mempertentangkan dikotomi konsep kebudayaan masyarakat Sumatera Selatan, *iliran* dan *uluhan*, namun lebih jauh yang ingin dilihat dan diungkap oleh tim penulis, bagaimana pembacanya dapat dan harus memahami, bahwa konsep dikotomi ini sebenarnya juga merupakan dinamika budaya yang dapat memperkaya khazanah kebudayaan lokal, sekaligus kebudayaan nasional. Konsep seperti ini, merupakan wacana yang juga banyak terjadi pada tingkat nasional, jadi menurut saya, peneropongan penulis untuk mengajak pembacanya agar dapat mengetahui dan memahami persoalan entitas kebudayaan seperti ini sangatlah baik dan tepat.

Saya juga merasa gembira, karena menurut saya, buku ini dibuat bukan saja sekedar suplemen semata, tetapi lebih jauh dapat juga menjadi bahan referensi awal pembaca untuk mengetahui dan memahami konsep kebudayaan Sumatera Selatan, *iliran* dan *uluhan*. Selain itu, buku ini diharapkan kepada generasi muda dan generasi masa mendatang dapat menjadi sarana pemahaman untuk mempersempit konflik sosial dan budaya, sekaligus dapat menjadi alat penjaga integrasi bangsa.

Atas nama pribadi dan Universitas Sriwijaya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang membantu terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, dalam upaya pemenuhan pembangunan bangsa dan menuju hari esok yang lebih baik.

Wassalamu"alaikum Wr, Wb.

Rektor Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Badia Parizade.

KATA SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SRIWAJAYA

Assalamu'aikum Wr Wb.

Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Sriwijaya dalam tahun 2010, sesuai dengan anggaran DIPA Universitas Sriwijaya memberi dana penelitian, salah satunya dalam bentuk Penelitian Strategis Nasional (Stanas). Oleh karena itu, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dari seratus lebih proposal yang masuk, kemudian menyeleksi menjadi 17 proposal yang didanai untuk melakukan penelitian.

Menariknya, dalam tahun anggaran ini, salah satu proposal yang didanai berasal dari bidang Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial, termasuk Kebudayaan, yang salah satunya diusulkan Saudara Dedi Irwanto, M.A. dan kawan-kawan dari Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berjudul *"Dekonstruksi Konsep Iliran dan Uluan: Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Sosio Kultural Warga Kota Palembang untuk Menciptakan Harmonisasi Sosial Etnisitas"*.

Sejak proposal ini diseminarkan dan direview oleh tim ahli sosial kebudayaan Universitas Sriwijaya, bahwa ketiga penelitian Dedi Irwanto, Murni dan Supriyanto dapat mempersempit dan

memecahkan masalah kebudayaan kelokalan Sumatera Selatan, yaitu mengenai masalah dikotomi kultural masyarakat *iliran* dan *uluhan*. Menurut kami, masalah kebudayaan ini tentunya juga banyak menjadi fenomena di tingkat nasional, sehingga apa yang dilakukan oleh ketiga peneliti ini dapat juga diterapkan sebagai model dalam pemecahan masalah pembangunan bangsa dalam menjaga integrasi bangsa dan mengatasi masalah konflik sosial, Indonesia yang beraneka suku.

Kami juga yakin, penelitian yang berawal dari penulisan buku yang akan diujicobakan di lapangan, sekolah-sekolah terutama tingkat sekolah menengah pertama di Kota Palembang akan memberi dan membawa dampak positif pada pemecahan persoalan pembangunan sosial budaya bangsa. Pembaca, terutama generasi muda dengan membaca buku ini diharapkan dapat menjadi penggugah kesadaran kesejarahan, yang berlanjut pada kesadaran sosial budaya. Dengan demikian mereka dapat memiliki wawasan pemahaman tentang keberagaman dan kekayaan suku dan budaya yang mereka miliki, sekaligus memupuk rasa kecintaan terhadap sejarah dan budaya lokalnya. Berdasarkan kecintaan ini diharapkan mereka mampu mempersempit konflik-konflik sosial di kalangan masyarakatnya, sebab mereka adalah agen perubahan yang diharapkan bangsa.

Demikian salah satu langkah dalam penelitian ini dibukukan, kami mengharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti dan bermanfaat. Buku yang diberi judul *Iliran dan Uluan: Dikotomi sekaligus Dinamika dalam Sejarah Kultural*, kami harapkan juga dapat menambah dan membentuk wawasan budaya bagi para pembaca, tidak saja di kalangan siswa yang menjadi sampel, tetapi pada masyarakat secara luas. Wassalamu'aikum Wr Wb.

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M. Sc.

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWAJAYA

Assalamu'aikum Wr Wb.

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kualitas iman dan kemanusiaan, baik yang berdimensi lahir maupun bathin. Boleh dikatakan sebagai sebuah bangsa yang beraneka ras dan suku, Indonesia memiliki banyak dilema dalam permasalahan sosial budaya, demikian juga pada tataran lokal di Palembang dan Sumatera Selatan. Namun, saya yakin bahwa aneka budaya yang berasal dari masing-masing suku ini, selain bisa mendatangkan berbagai masalah, juga kalau dapat dicarikan sebuah solusi elegan dan ditangani dengan pendekatan humanis, justru menjadi aset kekayaan bangsa yang luar biasa.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh ketiga orang dosen kami, Saudara Dedi Irwanto, Murni dan Supriyanto, adalah sebuah bentuk usaha untuk memberi pengetahuan, pemahaman sekaligus mencari model solusi pemecahan masalah yang diakibatkan adanya keberagaman budaya yang mungkin saja sebenarnya berawal dari persepsi yang salah terhadap keanekaan budaya tersebut. Mereka bertiga lewat bukunya ini mencoba mendeskripsikan

tentang sebuah masalah dikotomi kultural masa lampau Kota Palembang yang berupa perang ideologi mengandung pertentangan sosial. Dalam tulisannya ini, tim peneliti mencoba mengilustrasikan bagaimana terbentuknya dua kutub tersebut dengan terlebih dahulu melihat hubungan relasi dan memetakan kedua konsep tersebut. Berdasarkan relasi dan peta konsep tersebut, tim peneliti ini juga memaparkan bagaimana konflik sosial tersebut mendapat medannya ketika Palembang berubah menjadi kota kolonial dan kota nasional dengan segala kesempatan dan keterbukaan untuk melakukan mobilitas vertikal di kalangan masyarakat pendukungnya. Sebab itu, ketika orang *uluhan* banyak yang datang berurbanisasi ke kota, *iliran*, yang selama ini tidak banyak terjadi pada Zaman Kesultanan Palembang, justru merekalah yang dapat memanfaatkan kesempatan karena mereka memang datang sebagai pelajar dan kaum intelektual baru di kota, meskipun pada akhirnya, zaman kota nasional, pasca kemerdekaan, hal tersebut semakin berkurang, karena mereka datang sebagian besar dan memang mendominasi sebagai pekerja tanpa *skill*.

Tetapi yang menariknya, dalam buku ini, tim peneliti tidak saja menyajikan ilustrasi tentang pertentangan tersebut, tetapi lebih jauh yang ingin dilakukan buku ini adalah sebuah kajian sejarah kultural, yang artinya sebuah bentuk memberi pemahaman kesadaran sejarah dan budaya, bahwa pertentangan dikotomis budaya tersebut, sebenarnya diakibatkan oleh kesalahan pemahaman, persepsi tentang budaya masyarakat lain yang sebenarnya bagian dari mereka itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan sebagaimana roh dari mempelajari sejarah, ini perlu dinarasikan kembali agar pertentangan yang sering mengandung disharmonisasi sosial seperti itu tidak dan jangan sampai terulang kembali.

Jadi, muatan yang terkandung dalam buku ini adalah sebuah bentuk interpretasi analitik bahwa "*ini loh kebudayaan wong kito*", kebudayaan ini tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya, karena ia juga bagian dari "*wong kito galo*". Pemberian

pemahaman kebudayaan lewat karya sejarah budaya ini penting dalam rangka mewujudkan intergrasi bangsa karena keterbukaan seperti ini diharapkan dapat membantu anggota masyarakat untuk memperluas cakrawala pandangannya.

Kami juga lewat kesempatan ini mengutarakan bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berusaha mewujudkan gagasan Universitas Sriwijaya sebagai universitas riset, baik bertaraf nasional maupun internasional. Penggagasan dan bantuan yang bersifat kelembagaan maupun pribadi yang diberikan kepada ketiga orang peneliti ini, merupakan bentuk usaha lembaga yang saya pimpin untuk mendorong kegiatan penelitian dosen-dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Supaya buku ini lebih baik lagi, saya juga menyarankan dan memberi kemudahan kepada ketiga orang peneliti untuk meminta Prof. Dr. Djahir Basjir, M.Pd. sebagai pakar ahli media pendidikan IPS dan sejarawan Sumatera Selatan, Drs. Alimansyur sebagai pakar ahli materi dalam *one-one validation* (ujicoba satu-satu) yaitu validasi yang mencakup desain, perencanaan dan penyusunan naskah pembelajaran buku ini.

Saya sebagai pribadi maupun kelembagaan dengan senang hati menyambut baik, terbitnya bahan ajar yang diharapkan juga menjadi buku referensi dengan judul "*Iliran-Uluan: Dikotomi sekaligus Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*". Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini, penggalian nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat lokal di Sumatera Selatan, sebagai bagian budaya bangsa, dapat terus ditingkatkan sekaligus dapat menjadi media dan sarana pendidikan yang kita laksanakan dapat tercapai.

Namun, perlu juga disadari, bahwa buku penerbitan hasil penelitian Strategis Nasional yang didanai DIPA Universitas Sriwijaya berjudul "*Dekonstruksi Konsep Iliran dan Uluan: Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Sosio Kultural Warga Kota Palembang untuk Menciptakan Harmonisasi Sosial Etnisitas*" ini baru merupakan

sebuah langkah awal. Kiranya segala kelemahan dan kekurangan yang masih terdapat dalam penerbitan ini dapat disempurnakan di masa datang.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Palembang, September 2010
Dekan FKIP,

Prof. Drs. Tatang Suhery, M.A. Ph. D.

UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS

Buku yang hadir dihadapan pembaca sekalian ini, adalah usaha keras yang dilakukan oleh ketiga penulis, Dedi Irwanto, Murni dan Supriyanto selama tiga bulan awal Penelitian Strategis Nasional yang dibiayai DIPA Universitas Sriwijaya 2010. Namun, tanpa bantuan dari semua pihak, kami merasa akan sangat kesulitan mewujudkan penerbitan buku ini, oleh karena itu sudah sewajar dan sepantasnya, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada lembaga dan orang-perorang yang mendorong, membantu memberi data dan saran dalam penelitian dan menyusun penerbitan buku ini.

Ucapan terima kasih pertama kami aturkan kepada Universitas Sriwijaya, tempat kami bernaung dan menularkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa kami. Kepada pimpinan kami ibu rektor, Prof. Dr. Badia Parizade, terima kasih ini menggaung keseantaro cakrawala ruang karena kami telah diberi kesempatan langkah dan luar biasa untuk mewujudkan mimpi meneliti dan menerbit, konsepsi ideologis *Iliran* dan *Uluan*, salah satu entitas kebudayaan di Sumatera Selatan, sebagai salah satu kahzanah kebudayaan nasional ini. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si. DEA., selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M. Sc. Ketua Lembaga Penelitian Universitas

Sriwijaya serta seluruh stafnya yang menjadi konseptor, fasilitator, inspektor dan penentu didanainya penelitian ini.

Ucapan terima kasih besar dan tulus kami panjatkan kepada Prof. Drs. Tatang Suhery, M.A. Ph. D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kami semua kesempatan dan kelancaran hingga segala kemudahan kami dapatkan dalam melakukan penelitian ini. *Attention* Beliau yang luar biasa, dengan segala pertanyaan membangun dan sumbang sarannya terhadap buku dan penelitian ini menjadi pendorong semangat kami dalam usaha mewujudkan dan melahirkan buku ini. Kepada kedua orang pakar, Prof. Dr. Djahir Basjir, M.Pd., selaku ahli media Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya dan sejarawan Sumatera Selatan, Drs. Alimasyur selaku ahli materi terima kasih kami panjatkan atas kesediaan dan kesudiannya membaca naskah dan sekaligus menghadirkan kritik, saran dan pendapat yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Dalam kesempatan ini juga kami dari lubuk hati yang dalam mengatutkan terima kasih tidak terhingga kepada Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP, Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd. beserta stafnya, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, dan mahasiswanya, anak-anak kami yang tercinta. Khususnya dalam buku ini lantunan terima kasih dengan segala melankolisnya kami hadirkan kepada mahasiswa kami tercinta Yundiah, Aulia Novemy Dhita, Chandra Cahyadi, Diki Ardiansyah dan Asmala yang sengaja dilibatkan dalam penelitian ini, baik sebagai pengumpul sumber maupun ikut membantu dalam menginterpretasikan data.

Kemudian tidak lupa kami aturkan terima kasih ini kepada berbagai nara sumber yang tidak bisa kami sebutkan disini secara satu persatu baik institusi maupun individu. Namun, kami tidak lupa mengatutkan terima kasih ini kepada sahabat lingkaran diskusi kami Saudi Berlian, Kemas A. Rahman Panji, Sukardi,

dan juga Kakanda Rudi Asri, Houtman, Aan Suriadi dan sebagainya. Kadang dari narasi perdebatan, sanggahan, dan interupsi kalian lahir sebuah bentuk kerangka pemikiran kami dalam membangun tulisan buku ini.

Untuk sahabat dan saudaraku, M. Nazir sekeluarga, pimpinan Penerbitan Eja Publisher Yogyakarta, kami selalu menghardirkan segala bentuk terima kasih ini, atas tidak saja segala bantuan, namun juga semua dorongan agar kami cepat menyelesaikan naskah dan menerbitkan buku ini.

Pembaca sekalian, sejarah adalah sebuah ladang dan medan perdebatan, karena ia merupakan interpretasi atas proses perubahan dan perkembangan fenomena manusia di masa lampau. Demikian juga dengan buku ini, maka segala pertanyaan, saran dan kritik argumentatif selalu kami harapkan untuk perbaikan isi buku ini di masa mendatang. Maafkan kami atas segala kekurangan dan kekeliruan di dalam buku ini, harapkan kami semoga hadirnya buku ini ada manfaat dan safaatnya. Terima kasih. Wassalam.

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor Universitas Sriwijaya ~ vi
Kata Sambutan Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Sriwijaya ~ viii
Kata Sambutan Dekan FKIP Universitas Sriwijaya ~ x
Ucapan Terima Kasih Penulis ~ xiv
Daftar Istilah ~ xix

Bagian Satu. Palembang dan Hubungannya dengan Daerah Pedalamannya: Dari Mula Iliran dan Uluan ~ 1

- A. Gambaran Palembang sebagai Iliran ~ 7
- B. Iliran Pusat Kekuasaan Uluan Taklukan yang Merdeka:
Simbiosis Politis Palembang dan Pedalaman ~ 10

Bagian Dua. Iliran dan Uluan secara Geografis ~ 40

- A. Kota Palembang: Muara Sungai, Bandar Dagang ~ 41
- B. Iliran Palembang: Batasan Geografis Ekologis Daerah
Uluan Dataran Rendah ~ 49
- C. Uluan Palembang: Batasan Geografis Ekologis Daerah
Uluan Dataran Tinggi ~ 55

Bagian Tiga. Uluan dan Iliran secara Kultural ~ 65

- A. Kota Palembang: Melayu Palembang,
Basis Utama Iliran ~ 65
- B. Daerah Uluan: Tanah Berpuyang dan Beraneka Suku ~ 75

Dedi Irwanto M. Santun, dkk.

Bagian Empat. Ketika Uluan ke Iliran: Kemunduran Iliran dan Kemakmuran Uluan ~ 125

- A. Desakan Kebijakan Kolonial: Kemunduran Iliran ~ 125
- B. Ke Ilir untuk Sekolah: Kemajuan Uluan ~ 133
- C. Kemerostan Ulu dan Arus Urbanisasi:
Uluan dan Iliran Pasca Kolonial ~ 156

Bagian Lima. *Iliran dan Uluan*, Masa Lalu dan Masa Kini: Sebuah Refleksi ~ 164

Daftar Pustaka ~ 172

Tentang Penulis ~ 179

DAFTAR ISTILAH

- Alingan* : Dialingi, dilindungi. Orang yang dilindungi oleh pembesar kesultanan.
- Ba'Alawi* : Keturunan Nabi Muhammad dari cucunya Husien.
- Bertuah* : Memiliki kesaktian, mandraguna, keuntungan yang sifatnya lebih dibanding orang kebanyakan.
- Blando Gadungan* : Belanda gadungan, meniru-meniru sikap dan sifat orang Belanda, cenderung tidak persis. Biasanya ditujukan untuk pribumi.
- Depati* : Gelar pejabat kepala marga, *pasirah*. Biasanya untuk marga-marga yang besar.
- Ibukota* : Merujuk pada Kota Palembang zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Pusat kharisma, legitimasi, pusat politik dan kebudayaan.
- Jurai* : Satu keturunan, satu nenek moyang.
- Mata Gawe* : Orang yang memiliki kewajiban kerja kepada sultan. Penduduk di daerah *sikap*.

- Milir sebah* : Milir pergi ke ilir sungai, sebah, *sebo*, bahasa Palembang menyembah. Pembesar uluan/pedalaman datang ke kraton/istana untuk menghadap sultan.
- Pembarap* : Pejabat/kepala dusun yang berkedudukan diibukota sebuah marga.
- Plembang Buntung* : Sebutan untuk orang Palembang yang mengalami kemunduran hidup
- Puyang* : *Ancestors*, Inggris. Orang yang dituakan, pendiri kampung, makam keramat, orang tua dari kakek nenek dan seterusnya.
- Onderafdeeling* : Wilayah administrasi Pemerintahan Kolonial Belanda setingkat di bawah *afdeeling*. Kepala *onderafdeeling* berpangkat *controleur*, kontrolir.
- Orang alus* : Makhluk tidak kasat mata, tidak terlihat mata, bisa malaikat, jin, setan dan sebagainya
- Raja Adat* : Pemimpin adat Suku Ranau.
- Tunggu Tubang* : *tubang*, lobang, bahasa Semendo. Sistem perkawinan matrilinear yang ada dalam adat Semendo, di mana anak wanita tertua diharuskan berdiam di rumah orang tuanya setelah perkawinan, diberi hak untuk menunggu rumah, sawah, ladang dan benda pusaka keluarga lainnya. Namun tidak bisa diperjualbelikan.
- Uang Jujur* : Mahar, mas kawin, sejumlah uang yang diberikan mempelai pria kepada

mempelai wanita dalam perkawinan uluan menurut Undang-undang Simbur Cahaya.

*Kama, Ulu Kama
Utusan*

: Pengotor, orang ulu yang pengotor.
: Orang yang mendapat amanah, dalam keagamaan wilayah uluan dianggap sebagai wali Allah, penyebar agama, orang yang paham agama dan memiliki kelebihan.

BAGIAN SATU
PALEMBANG DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PEDALAMAN:
AWAL MULA ILIRAN DAN ULUAN

Konsepsi *iliran* dan *uluan* dalam perspektif politik, ekonomis, sosial dan budaya pada masyarakat Sumatera Selatan telah ada sejak masa lampau dalam kurun sejarahnya. Pada beberapa bagiannya, konsepsi ini kadang kala kerap mengganggu hubungan komunikasi kemasyarakatan di Sumatera Selatan, antara apa yang menyebut dirinya dengan orang *iliran* dengan orang *uluan* itu sendiri.

Dalam literatur kolonial, ketika berbicara Keresidenan Palembang atau daerah Sumatera Selatan sekarang ini, bacaan yang nampak dan selalu muncul adalah dikotomis polarisasi dua masyarakat nan ketat, *uluan* dan *iliran*. Dikotomis kedua kutub tersebut akan berpusat dan bertitik tolak pada konsepsi orang-orang yang berada di Kota Palembang, pusat ibukota keresidenan. Menariknya, sikap bertentangan seperti itu hampir masuk dalam seluruh segi kehidupan, politis, ekonomis, sosial dan budaya, termasuk agama, yang menentang dan menjadi landasan terbentuknya kedua bentuk masyarakat itu.

Akar geografis, termasuk dalam kajian Mestika Zed¹ maupun

¹ Baca dalam Mestika Zed. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Peeters², selalu ditarik ketika melihat latar belakang munculnya dua perbedaan tersebut. Inilah realitas historisnya, *iliran* diidentifikasi mendapat pengaruh kuat dari pusat ibukota sehingga lebih bercorak modern. Sementara, *uluan* dikategorikan masih berada dalam alam tradisional, karena sedikit mendapat sentuhan pusat ibukota keresidenan. Meskipun tidak sesempit itu, teori dikotomis tersebut dalam kenyataannya, masih menyimpan kenyataan berambigu seperti itu. Modernis di *iliran*, bukanlah secara keseluruhan, karena sifat tradisional tidak dapat disisihkan begitu saja.

Persoalan itu muncul, manakala konsepsi ini kadang sering sejalan dengan penjustifikasian antara mereka yang melekatkan dirinya sebagai orang *iliran* dan menganggap dirinya lebih beradab serta pemilik peradaban itu sendiri dalam lingkup Sumatera Selatan. Secara ideologis, mereka menganggap dirinya tentu lebih modern, cenderung terbuka, orang yang maju, lebih intelek, sehingga secara politis mereka merasa lebih berkuasa, superioritas dengan segala ritualisme kebijakan, kewenangan, kegagahan dan kewibawaan, sementara secara ekonomis mereka menganggap dirinya lebih makmur dan kaya. Sebaliknya, orang *uluan* sering dihadapkan dengan konsepsi ritualitas intelektual dari orang *iliran* dengan memandang mereka dengan kaca mata kudanya sebagai orang tradisional yang terbelakang dan ketinggalan, cenderung tertutup, minderan, dan miskin. Orang *uluan* selalu didudukkan pada posisi inferior sebagai orang udik, yang tidak tahu perkembangan, terutama perkembangan zaman yang berhubungan dengan kemajuan. Secara teoritis, konsepsi ini memiliki kemiripan dengan konsep lain dalam ritual bernegara secara modern, yakni Utara dan Selatan, atau Barat dan Timur, misalnya Eropa dan Asia atau Afrika.

² Peeters, Jaroen. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS, 1997.

Konsepsi yang bermula dari perang urat syaraf dalam ranah ideologis ini, sebenarnya dapat dikatakan tidak lepas dari realitas historis yang memiliki riwayat panjang dalam ruang-ruang sejarah politik, ekonomis, sosial dan budaya di Sumatera Selatan dan lebih banyak mengental dalam konflik yang bersifat sosial. Secara tipologis, konsepsi ini bermula dari adanya ekologis alam yang berkenaan dengan sistem geografis di Sumatera Selatan itu sendiri. Sumatera Selatan yang dalam banyak literatur disebut dengan nama lain “Batanghari Sembilan”³, mempunyai konsekuensi logis untuk perujukan menyatakan arah. Masyarakat Sumatera Selatan memiliki keberbedaan dengan masyarakat Jawa di mana rujukannya mengarah kepada *lor*, untuk kata utara, *kidul* untuk arah selatan, *wetan* untuk timur dan *kulon* untuk kata barat. Sementara, untuk masyarakat Sumatera Selatan acuan yang dipakai untuk menyatakan arah adalah *iliran* untuk daerah timur dan *uluhan* untuk daerah sebelah baratnya, sedangkan *laut* memiliki pengertian ke arah selatan dan *darat* untuk arah utaranya. Tetapi untuk perujukan istilah arah ini, seringkali hanya mengacuh pada kata *iliran* dan *uluhan* saja, yang kemudian kerap kali menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk ruang-ruang politis, ekonomis, sosial dan budaya. Ke Palembang acapkali disebut ke Ilir, sementara kembali ke uluannya sering kali dibilang “Mudik”.

Daerah *iliran* tersebut, kerap kali juga disandingkan dengan kedatangan kemajuan, sebab yang paling pertama menerima perubahan acapkali datang dari daerah iliran sungai, yang kemudian kalau itu memang sampai, baru kemajuan itu menyentuh ke arah dan mengarah ke dunia daerah *uluhan*. Ini tidak lepas,

³ Sembilan buah sungai utama yang mengalir Keresidenan Palembang, yakni Sungai Batanghari Leko, Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Enim, dan Sungai Lintang. Dalam buku De la Faille, P. de Roo. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta : Bhratara, 1971. Hlm. 16, disebutkan bahwa sembilan sungai tradisional di Palembang tersebut adalah Batang Leko, Ogan, Komering, Rawas, Rupit, Lakitan, Kelingi, Bliti dan tentu saja Musi.

dari realitas geografis, bahwa daerah *iliran* adalah muara akhir dari aliran panjang sebuah mata air yang mengalir melewati sungai. Sedangkan daerah *uluan* adalah sumber mata air yang membentuk sungai tadi dan berpangkal dari daerah pegunungan. Oleh sebab itu, daerah *iliran* selalu identik dengan sebuah pintu gerbang kedatangan “orang asing” yang membawahkan perubahan, perubahan tersebut tentunya terlebih dahulu bersemayam di daerah *iliran* ini, baru mempengaruhi lingkungan sekitarnya, untuk masuk ke daerah *uluan*.

Semua kemajuan, baik secara politis dan ekonomis, dengan demikian harus diposisikan pada areal *iliran* ini. Akibatnya, orang *iliran* adalah agen perubahan dari semua kemajuan di setiap aliran sungainya. Maka, secara geografis dan ekologis ini, Palembang, yang terletak di daerah ilir Sungai Musi, induk dari semua aliran sungai yang dinamakan dengan istilah Batanghari Sembilan tersebut merupakan pintu gerbang utama orang yang masuk ke aliran Batanghari Sembilan. Konsekuensinya, kemajuan di dunia *iliran*, identik dengan pencapaian modernisasi di Palembang itu sendiri. Realita di atas kalau dibaca dengan sebuah cermin pemikiran, akan memperlihatkan deskripsi yang jelas, karena secara geografis, Palembang memang menduduki lokasi dan posisi yang strategis dalam rute ekonomis perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional.⁴

Kebesaran Palembang sebagai kota dagang distributor untuk daerah uluan ke luar Palembang, dapat dilihat dari gambaran

⁴ Menurut catatan Van Sevenhoven, daerah bagian timur pulau Sumatera ini, terletak pada garis 2° 58' Lintang Selatan dan 105° Bujur Timur berdasar garis Greenwich. Menurutnya, cuaca di Palembang berbeda dengan pulau Jawa, karena cuacanya sering berubah-ubah dengan musim disini yang kurang teratur, kadang sering terjadi hujan lebat dan angin kencang disertai halilintar sering datang sekonyong-konyong. Hanya pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus dan September suhu tetap mempertahankan tingginya, namun tetap dengan segala perubahannya. Lihat dalam Van Sevenhoven, J.L. 1971. *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara. Hlm. 11-12.

yang ditulis dalam sebuah surat kabar lokal⁵, serta kenyataan bahwa Palembang sudah lama dikenal sebagai jembatan penghubung jaringan perdagangan pusat-pusat perniagaan Hindia Belanda bagian barat. Julukan Palembang dengan gelar “*de grootste handelstad van Sumatra*”, membuktikan hal tersebut. Palembang dan daerah sekitarnya, Keresidenan Palembang, dikenal juga sebagai “*state of production, commerce and trade*”, untuk membandingkannya dengan wilayah Sumatera Timur yang disebut sebagai “*state of estates*”,⁶ membuktikan bahwa semua urusan bisnis sangat dominan di Palembang. Oleh karena itu, terhampar kenyataan bahwa kota ini sangat menguntungkan dan berlaku ramah, mulai para perusahaan besar, usaha orang-orang terkaya pribumi maupun Cina, sampai bagi usaha orang kecil sekalipun. Kota ini dianggap sebagai tempat menumpuk uang. Tidak ada kota di Sumatera, dapat bertindak dan berlaku seperti Palembang.

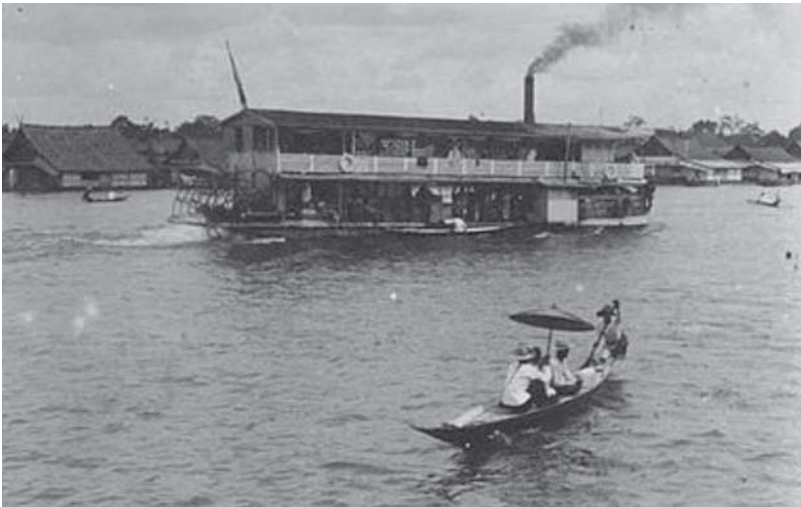


Gambar 1. Pemandangan dari atas sebuah dermaga Sungai Musi dengan perahu dan kapal yang ilir mudik berlayar dari ke uluan pedalaman sampai ke luar negeri.

⁵ Lihat dalam *Boemi Melajoe*, 11 Agustus 1927.; Lihat juga dalam Mestika Zed, 2006, *op. cit.* hlm. 4.

⁶ Lihat dalam “*Bespreking Palembang*”, 6-10, April 1949.; Lihat juga dalam “*Algemeene Secretarie*”, Batavia, 1942-1945, No. 3436.; atau lihat dalam Mestika Zed. 2006. *Ibid.* hlm. 1.

Kota Palembang tidak saja bertindak sebagai ibukota keresidenan secara politis, tetapi sekaligus “ibukota tidak resmi ekonomi” dari perdagangan untuk seluruh wilayah keresidenan. Sebagai ibukota dagang, Palembang memiliki letak strategis karena terhubung dan berhubungan secara luas dengan daerah-daerah lain yang ada disekelilingnya. Kota ini menjadi sentra dan penyaji utama dalam perhubungan tersebut, baik lewat jalan air maupun jalan darat. Segala hasil bumi yang datang dari daerah-daerah yang ada disekelilingnya, seperti *getah para* atau karet, kopi, jelutung, kapas, damar dan sebagainya, semuanya lebih dahulu mesti dikumpulkan di kota tersebut.



Gambar 2. Perahu tambangan dengan latar kapal uap di perairan Sungai Musi, 1935.

Barang-barang yang terkumpul itu, baru kemudian dikirim dan didistribusikan ke daerah-daerah di seberang laut, baik untuk pasaran pelabuhan tingkatan “nasional” seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Banten, Bugis, Banjarmasin, dan daerah-daerah pesisir selatan selat Malaka maupun “internasional” semisal Singapura, Amerika dan Eropa. Begitu pula dengan barang-barang yang diimport dari “luar” yang merupakan kebutuhan

keresidenan seperti kain, besi, makanan dalam kaleng dan lain-lain lebih dahulu harus singgah di kota ini. Oleh karena letaknya berhubungan dengan daerah luar dan tanah uluannya sehingga kota ini amat berharga untuk perdagangan. Posisi penting Palembang inilah yang menyebabkan daerah ini sejak masa lalu menjadi "pusat"-nya untuk semua daerah Sumatera Selatan.

A. Gambaran Palembang sebagai Iliran

Palembang terletak pada garis lintang $2^{\circ} 52'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37' - 104^{\circ} 52'$ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan laut. Jarak Palembang yang relatif dekat dengan Selatan Bangka berjarak sekitar 95 Km membuat kondisi alamnya sangat dipengaruhi oleh perilaku pasang surut air laut yang kadangkala bisa mencapai ketinggian antara 3 sampai 5 meter. Kota ini juga merupakan daerah tropis dengan suhu yang cukup panas mencapai $23,4^{\circ}$ sampai $31,7^{\circ}$ Celcius. Curah hujan yang turun di Palembang terbanyak terjadi dalam bulan April sebesar 338 mm dan bulan September menduduki posisi yang paling sedikit berkisar 10 mm.

Palembang umumnya memiliki tanah alluvial, liat dan berpasir dengan lapisan yang masih muda sehingga banyak mengandung minyak bumi, dan tidak terlalu cocok untuk area pertanian. Tanah ini relatif datar dengan sebagian besar didominasi tanah yang tergenang air, baik pada waktu hujan maupun setelah turun hujan, terlebih ketika pasang dan hujan datang.

Keuntungan secara strategis, Palembang, menyebabkan kota ini mendapat posisi sebagai kota pelabuhan, walaupun tidak terletak di daerah pantai. Pelabuhannya yang aman, dengan jaringan-jaringan sungai yang menciptakan jalur perhitungan dengan daerah pedalaman dan jalur rawa yang membentang jauh ke pedalamannya, membuat Palembang terlindung dari serangan darat. Keadaan inilah yang menyebabkan hidupnya dunia perdagangan dan perniagaan di kota Palembang.

Selain secara ekologis, Palembang juga diuntungkan dengan adanya ketersediaan sungai yang representatif dalam pengembangan teknologi transportasi, sehingga dengan demikian semua kontak perdagangan dengan kota-kota lain di luar aliran sungai serta daerah-daerah pedalaman aliran sungainya dapat dilakukan dengan baik. Melalui jalur perdagangan seperti ini, jalur pertukaran barang tercipta sedemikian rupa sehingga segala dan semua kebutuhan hidup penduduknya dapat dipenuhi.



Gambar 3. Potret kesibukan mengangkut barang dagangan di tepian Sungai Musi Palembang

Secara ekonomis, memasuki dasawarsa kedua abad ke-20, tahun 1930-an, Palembang muncul sebagai *wingewesten*, daerah untung, sebutan untuk daerah-daerah yang dieksploitasi secara ekonomi. Realitas konstruksi kota dagang dengan adanya hal ini, semakin mendapat tempatnya ketika kemajuan dalam perdagangan ekspor karet. Berharganya *rubber*, getah karet, membuat Palembang menjadi kota yang ramai dan permai, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Kota ini bertambah ramai, hampir tiap kapal yang datang membawa beberapa bangsa asing dan juga orang-orang Indonesia, di antara mereka itu ada yang datang mengunjungi kota ini untuk sementara waktu saja, ada yang membawa barang-barang dagang yang hendak dijual, ada yang datang untuk mencari langganan-langganan baru, ada pula yang hendak menetap tinggal di kota ini bermaksud mencari

penghidupan dengan kecakapan dan ilmunya.⁷

Palembang dengan letaknya yang strategis ini, mampu “menguasai” dan memiliki pengaruh besar ke daerah pedalaman-nya cukup dengan mengembangkan apa yang disebut dengan politik kebudayaan dalam bentuk “dayung”. Masyarakat di daerah pedalamannya yang cenderung kolektif, namun terpecah berai secara lingkungan pemukimannya, di masa lalu memiliki penghubung tetap yang berupa kepandaian para pendayung yang dimiliki utusan kerajaan atau kesultanan yang terletak di daerah ilirannya, Palembang. Para utusan ini, hanya dengan berkelana di daerah pedalaman, uluan sungainya, dengan membawa lambang-lambang dan piagam raja sebagai simbol untuk mendapatkan pengakuan kekuasaan dari pembesar *uluhan* yang masih merdeka ini. Dengan cara demikianlah, maka “kehadiran” raja tetap terus berjalan di atas aliran sungai-sungai yang sekaligus memiliki fungsi sebagai arena lalu lintas ketatanegaraan. Keadaan ini berlangsung, sejak masa Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang.



Gambar 4. Alat pengangkutan tradisional, perahu, baik di Iliiran Palembang maupun Uluan Palembang

⁷ Lihat dalam *Kemoedi*, Palembang, Sabtoe, 17 Juli 1926.

Palembang, dengan kebesarannya itulah kemudian muncul sebagai “penguasa” secara politis, ekonomis, sosial dan budaya untuk daerah sekitarnya. Dalam setiap perjalanan masa lampau-nya, Palembang selalu muncul sebagai “pusat” yang lebih “unggul” dari daerah-daerah yang mengitarinya, yang dianggap dan dilekatkan sebagai daerah pedalamannya. Bermula dari masa Sriwijaya, Kerajaan dan Kesultanan Palembang, Keresidenan Palembang di masa kolonial hingga pada masa pascakemerdekaan. Namun dibalik kedudukannya ini, muncul serpihan-serpihan resistensi menarik yang datang dari daerah *uluan* itu. Kadang dalam bentuk yang terbuka, dan mengental dalam elaborasi perjuangan sosial ketika muncul arus urbanisasi orang uluan yang datang ke Palembang, maupun dalam bentuk lebih banyak diam-diam dan tidak terabah dengan sikap memiliki kekuatan sendiri, yang merdeka walaupun harus melakukan ritual “*milir sebah*”.

B. Iliran Pusat Kekuasaan, Uluan Taklukan yang Merdeka: Simbiosis Politis Palembang dan Pedalaman

Secara politis, *uluan* yang diistilahkan ini, tetap merupakan wilayah “taklukan” dari sebuah kekuatan yang lebih besar dan unggul dengan penguasa hadi luhur dan biasanya itu datang dari kekuasaan *iliran*, di Palembang.⁸ Namun menariknya, tanah

⁸ Kata “taklukan” di sini sering mengacu pada makna denotatif, yang cenderung absurd untuk diartikan secara arfiah. Hampir tidak ada catatan sejarah memperlihatkan dan menunjukkan bahwa *iliran* pernah menaklukan uluan secara militer. Bahkan dalam makalah, Johan Hanafiah, “*Tidak Ada Tradisi Militer di Kesultanan Palembang Darussalam*” disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah yang diselenggarakan MSI Cabang Sumatera Selatan, Sabtu, 2 Agustus 2008 di Aula D-III FE Unsri Palembang. Menurut pemahaman tim penulis, corak penaklukan sebuah wilayah di Sumatera Selatan, hampir cenderung sama dengan wilayah Asia Tenggara lainnya, pada masa awal kerajaan-kerajaan klasik, kata penaklukan lebih banyak dapat disinonimkan dengan kata “pengakuan”. Pengakuan kekuasaan yang lebih kecil atas kekuasaan yang lebih besar. Artinya,

“taklukan” ini masih memiliki kekuatan-kekuatan yang otonom dan tetap merdeka. Palembang sebagai daerah pusatnya ini hanya butuh sebuah “pengakuan” saja, dan *uluhan-uluhan* itu “mengakui” dalam bentuk konsep ritual “*milir sebah*” tadi. Sekali-sekali, terutama sekali setahun dalam bulan ramadhan, menjelang lebaran, *milir sebah*, mengilir datang ke pusatnya di Palembang, sambil membawah barang-barang upeti gegawaan, hasil bumi daerah *uluhan*, untuk dipersembahkan kepada penguasa di pusat tadi. Sebagai imbalannya, pusat nanti akan memberi perlindungan ke pada daerah-daerah *uluhan* yang mengadakan *milir sebah*.



Gambar 5. Muara Sungai Ogan, di Air Musi, Kertapati, 1930

kalau muncul sebuah kekuatan pada suatu area yang memiliki beberapa penguasa, maka penguasa-penguasa kecil akan serta merta mengakui kekuasaan yang paling besar di antara mereka. Demikian misalnya, Kerajaan Sriwijaya, karena kebesaran, terutama kebesaran penguasanya, mampu “menaklukan” wilayah-wilayah sekitar tanpa perlu mengirim kekuatan militer yang besar. Pengakuan dari kekuasaan-kekuasaan kecil atas kekuasaan besar, seperti Sriwijaya atas Bangka hanya dengan membuat tugu peringatan berupa prasasti Kota Kapur, Jambi cukup dengan membuat Prasasti Karang Birahi, dan wilayah Lampung dengan memancangkan tugu prasasti Palas Pasemah. Prasasti yang merupakan batu berpahat tersebut adalah simbol dari sebuah kebesaran penguasa Sriwijaya, pahatannya hanya berupa kutukan yang membuat orang yang berada di wilayah yang mencakup tempat prasasti ini mengakui kebesaran raja-raja Sriwijaya. Baca dalam Munoz, Paul Michel. 2006. *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Ma-*

Daerah otonom, di uluan ini, terpilah-pilah dan terpisahkan satu sama lain dalam bentuk pemerintahan kemargaan, marga. Marga ini berbentuk sebuah wilayah yang lebih banyak ditentukan berdasarkan wilayah administrasi genealogis, seketurunan. Tulisan sejarah awal perkembangan pemerintahan marga di Sumatera Selatan, secara kronologis teratur dari waktu ke waktu belum diketemukan dalam suatu pustaka yang komprehensif⁹. Tulisan tentang marga baru muncul pada tahun 1825 ke atas, setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, cuplikan-cuplikan dari karangan Ambstenar Belanda dapat dijadikan rujukan untuk menyusun gambaran perkembangan pemerintahan marga tersebut dari waktu ke waktu. Salah satu teori pembentukan pemerintahan marga yang sering dijadikan acuan datang dari hasil pemikiran Van Royen¹⁰ tentang marga di Palembang tersebut. Ia membagi perkembangan marga dengan tahap-tahap sebagai

laya Peninsula. Singapore: Paperback. Pada masa awal Kesultanan Palembang, secara politis, namun tidak berbau militeristik, usaha untuk menundukkan daerah *uluan* oleh penguasa Palembang telah dimulai sejak Adipati Karang Widara tahun 1485 yang melalui muara-muara sungai di Sungai Musi mudik ke daerah *uluan*. Pada daerah-daerah yang dilewatinya ia memberi piagam penaklukan untuk sebuah pengakuan yang bersembunyi dalam kata “penundukan”, dengan memulai kampanye memberi gelar-gelar kehormatan yaitu “*pangeran*” dengan jalan “*angkat saudara*”, karena pangeran adalah gelar keluarga kesultanan. Faktor desakan ekonomi dan perlindungan untuk daerahnya, di mana basis ekonomi dan politik *uluan* terletak di semua aliran sungai yang bermuara ke sungai Musi, maka kepala-kepala pemerintahan *uluan* berangsur-angsur mengakui kekuasaan Sultan Palembang.

⁹ Data lokal tentang marga pertama kali didapati dalam piagam Sultan-sultan Palembang sejak tahun 1760. Misalnya tulisan Thomas Raffles, seorang ambstenar Barat, tidak pernah menyebut “Marga”. Sama seperti tulisan penulis Barat lainnya, ia masih memaknai kesatuan masyarakat dari sifat kekeluargaan tadi dengan istilah “*suku, sumbai, kebuaian*”. Baru sultan-sultan dari Kerajaan Palembang melihat kesatuan-kesatuan masyarakat teritorial sebagai suatu kebijakan pemerintahan.

¹⁰ Van Royen, J.W. 1927. *De Palembangse Marga: Haar Grond en Waterrechten, Proefschrift*. Leiden: G.L. van den Berg.

berikut:

Pertama, orang kubu, adalah kelompok dari beberapa jenis kelamin dan hidup dari penghasilan hutan, berburu dan menangkap ikan, mereka ini mengembara menelusuri pinggiran sungai guna memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengembara tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap dan diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok inilah yang dianggap sebagai asal mula kesatuan-kesatuan geneologis yang merupakan benih pertama terbentuknya masyarakat hukum adat bersifat geneologis yang berkembang menjadi geneologis teritorial.

Kedua, satuan-satuan masyarakat nomaden tadi, sudah memiliki keinginan hidup menetap dengan mencari nafkah bertani. Kelompok-kelompok yang menetap inilah yang dianggap mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu "*puyang*" tertentu. Tahap ketiga, dari cara bertalang berpindah-pindah, timbullah dusun-dusun permanen. Biasanya tiap-tiap rumpun tadi menghuni suatu daerah yang memiliki batas-batas wilayah alami misalnya sungai, lembah ataupun gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan satu "*jurai*" keturunan yang tergambar dari adat istiadatnya.

Tahap keempat, terjadinya perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun tadi berkembang biak. Bagian dari rumpun asal tadi perpindah lokasi membuat rumpun baru baik berjarak dekat ataupun jauh, akan tetapi masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Biasanya hubungan mereka belum terputus, kecuali sangat jauh jaraknya sehingga terputus hubungannya yang berakibat hidup sendiri-sendiri dalam rumpun dengan membuat dusun-dusun baru tempat hidup menetap, disinilah mulai berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat geneologis teritorial.

Tahap kelima, di sini sudah terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan

merasa seketurunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Akibatnya lama-kelamaan garis keturunan dari “*puyang*” yang berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat. Dari sinilah mulai satu-kesatuan masyarakat yang bersifat teritorialnya lebih menonjol sedangkan sifat geneologisnya menyusut. Mulai dari sinilah timbul istilah “*marga*” sebagai suatu kesatuan masyarakat adat. Kesatuan masyarakat yang bersifat geografis teritorial, disebut *marga* ini sudah ada dan berkembang terlepas dari pemerintahan kesultanan yang akhirnya juga melakukan penguasaan terhadap kesatuan-kesatuan *marga*. Seperti Belanda menjalankan penguasaan atas daerah-daerah *swapraja* di seluruh Indonesia.

Van Royen mengatakan bahwa dalam Kesultanan Palembang didapati pemerintahan yang telah teroganisir dengan baik, dengan telah terbentuk masyarakat-masyarakat teritorial yang kokoh dan kuat. Namun setelah datangnya penjajah, kekuasaan kesultanan menjadi lemah dan kehilangan kewibawaan yang ditambah lagi dengan rongrongan dari kerajaan sendiri. Berdasar uraian di atas, tergambar bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang bersifat teritorial di zaman kesultanan telah ada dan Pemerintah Belanda tinggal melanjutkan usaha-usaha ini dengan rasional dan sistematis.¹¹

¹¹ Pemerintahan Kolonial Belanda sangat memahami budaya lokal, maka menaklukkan pusat, Kesultanan Palembang yang kuat, akan membuat daerah sekitarnya, tanah *marga-marga* di *uluan* akan mengakui kekuasaan Belanda juga. Tercatat Belanda hampir tidak perlu mengerahkan kekuatan militernya secara besar-besaran untuk menaklukkan daerah *uluan*, kecuali *uluan* di dataran tinggi Pasemah. Baca dalam Nanang S. Soetadji. 2000. *Sumatera Selatan Melawan Penjajah Abad 19 (Berdasar Catatan Perang Pasemah tahun 1866 oleh Belifante Bersaudara)*. Jakarta: Millenium Publisher. Begitu menaklukkan Kesultanan Palembang, *iliran*, Belanda tinggal mewarisi sistem pemerintahan yang ada dan tidak mengusik-usik sistem *marga* yang ada.

Dari catatan sejarah yang kita ketahui bahwa raja-raja atau sultan-sultan Palembang berasal dan memiliki hubungan darah dengan raja-raja Jawa, oleh karena itu sistem pemerintahan yang mereka anut adalah sistem pemerintahan yang terdapat dari mana mereka berasal. Wilayah basis daerah Kesultanan Palembang adalah sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah-daerah yang langsung dibawah pemerintahan sultan yaitu daerah Belida, sekarang sekitar Muara Enim serta daerah Pegagan, sekarang masyarakat di sekitar Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang merupakan daerah *sikap* yang bebas pajak.

Raja juga sering mudik ke hulu-hulu sungai daerah sampai masuk jauh kepedalaman dengan “ritualisme” pergi pesiar, berburu dan menangkap ikan. Pada saat-saat itu dilakukan perundingan dengan kepala marga untuk mencapai sebuah kata pemukatan dan kesepakatan dalam mengadakan “persahabatan”, yang diselimuti embel-embel, di mana daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang. Pada daerah-daerah *uluhan* ini, sebagai imbalannya mereka diwajibkan membayar pajak dan sewaktu-waktu diperlukan diminta pula untuk menyiapkan tenaga kerja. Daerah-daerah tersebut dinamakan “*kepungutan*” yang meliputi wilayah Musi Ilir dan sekitarnya. Untuk menjamin kelancaran pungutan-pungutan pajak maka di setiap aliran sungai ditempatkan seorang “*jenang*” yang mengkoordinir marga-marga dalam aliran sungai.

Kadang kala sering terjadi perselisihan antara satu marga dengan yang lainnya, dipicu persoalan batas-batas marga, dalam mengatasi perselisihan ini, maka tangan raja atau sultan sering diminta untuk ikut menjadi penengah. Pada masa pemerintahan Ratu Sinuhun yang memerintah dari tahun 1630 sampai dengan 1642 Masehi, sebagai puncaknya kemudian dilembagakan suatu aturan yang dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala marga dalam suatu kesatuan dengan membuat aturan-aturan adat pertama di daerah *uluhan*. Tahun 1854, aturan-aturan adat

tadi dijadikan buku yang disebut “*Kitab Undang-undang Simbur Cahaya*”.¹²

Namun, semenjak Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan dan ditawan Belanda pada tanggal 6 Juli 1821 untuk diasingkan ke Ternate pada bulan Maret 1822, kesultanan harus berada di bawah kendali Pemerintahan Belanda. Kemudian ketika tahun 1824, Kesultanan Palembang dengan sultan terakhirnya Sultan Ahmad Najamuddin III dihapuskan, maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan marga di semua wilayah Sumatera Selatan sekarang ini. Belanda menggantikan para “*jenang*” dengan seorang *kontroleur* dengan mengeluarkan *Staadblad* No. 109 tahun 1827. Namun pada tingkatan bawahnya, Belanda tetap membiarkan marga dikepalai oleh kepala-kepalanya sendiri, para depati atau pesirah

Residen Palembang yang menggantikan kedudukan sultan Palembang di daerah *iliran*, Palembang, untuk mempertegas aturan-aturan dalam *Undang-undang Simbur Cahaya*, kemudian mengeluarkan *Circulaire* No. 326 tanggal 27 Juli 1873. Dalam aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. Nama jabatan “*pasirah*” sebagai kepala marga, “*pembarab*” bagi kepala dusun di mana *pasirah* berdomisili sekaligus pemegang jabatan wakil *pasirah* jika berhalangan, sedangkan kepala dusun disebut “*kerio*”. Kemudian syarat-syarat jabatan pamong marga adalah laki-laki yang sudah berkeluarga, pandai baca tulis minimal tulisan “*rencong*” atau huruf ulu.

¹² Pada dasarnya *Undang-undang Simbur Cahaya* yang ditulis dalam huruf Arab Melayu dicetak pada tahun 1865 terdiri dari 5 bab dan 178 Pasal merupakan adopsi dari tata tertib yang semula merupakan aturan kebiasaan penduduk marga di daerah Ulu Palembang, di mana dalam aturan ini kekuasaan tertinggi berada pada tangan Sultan Palembang, sehingga secara tidak langsung aturan ini mengakui kekuasaan kesultanan.



Gambar 6. Pangeran Goetika, salah satu *Pasirah Uluan* yang berasal dari Pasemah, 1867.

Melalui *Regeeling van de Imheemsche Rechtspraak Buitengewesten* (aturan pengadilan asli di daerah seberang) tahun 1923 jo *Besluit* Residen Palembang tanggal 23 Oktober 1933, maka diadakan aturan untuk pengadilan dalam daerah uluan Keresidenan Palembang ke dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Rapat, pengadilan marga dipimpin *pasirah*
2. Rapat kecil dan
3. Rapat besar dipimpin oleh kepala *onderafdeeling* atau orang yang ditunjuk residen, di mana kepala marga yang bersangkutan menjadi anggota.

Pada tahun 1848 Belanda mulai menempatkan ambstenar-ambstenar di pedalaman, Belanda mempersamakan kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat sebagai kesatuan teritorial dengan mengambil pola kesatuan marga yang dibentuk pemerintahan Kesultanan Palembang dalam daerah *kepungutan* yang dikuasai langsung pemerintahan kesultanan. Pada pengaturan awal di daerah marga dalam memudahkan mengontrol daerah-daerah

kekuasaannya, Belanda melakukan tindakan-tindakan, yaitu: Pertama, mempersamakan hak-hak warga marga, apakah ia merupakan “*mata gawe*”, kepala keluarga ataukah “*alingan*”, anggota keluarga; Kedua, menghapuskan larangan orang luar dari marga menetap dalam marga; Ketiga, larangan bagi warga marga pindah tempat bermukim antar marga; Keempat, menetapkan pemilihan kepala-kepala marga yang disebut secara umum sebagai *depati* atau *pasirah* dan kepala dusun-dusun yang disebut *kerio* atau *proatin* berdasarkan teritorial bukan berdasarkan geneologis. Terakhir, Belanda melakukan penyempurnaan administrasi marga.

Mengenai pokok-pokok peraturan tentang otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat asli di Keresidenan Palembang sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan kebijakan dalam *Staatblad* No. 814 tahun 1919¹³ dan terakhir diatur dengan *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitingewesten* yang terdapat dalam *Staadblad* No. 490 tahun 1938 dan *Staadblad* Np. 681 tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Marga di Palembang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat:

Pertama, marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka pemerintah Hindia Belanda dan merupakan badan hukum di Hindia Belanda. Kedua, marga berhak mengurus rumah tanganya sendiri berdasarkan hukum adat. Ketiga, susunan pemerintahan marga yang terdiri atas kepala marga, dan kepala-kepala adat yang duduk dilembaga dewan marga lainnya, biasanya bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat. Ketiga, pemerintahan marga didampingi dewan marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat.

¹³ Pada tahun 1919 Pemerintah Belanda menetapkan sebagai kesatuan pemerintahan adat yang terendah adalah marga bukan dusun. Van Vollenhoven mengatakan bahwa marga sebagai pemerintahan dalam arti luas mencakup catur praja yaitu perundangan pelaksanaan peradilan dan kepolisian.

Peraturan-peraturan marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan. Marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya. Peraturan ini dijalankan di bawah pengawasan instansi atasan, yakni kepala *onderafdeeling* yang dijabat orang Belanda disebut *controleur* yang dibantu oleh ambtenar-ambtenar yang dijabat orang bumi putera yaitu demang yang membawahi dua atau tiga orang asisten demang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, dua atau lebih wilayah *onderafdeeling* dijabat seorang asisten residen sebagai kepala *afdeeling* yang membawahi dan mengawasi para *controleur* atas nama residen sebagai kepala keresidenan. Marga sebagai suatu kesatuan pemerintahan baik di zaman Kesultanan Palembang, penjajahan Belanda, maupun Pendudukan Jepang, merupakan garda terdepan pemerintahan yang langsung berurusan dengan rakyat berdasarkan hukum adat.

Di samping *depati* dan *pasirah* sebagai kepala marga, setiap marga juga mempunyai sekretaris yang disebut juru tulis. Di bidang agama disebut penghulu sedangkan di setiap dusun dipimpin oleh *kerio* dan dengan kepala urusan keagamaannya *khatib*. *Khatib* dibantu *kaum* yang terdiri dari *modim*, *lebai*, *bilal* dan *marbot*. *Khatib* bertugas dan mencatat bilamana ada orang nikah, cerai, dan rujuk, di samping juga kematian dan kelahiran. *Khatib* melapor pada penghulu, penghulu melapor pada *pasirah* sebagai kepala marga, sedangkan *kaum* memelihara atau mengurus masjid, langgar, *padasan* (tempat wudhu).

Jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1821, membuat pemerintah kolonial mengambil kebijakan pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistis. Sistem sentralistis yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini sebenar bermata dua, karena sistem sentralistis hanya berlaku untuk struktur kekuasaan dari gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia, residen yang berkedudukan di keresidenan, dan *controleur* yang berkedudukan di *onderafdeeling*. Namun untuk tingkatan yang

paling rendah dalam sistem ini di Keresidenan Palembang, yaitu marga, tetap memiliki corak desentralistis. Untuk itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah Kesultanan Palembang dalam bentuk Keresidenan Palembang yang langsung dibawah kekuasaan seorang residen berkedudukan di Ibukota Palembang¹⁴. Daerah dibawah Keresidenan Palembang berupa wilayah *afdeeling* langsung dibawah kekuasaan seorang asisten residen yang berkedudukan di ibukota *afdeeling*. Keresidenan Palembang dibagi dalam daerah berbentuk *afdeeling* yang meliputi tiga *afdeeling* yaitu:

1. *Afdeelingen Palembangsche Benedenlanden* (Palembang Daerah-daerah Dataran Rendah) yang beribukota di Palembang.¹⁵
2. *Afdeelingen Palembangsche Bovenlanden* (Palembang Daerah-daerah Dataran Tinggi) yang beribukota di Lahat.
3. *Afdeelingen Ogan en Komering Oeloe* yang beribukota di Baturaja.

Daerah dibawah *afdeeling* di Keresidenan Palembang berbentuk *onderafdeeling* yang kekuasaannya dipegang oleh seorang

¹⁴ Kops, G. .F. de Bruyn, 1919. *Overzicht van Zuid-Sumatra*. Amsterdam: Druk van J. H. De Bussy. hlm. 33-34. Sebetulnya sistem sentralistis ini mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-undang yang termuat dalam *Staadblad*. Ketika pertama kali penerapan sistem sentralistik, Keresidenan Palembang menurut Keputusan Pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam *Regeering Almanak* tahun 1870 terbagi atas 9 *Afdeeling*. Kemudian pada tahun 1872, *Afdeeling* ini diperkecil menjadi 7 *Afdeeling* saja. Tetapi pada tahun 1878, Keresidenan Palembang kembali mempersempitnya menjadi 6 *Afdeeling*, di mana Palembang sebagai ibukota Keresidenan statusnya bukan lagi sebuah *Afdeeling*. Dari 6 *Afdeeling*, Keresidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi 4 *Afdeeling* lewat penetapan dalam *Staadblad* 1906 no. 466 dan *Staadblad* tahun 1907 no. 528. Penetapan Keresidenan Palembang menjadi 3 *Afdeeling* saja seperti di atas, diatur dalam tiga *Staadblad* yaitu *Staadblad* 1918 no. 612, *Staadblad* 1921 no. 465, dan *Staadblad* 1930 no. 352. Pematatan terhadap *Afdeeling* yang ada di Keresidenan Palembang ini dilaksanakan oleh keberadaan Pemerintah Kolonial yang sudah diakui di kota Pusat, Palembang, namun masih belum dapat berkuasa penuh di daerah pedalaman atau uluan

¹⁵ Asisten Residen *Palembangsche Benedenlanden* kedudukannya dipusatkan di Palembang. Lihat dalam *Algemeene Memorie van Overgave* dari D.A.F. Brautgem dengan Surat Keputusan Gubernur tanggal 3 Desember 1918 No. 13.

Controleur dan berkedudukan di ibukota *onderafdeeling*.

Afdeelingen Palembangische Benedenlanden kemudian terbagi lagi atas 5 (lima) *onderafdeeling*, yaitu:

1. *Onderafdeeling Banjoe Asin en Koeboestrecken* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Talang Betoetoe.¹⁶
2. *Onderafdeeling Komerling Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Kajoe Agoeng.
3. *Onderafdeeling Ogan Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Tandjoeng Radja.
4. *Onderafdeeling Moesi Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Sekajoe.
5. *Onderafdeeling Rawas* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Soeroe Langoen.

Afdeelingen Palembangische Bovenlanden terbagi atas 5 (lima) *onderafdeeling*, yaitu:

1. *Onderafdeeling Lematang Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Moeara Enim.
2. *Onderafdeeling Lematang Oeloe* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Lahat.
3. *Onderafdeeling Pasemahlanden* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Pagar Alam.
4. *Onderafdeeling Tebing Tinggi* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Tebing Tinggi.
5. *Onderafdeeling Moesi Oeloe* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Moeara Bliti.

Afdeelingen Ogan dan Komerling Oeloe terbagi lagi atas 3 (tiga) *onderafdeeling*, yaitu:

1. *Onderafdeeling Komerling Oeloe* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Martapoera.
2. *Onderafdeeling Ogan Oeloe* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Loeboek Batang.

¹⁶ Lihat *Memorie van Overgave Controlir C. Van de Velde*.

3. *Onderafdeeling* Moeara Doea dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Moeara Doea.

Menariknya, dalam sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini, pemerintah tetap dijalankan dengan sistem dualistik, yaitu di satu sisi mereka menerapkan hukum negara, namun pada sisi lain mereka tetap mengakui adanya hukum adat. Sumber aturan (*rechtspraak*) di Keresidenan Palembang yang dualistis ini, secara kasat mata, tergambar sebagai berikut:

1. Mengikuti dari sumber hukum yang berasal dari gubernur (pusat), misalnya dasar hukum di Hindia Belanda yang termuat dalam *wetboeken* dan *reglement*.
2. Mengikuti sumber hukum sendiri, aturan adat. Adat ini menitikberatkan pada pemutusan perkara yang didahului dengan rapat marga atau rapat dusun.

Hukum adat yang diakui ini tetap berjalan dengan sangat baik dalam sistem yang paling rendah yaitu marga. Marga menjalankan pemerintahannya secara otonom dengan dasar adat istiadat, baik susunannya (*semenstelling*), bentuknya (*inrichting*) maupun kewenangannya (*bevoegdheden*) yang berdasarkan hukum adat.



Gambar 7. Para *pasirah uluan* dari Afdeeling Rawas, 1930.

Secara struktural kedudukan pemerintahan dalam sistem kemargaan di Keresidenan Palembang menurut aturannya terdiri dari:

1. *Pasirah*¹⁷ yang merupakan kepala marga (*margahoofden*) yang memimpin dan mengambil keputusan secara kolektif dengan Dewan Marga (*margaraad*). Anggota dewan marga pada tiap-tiap marga terdiri dari sebagian besar pembarap, keria-keria, penggawa-penggawa dan sebagian kecil terdiri dari anggota-anggota pilihan, ketua Dewan Marga dikepalai langsung oleh *pasirah*.¹⁸ Dewan Marga memiliki kewenangan dalam tiga hal, yaitu menetapkan anggaran belanja dan perhitungan anggaran, membuat peraturan-peraturan dan menetapkan peraturan-peraturan tersebut dengan sanksi hukuman. Seorang *Pasirah* juga dibantu oleh juru tulis, penghulu atau khatib untuk urusan agama.
2. *Proatin* atau *kerio* yang merupakan kepala dusun (*doesoenhofden*). Kalau *proatin* ini dusunnya berkedudukan di ibukota marga, maka ia disebut *pembarap*. Ia dibantu oleh *penggawa*, *penggawo* dalam urusan agama.

Hukum adat yang kuat dalam sistem kemargaan ini dapat dilihat dari diberi kebebasan marga untuk mencari pendapatannya dalam menghidupi pemerintahan sendiri. Pendapatan marga berdasarkan hukum adat tersebut berasal dari beberapa hal, seperti:

1. *sewa-boemi* (sewa tanah atau *grondhuur*)
2. *sewa-oetan* atau *pantjang-alas* (retribusi yang ditarik dari war-

¹⁷ Seorang kepala marga atau bahkan kepala dusun (*ondermargahoofden*) kalau dianggap berjasa dengan Pemerintah Kolonial Belanda biasanya dapat diberi gelar-gelar, misalnya: *pangeran*, *temenggoeng*, *rio-depati*, *depati*, *rio*, *kerio*, *ngabei*, *ginda*. Biasanya gelar yang diberikan ini berdasarkan kemampuan kepala pemerintahan marga dan bawahan dalam mengumpulkan pajak.

¹⁸ Lihat dalam Ki Agoes Mas'oed. 1941. *Sedjarah Palembang moelai sedari Seri-widjaja sampai kedatangan balatentara Dai Nippon*. Palembang: Meroeyama.

- ga atau buka warga dari satu marga yang mengambil kayu di hutan marga)
3. *sewa-minjak* atau *sewa tambang* (retribusi dari penghasilan minyak dan sebagainya yang produksinya berada di wilayah marga tersebut)
 4. *sewa-soengai* dan *sewa lebak-leboeng* (penyewaan dari usaha penangkapan ikan di air, sungai, lebak atau lebung marga)
 5. Produksi-produksi lainnya yang dimiliki dari hasil usaha marga.
 6. *bunga-kajoe* (retribusi pemungutan dari kayu yang diambil untuk bahan bangunan)
 7. subsidi dari pemerintahan pusat (gubernur) untuk pendidikan (*scholen*) pejabat marga
 8. uang sekolah (*schoolgelden*) yang dibuka marga.

Secara tidak langsung dalam sistem ini, marga diberi kewenangan oleh pemerintah kolonial dalam bidang politik pemerintahan dan pengadilan dalam lingkungan marga itu sendiri untuk memutuskan perkara-perkara marga, juga dalam bidang ekonomi menarik pajak kepada penduduknya. Namun menyangkut persoalan dalam bidang pemerintahan dan politik antar marga, perkaranya diselesaikan lewat keputusan *controleur* sebagai pejabat Pemerintah Kolonial Belanda yang tertinggi di atas marga. Perkara yang terkenal, misalnya yang terjadi di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* dalam hal ini adalah untuk menentukan tapal batas marga. Misalnya dalam Arsip Nomor 2905 tahun 1896¹⁹ dijumpai perkara tapal batas antara Marga Talang Kelapa dengan Marga Pangkalan Balai. Kedua orang *pasi-rah* di marga ini kemudian sama-sama membuat surat pengaduan pada *controleur* yang berkedudukan di Talang Betoetoe mengenai hal ini. *Controleur* kemudian dengan tegas membuat tapal batas antara kedua marga yaitu dengan menariknya mulai dari ulu Sungai Rengit, Lubuk Benal, Lubuk Teras sampai ke Pematang

¹⁹ Arsip Nomor 2905 Tahun 1896 Koleksi Pribadi Noer Mohammad.

Genting.

Pemerintahan desentralisasi pada tingkat marga ini, sebenarnya tidak lebih dari modifikasi sederhana dari sistem desentralisasi antara marga dan sultan di masa Kesultanan Palembang. Kalau pada masa itu berlaku sistem “*milir-seba*”, suatu bentuk kewajiban penguasa *uluhan* untuk melakukan pertemuan di depan sultan sambil menyerahkan “cinderamata” serta memberi informasi sesuai “pesanan” sultan. Dengan demikian, sistem patron dan klien seperti ini mengakar kuat dari pucuk tertinggi kekuasaan, sultan, sampai ke lapisan masyarakat yang paling rendah. Fungsi daerah *uluhan* sebagai basis ekonomi agraris dan sekaligus sumber daya manusia yang sewaktu-waktu dapat ditarik bantuan jika kesultanan membutuhkannya, sangat ditopang oleh keberadaan daerah *uluhan* yang banyak menghasilkan hasil pertanian dan hasil hutan.²⁰

Mengakar kuatnya kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Keresiden Palembang, hampir bersamaan dengan keberhasilan mereka keluar dari masa transisi, Belanda setelah menaklukan Palembang pada tahun 1824 sampai dengan tahun 1900-an, masih berusaha menata kehidupan berpolitik dan ekonomi di Keresidenan Palembang. Artinya, sebelum tahun 1900-an, daerah-daerah pedalaman, *uluhan* dari Keresidenan Palembang masih merupakan wilayah yang “belum” terjamah secara penuh oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial masih bersifat sebagai pengawas saja, belum bertindak sebagai pelaksana. Pengawasan ini dalam hal pengontrolan terhadap pembesar-pembesar bekas Kesultanan Palembang atau pada para wakil Kesultanan Palembang yang merupakan suatu usaha pencegahan terhadap pengaruh supaya jangan tertanam di dalam penduduk *uluhan*, untuk

²⁰ Kenyataan inilah yang sesungguhnya menurut Collenbrader, H.T. 1925. *Koloniale Geschiedenis*. hlm. 286. yang menopang kekuatan ekonomi dan politik Kesultanan Palembang

membangkitkan kembali kekuasaan para pangeran Kesultanan Palembang yang lari ke pedalaman.²¹

Secara politis, sosial dan budaya, dengan sistem tersebut, pada tataran masyarakat bawah belum mengalami perubahan, sama seperti zaman kesultanan. Kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda pada masyarakat kelas bawah masih belum berubah seperti masa sebelumnya. Sehingga pada tingkatan tersebut, masyarakat *uluan* Palembang, belum merasakan tekanan yang begitu kuat dari Pemerintah Kolonial Belanda. Secara politis, sistem pemerintahan marga di daerah *uluan*, yang sudah ada sebelum zaman Kesultanan Palembang²² dengan jabatan tertinggi dipegang oleh seorang *pasirah* atau *depati*, selaku kepala pemerintah merangkap kepala adat setempat yang secara tradisional memiliki kekuasaan otonom sehingga dapat diibaratkan sebagai sebuah “republik desa” yang berdaulat didaerahnya masing-masing. Ketika pada abad ke-19, Belanda berkuasa di wilayah Keresidenan Palembang, sistem marga ini masih berjalan seperti zaman kesultanan.

Setelah masa transisi, menjelang awal abad ke-20, ketika Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengubah politiknya di daerah-daerah Uluan Palembang, pengaruh kekuasaan Belanda mulai terasa. Belanda mulai ikut campur dalam urusan-urusan pemerintahan marga, mereka menjalankan politik pasifikasi dengan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh wilayah bekas Kesultanan Palembang. Perubahan ini sejalan dengan mulai bergantinya sistem politik kolonial untuk daerah Keresidenan Palembang, yang pada masa transisi masih bersifat sentralisasi, kemu-

²¹ Lihatlah, bahwa kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk pegawainya hanya pada tingkat *controleur* yang membawahi daerah *onderafdeeling*, ia untuk urusan ke bawah diperantarai oleh demang dan asisten demang serta *pasirah* yang semuanya adalah pegawai-pegawai bumiputera.

²² Lihat dalam Soeloeh Marga oentoek Keresidenan Palembang, No. 9 Maret 1932, hlm. 128-135.

dian berdasarkan *Indische Staatblad* 1903 Nomor 329 berganti sifat menjadi pemerintahan desentralisasi.²³ Sebetulnya, secara kasat mata pemberlakuan desentralisasi ini menguntungkan bagi daerah *uluhan*, namun dalam realitanya justru sebaliknya, sebab Pemerintah Belanda yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan, berganti menjadi lebih pengontrolan melekat. Seorang *controleur*, kepala pemerintahan Belanda yang paling rendah pada daerah *onderafdeeling*, yang sebelumnya kalau berurusan dengan *pasirah* lewat perantara demang dan asisten demang, namun dengan berlakunya desentralisasi, *controleur* berhubungan langsung dengan *pasirah* karena penghapusan sistem *distrik* dan *onderdistrik* di daerah *onderafdeeling*.

Perubahan politik kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap daerah Keresidenan Palembang, termasuk juga di seluruh wilayah Nusantara, mengakibatkan mulai terjadinya perubahan sosial budaya akibat pergantian pola politik. Perubahan politis, ekonomis, sosial, dan budaya ini tidak saja dirasakan di *Gemeente* Palembang, namun juga daerah-daerah *uluhan* Keresidenan Palembang. Perubahan sistem kekuasaan ini, berpengaruh juga pada pola kebijakan politik dan ekonomi, di mana Belanda mulai awal abad ke-20 mulai menjalankan politik liberal dengan sistem ekonomi “pintu terbuka”, *open the door politie*. Akibat lebih lanjutnya, adalah mulai banyaknya orang-orang Belanda dan bangsa Barat lainnya hadir di dalam kehidupan orang-orang *uluhan*.

Pelaksanaan dari politik desentralisasi, dengan diikuti oleh politik liberal dan sistem ekonomi “pintu terbuka”, ditujukan kepada perubahan perilaku masyarakat *uluhan*, sistem sosial ekonomi yang masih dianggap tradisional dicoba untuk dihapus karena dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan sistem

²³ Lebih jauh lihat dalam *Indische Staatblad* 1903 Nomor 329 “Decentralisatiewet”.

modern. Untuk hal ini, secara politis, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah perubahan dalam sistem marga, marga yang dalam hal otonomi lebih didasarkan pada prinsip etnisitas, kesukuan, lebih didorong pada perubahan otonomi yang bersifat teritorial, jadi dalam cara pandang baru ini, marga-marga tidak dibiarkan hidup terpisah satu sama lain menurut selera sukunya masing-masing. Oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sistem ini mulai diperkecil kekuasaan dan pengaruhnya. Perlombaan antara suku mulai dipisahkan dengan menjalankan politik “penghargaan” terhadap pembesar suatu suku, sehingga nantinya dari sini mulai mengarah pada perlombaan antar wilayah kemargaan. “Penghargaan” tersebut lebih pada pemberian gelaran “pangeran”, terhadap seseorang *pasirah*, kepala marga, yang dianggap setia dalam pengabdianya yang cukup lama terhadap pemerintah kolonial. Pola inilah yang nantinya akan meningkatkan sentimen kesukuan yang mengarah pada sentimen antar wilayah, sehingga boleh dikatakan pada tataran lokal waktu itu mulai terjadi segregasi spasial di kalangan masyarakat *uluan*.

Secara ekonomis, sebelum desentralisasi tersebut, masyarakat daerah *uluan* dalam sistem marga, masyarakatnya bebas mengambil apa saja yang terdapat dalam hutan dan di sungai-sungai atau lebak-lebak, seperti kayu, rotan, menjangan, ikan dan lain-lain serta memiliki kebebasan dalam hal menggarap tanah dengan ketentuan memberi sebagian hasilnya kepada penguasa tradisional yang pada akhirnya ditujukan untuk keperluan masyarakat marga lainnya yang lebih luas. Dalam sistem marga ini, masyarakat juga dibebaskan dari membayar pajak atas tugas-tugas yang dijalankannya. Perlahan namun pasti, kekuasaan pemerintah kolonial di Keresidenan Palembang terlebih sejak desentralisasi, mulai mengusik hal-hal ini untuk daerah pedalaman. Dalam sistem penggarapan tanah, rakyat dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah kolonial, mereka diwa-

jibkan membayar sewa tanah (*landrent*)²⁴ yang dikenal dengan istilah “pajak kepala” yang pada masa kesultanan tidak dikenal masyarakat *uluhan*.

Pengenalan sistem pajak kepala yang merupakan pajak rutin ini memberatkan masyarakat *uluhan*, yang rata-rata hidup dari hasil pertanian. Selain pajak kepala ini, petani juga dibebani pajak-pajak lain melalui pegawai-pegawai pribumi yang harus dibayar pada penguasa tradisional, seperti *pasirah*, *kerio*, dan *pembarap* yang tidak mendapat gaji dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pelaksanaan sistem pajak yang menurut cara Barat ini sangat memberatkan masyarakat di daerah *uluhan* mulai dijalankan. Dibalik kebijakan ini, masyarakat mulai dihadapkan pada kecurangan-kecurangan dan segala macam bentuk kekerasan dari para pegawai pribumi yang memperkaya diri, yang tidak mereka hadapi pada masa Kesultanan Palembang.

Kecurangan dan penindasan ini semakin terasa, ketika pergantian sistem dari sentralisasi ke desentralisasi. Dalam mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, pemerintah kolonial telah mengeluarkan bermacam-macam peraturan seperti peraturan *cacar*, *pancung alas*, peraturan tebang kayu, peraturan tebus surat kawin, surat cerai atau rujuk dan lain-lainnya yang semuanya ini dikeluarkan atas persetujuan Pemerintah Kolonial Belanda. Semua peraturan ini disertai dengan sanksi yang berat yaitu barang siapa yang melanggar peraturan ini akan dikenai hukuman, baik denda, penjara atau kurungan.

Penerapan bermacam pajak ini pada akhirnya menimbulkan berbagai kecurangan yang merugikan masyarakat luas secara umum, sebagai contoh, pajak kayu yang ditetapkan 70% nya masuk kas marga, namun dalam prakteknya para pembesar pribumi

²⁴ Soeloeh Marga oentoek Keresidenan Palembang, *ibid*, hlm. 278.

di Uluan Palembang, terutama para *pasirah*, *kerio* atau petugas pemeriksa penjualan kayu lebih banyak yang bertindak menyimpang, mereka lebih mencari-cari kepada penyalahgunaan pengambilan kayu oleh si pengambilnya. Dengan mencari kesalahan tersebut, maka para pembesar di Uluan Palembang dapat menyita hasil kayu tersebut dengan 50% dari hasil tersebut masuk ke kas marga dan sisanya dibagikan di antara pembesar marga tersebut. Kecurangan-kecurangan ini hanyalah salah satu contoh, mungkin lebih banyak lagi praktek kecurangan yang terjadi.

Seiring dengan penerapan desentralisasi dan perubahan dalam sistem politik "*open the door*", di tanah Uluan Palembang, mulai banyak mengalir para pemodal besar asing yang menanamkan investasinya dalam bidang perkebunan-perkebunan besar dan perminyakan. Selain minyak bumi dan gas, di daerah *uluhan* memiliki kekayaan dalam hal kecocokan tanah dengan tanaman para atau karet yang cukup laku di pasaran internasional. Sehubungan dengan dibukanya politik ekonomi "*open the door*", maka di daerah *uluhan* ini masuk perusahaan-perusahaan asing yang didominasi oleh orang-orang Belgia. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini, pada dasarnya menyebabkan munculnya dualisme ekonomi di kalangan masyarakat daerah *uluhan*, tanah marga untuk kesejahteraan masyarakatnya banyak yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan yang mempunyai modal kapital yang sangat besar. Namun kemunduran kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah ini, menimbulkan kesejahteraan di kalangan atas daerah *uluhan* ini, para penguasa formal tradisional seperti *pasirah*, *kerio*, *pembarap* dan lain-lain dapat memanfaatkan situasi ini dengan memperkaya diri. Perusahaan-perusahaan besar asing dalam memiliki tanah dengan cara berkolusi pada para penguasa formal tradisional, setelah mendapat tanah perusahaan besar ini juga memberi prioritas kepada mereka dalam memiliki tanah-tanah luas untuk ditanami karet secara luas.



Gambar 8. Penanaman bibit karet yang diolah perusahaan asing di Tebanan, Betung sekarang ini, 1931.

Kenyataan ini, menyebabkan berubahnya orientasi para penguasa formal tradisional dari pemimpin kharismatik yang memiliki visi mensejahterakan masyarakatnya. Mereka yang pada zaman kesultanan bertindak sebagai pelindung dan pengayom di daerah *uluhan*, berubah menjadi pemimpin yang mulai memperkaya diri sendiri. Keadaan inilah yang mulai memunculkan perlawanan-perlawanan yang disebabkan dari kebencian di kalangan masyarakat bawahan di daerah *uluhan*. Perlawanan ini acapkali timbul dalam bentuk semacam “protes” atau membangkang dengan menghindari dari *gawe raja*.²⁵

Dalam keadaan yang seperti ini, di mana para umarah, tidak bisa menjadi “tumpuhan”, masyarakat di kalangan bawah mulai mengingat masa lampau dengan mengharapkan datangnya juru

²⁵ Konsep perlawanan masyarakat di daerah *uluhan* ini, sebetul merupakan perlawanan masyarakat umum kebanyakan terhadap penindasan yang mereka alami secara sewenang-wenang dari penguasa. Perlawanan ini tidak menggunakan kekerasan, karena secara fisik mereka tidak mampu membuat perlawanan seperti itu. Inilah yang dalam konsep Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hlm. xxii-xxxii, disebut sebagai senjatanya orang-orang kalah.

selamat dalam sosok “ratu adil” atau “Imam Mahdi”. Di kalangan penduduk bawah *uluan*, bersamaan dengan adanya politik etnis yang salah satunya berisi tentang edukasi, memajukan pendidikan mulai muncul gap di kalangan penduduk, yaitu golongan atas, anak *pasirah*, *pembarap*, bahkan *kerio* dapat mengenyam pendidikan formal yang diselenggarakan Belanda, sementara anak-anak golongan bawah hanya mendapat pendidikan agama, yang ditampung oleh golongan agama, baik “*kaum tuo*” maupun “*kaum mudo*”²⁶. Golongan agama inilah yang mendirikan sekolah hampir di setiap marga dan dusun di *uluan*. Bersamaan dengan itu, pada tataran nasional, masa ini mulai timbul pergerakan nasional, terutama pergerakan yang dimotori oleh kaum agama. Pergerakan kaum agama ini mulai masuk jauh pada tingkatan lokal untuk mendidik kader-kader agar sadar akan kenasionalismenya. Setelah masuk ke kota Palembang pada tahun 1912 yang dibawa dua orang tokohnya, R.M. Tirtohadisuryo dan Raden Gunawan, organisasi Sarekat Islam mulai masuk juga ke daerah-daerah Uluan Palembang. Tercatat dalam rentang waktu 1914 sampai dengan 1920 telah terbentuk cabang-cabang Sarekat Islam hampir di seluruh Keresidenan Palembang lengkap dengan pengurus dan anggota-anggotanya yang cukup banyak. Pengaruh pergerakan pada tingkat nasional, di mulai ketika masuknya pengaruh Sarekat Islam di daerah Uluan Keresidenan Palembang.

²⁶ Istilah *kaum tuo* dialamatkan untuk para ulama atau pemimpin agama yang mendapat pengetahuan agama secara tradisional dari orang tua atau moyangnya yang biasanya bekas ulama sepuh penasehat pada zaman Kesultanan Palembang, mereka dipandang masih berpendirian kolot. Sementara istilah *kaum mudo* dialamatkan pada ulama atau pemimpin agama yang mendapat pengetahuan agama melalui pendidikan modern, dengan masuk pesantren atau giat di organisasi-organisasi politik yang berpandangan modern, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Sarekat Islam dan sebagainya. Pada lingkup mencari pengaruh dua golongan ini sering didapat perbedaan, namun pada tingkat ajaran keduanya sepakat sama. Lihat dalam Jaroen Peeters. 1998. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang, 1821-1942*. Jakarta: INIS.



Gambar 9. Para Haji yang baru datang dari Mekkah, mereka termasuk dalam kelompok *kaum mudo*, 1930.

Pendudukan Jepang di Keresidenan Palembang dimulai sejak serangan tanggal 14 Februari 1942. Pelabuhan udara Talang Betutu, merupakan sasaran pertama yang harus dikuasai Jepang dalam mengalahkan tentara Belanda di Keresidenan Palembang. Secara politis, pendudukan Jepang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahannya menyesuaikan dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang sedang terlibat Perang Dunia II. Pemerintahan Pendudukan Jepang bekerja dengan sangat cepat, sebab hanya dalam hitungan sepuluh hari setelah mereka masuk ke Palembang, pada tanggal 25 Februari 1942 telah keluar segala aturan-aturan tentang pelaksanaan pemerintahan di Palembang dan sekitarnya.

Pembentukan pemerintahan hanyalah melanjutkan Pemerintahan Kolonial Belanda yang sudah ada. Secara struktural tingkat hirarkies pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan terdiri dari

1. *Syu-Tjo* (*Onderafdeeling*), yang dikepalai seorang *Bun Syu-Tjo*,
2. *Gun* (*Distrik dan Onderdistrik*) dikepalai seorang *Fuku Gun* yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Gun-Tjo* dan *Fuku-Gun-Tjo*.

3. *Son* (Marga) dikepalai seorang *Son-Tjo*,
4. *Ku* (Dusun) dikepalai seorang *Ku-Tjo* yang dibantu oleh beberapa orang Penggawa atau Khatib yang disebut *Kumi-Tjo*.

Menariknya, dalam sistem seperti ini, jika pada masa kolonial pejabat *onderafdeeling* dipegang pegawai Belanda, maka pada masa Jepang kepala *gun* setingkat *onderafdeeling* dipegang oleh para wedana, yang merupakan pamongpraja bumiputra. Artinya, untuk pertama kalinya jabatan pimpinan dalam pemerintah dipegang oleh orang pribumi. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, seorang *gun* dibantu oleh beberapa orang *fuku gun-tjo*, yang dahulu berpangkat asisten demang. Jabatan *son-tjo* dan *ku-tjo* seperti zaman kolonial Belanda tetap dijabat oleh pejabat pribumi.

Walaupun secara struktur pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sistem badan-badan legislatif seperti *groepsgemeenschap* Palembang dihapuskan, dewan marga dibubarkan, dan *afdeeling* dihilangkan. Namun hapusnya sistem dewan, tidak berarti pemerintahan tidak memiliki otonomi. Otonomi tetap berlaku, tetapi tanpa ada badan atau perangkat khusus penyelenggara otonomi. Wewenang dan kekuasaan dewan marga dan dusun langsung berada dalam satu tangan yaitu kepala marga, *pasirah* atau *kerio*.

Ketika Jepang berkuasa di wilayah *gun-gun* pada daerah uluan Palembang, garis politik ekonomi dijalankan oleh *bun syu-tjo* dengan sistem "*autharkhi*", yaitu di mana segala daya dan tenaga serta usaha-usaha di bidang perekonomian dipusatkan hanya untuk kepentingan perang semata. Berdasarkan sistem ini, maka di berbagai *onderafdeeling* atau *gun* di daerah uluan yang sumber daya alam, terutama basis agrarisnya serta sumber daya manusianya difokuskan untuk kepentingan perang. Diberlakukannya sistem "*Kumyai*" dibelakang *autharkhi* membuat pemerintah pendudukan Jepang, dalam setiap kunjungan ke marga-marga menganjurkan agar petani menanam padi dan makanan

pokok lainnya, dengan segala hasil panennya diserahkan kepada Pemerintah Jepang tanpa ganti rugi.

Sistem marga dan dusun di Keresidenan Palembang ditampung dalam satu wadah yang disebut *tonari-gum*. Seluruh penduduk di dalam sistem kemargaan di *gun* pada masa pendudukan Jepang dibagi dalam satuan-satuan masyarakat pedesaan atau *tonari-gumi*, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *kumi-tjo*, *penggawo* atau *khatib*. *Kumi-tjo* dibantu oleh delapan orang *han-tjo* yang kedelapannya memiliki tugas masing-masing, yaitu:

1. Mengurusi kartu-kartu pembagian, mengumpulkan data-data mengenai keadaan kesehatan penduduk,
2. Mengurus dan mengatur kebun-kebun yang ditanam sesuai dengan ketetapan pemerintah Jepang,
3. Berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan kecil,
4. Mengawasi perlindungan lubang parit dan pemadam kebakaran agar tetap terpelihara dengan baik,
5. Mengelola keuangan milik marga dan meningkatkan semangat menabung,
6. Memberikan santunan kepada keluarga tentara yang mengalami kesulitan, serta
7. Memberi bantuan kepada peristiwa-peristiwa kematian.

Jepang kemudian membentuk Badan Pembantu Pemerintah (BPP) dalam memudahkan dan mengefektifkan pemobilisasian masyarakat. BPP yang merupakan nama halus untuk kuli *Romusha* di daerah-daerah uluan dikerahkan untuk membangun Lapangan Terbang di daerah Betoeng. Tenaga BPP ini berasal dari wilayah-wilayah lain di sekitar Keresidenan Palembang dan para tawanan tentara Sekutu.

Pola pergerakan organisasi yang mulai “maju” pada akhir zaman kolonial Belanda di daerah-daerah uluan, pada zaman Pendudukan Jepang mengalami kemunduran, bahkan cenderung “mati suri”. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan dan pembekuan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap setiap

kegiatan organisasi politik. Larangan ini tidak saja ditujukan pada kegiatan politik praktis, namun menyentuh sampai hal-hal informasi politik seperti pembrendelan dan pensensoran surat-surat pos dan pengeselan radio serta pengawasan yang ketat bagi masyarakat yang mau berpergian ke luar daerahnya.

Jepang menerapkan sistem ekonomi-politik perang, di mana pengawasan, pembatasan dan pelarangan tidak saja dalam kegiatan politik, namun juga pada persoalan ekonomi. Di daerah uluan, semua hak milik pemerintahan dan orang-orang Belanda disita, seperti tanah-tanah perkebunan, baik karet maupun kelapa sawit. Pemilikan atas barang-barang yang dianggap penting seperti sepeda motor, mobil, kapal, perahu motor dan jenis-jenis barang yang terbuat dari besi atau baja harus dilaporkan pada penguasa pendudukan Jepang. Dalam menghadapi situasi ini, pengetatan terhadap kontrol politik dan ekonomi di atas, Pimpinan Pusat Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), mengeluarkan pengumuman kepada semua anggotanya agar menghentikan kegiatan untuk sementara waktu, dan menganjurkan supaya bergerak secara diam-diam atau mengadakan pergerakan bawah tanah yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi masing-masing daerahnya.

Secara fisik, aksi protes masyarakat di Uluan Palembang terhadap penguasa pendudukan Jepang terjadi pada awal tahun 1943. Peristiwa ini terjadi pada Dusun Air Item, Marga Panukal Abab, di mana rombongan tentara Jepang yang sedang mengadakan patroli ditembaki dengan senapan kecepek oleh para aktivis gerakan bawah tanah Sarekat Islam. Peristiwa ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap semua tokoh lokal dan aktivis lain Sarekat Islam. Selain protes sosial secara fisik, di daerah uluan muncul aksi "non fisik" dalam bentuk pengungsian sebagian besar rakyat pedusunan ke daerah-daerah talang atau kebun yang letaknya jauh dari dusun untuk menghindari tindak kekerasan dan pemaksaan dari para penguasa pendudukan

Jepang pada waktu itu.

Setelah Kemerdekaan Indonesia, sistem marga di Uluhan Palembang tetap terus berlangsung, sambil di tingkat pemerintahan pusat berusaha membuat peraturan untuk menyeragamkan seluruh tingkat pemerintahan terendah di Indonesia dalam bentuk pemerintahan desa. Kemudian pada tahun 1974, keluar undang-undang tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, namun baru lima tahun setelahnya keluar undang-undang Nomor 5 tahun 1979, yang disahkan pada tanggal 1 Desember 1979 tentang Pemerintahan Desa²⁷. Undang-undang ini untuk memenuhi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-undang No.19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Berdasarkan Undang-undang ini, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibantu perangkat desa terdiri dari sekretariat desa (Sekdes) dan kepala-kepala dusun (Kadus). Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan.

Desa adalah otonomi asli didasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan (*medebewind*). Seperti dapat dimaklumi dari penjelasan umumnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam satu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Pasal 1 ayat a yang berbunyi "*Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan*

²⁷ Lembaran Negara No. 56 tahun 1979.

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35 ayat 1 aturan peralihan desa atau setingkat dengan desa yang sudah ada saat mulai berlakunya undang--undang ini, dinyatakan sebagai Desa menurut pasal 1 ayat a di atas. Penjelasan umum No. 4 atas UU No. 5 tahun 1979 keadaan pemerintahan Desa saat ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang pernah ada dalam mengatur Desa, yaitu : *Inlandse Gemeente Ordonantie* dalam *Staadblad* No. 83 tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengenwesten* dalam *Staadblad* No. 490 tahun 1938 jo *Staadblad* No. 681 tahun 1938 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Menurut Amrah Muslimin²⁸ sebenarnya yang dimaksud desa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1979 bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah “marga”.

Keputusan penting mengenai marga adalah dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No.142 KPTS/111/1983, melalui SK tersebut semua kesatuan pemerintahan yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintahan desa yang lengkap. Wilayah kekuasaan administratif desa tersebut meliputi dusun-dusun yang berada dibawah naungan eks marga yang

²⁸ Wadah kesatuan pemerintahan yang terendah dalam provinsi Sumatera Selatan disebut marga yang dalam bentuknya masih dapat berjalan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979 dengan perubahan nama, asal dijelaskan dalam penjelasan peraturan daerah, bahwa yang dimaksud desa itu adalah marga, dari 188 marga di Sumatera Selatan saat itu dilebur menjadi 2190 desa. Lihat dalam Amrah Muslimin. 1986. *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

dihapuskan. Nampaknya Pemerintah Provinsi mengambil jalan praktis menjadikan setiap marga yang terdiri dari dusun-dusun lama menjadi desa dan *pasirah* lama diangkat sebagai kepala desa sementara. Keputusan ini juga didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah desa, bertambah untung daerah dalam hal penerimaan setiap tahun bantuan presiden karena perhitungannya didasarkan pada jumlah desa bukan marga²⁹.

²⁹ Menarik disimak bahwa Dewan Pembinaan Adat Istiadat Sumatera Selatan telah mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 07/DPPASS/K/2005 untuk meninjau kembali SK Gubernur No.142/KPTS/III/1983. Alasan pengiriman surat tersebut salah satu butirnya adalah adanya fakta sejarah, bahwa dalam rapat Dewan Pembina Adat Istiadat Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Hotel Sabang, Jakarta yang dihadiri mantan Gubernur Sumatera Selatan Mayjen Polisi (Pur) H. Ahmad Bastari dan mantan Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen TNI Harun Sohar, terungkapan H. Sainan Sagiman, sebagai penanda tangan SK Gubernur No.142 tersebut meminta maaf atas kebijakannya menghapuskan pemerintahan marga seperti yang diceritakan H. Ali Amin, S.H. yang mendapatkan cerita ini melalui Sekretaris Daerah zaman H. Sainan Sagiman, Drs. T.L.A. Mahali (alm).

BAGIAN DUA GEOGRAFIS ILIRAN DAN ULUAN

Konsepsi *iliran* dan *uluan*, secara geografis dibedakan dalam tri-kotomis keruangan, yakni Kota Palembang, kemudian Iliran Palembang dan Uluan Palembang. Pada masa kini, tri-kotomis ini sudah mulai memudar, namun pada masa lampau, tri-kotomis keruangan ini memiliki relatif gambaran yang lebih mantap, terutama pada masa kolonial Belanda abad ke-19.

Tri-kotomis geografis ini lebih terlihat dalam pembagian keruangan secara ekonomis, terutama dalam hubungannya dengan ekosistem yang berkenaan dengan mata pencarian dalam lingkungan alam yang memiliki perbedaan secara fisik. Tetapi yang menarik nantinya, tri-kotomis keruangan secara geografis fisik ini, pada embel-embelnya lebih tajam masuk dalam ranah dikotomi keruangan secara ideologis, masih berkisar antara *iliran* dan *uluan*.

Perbedaan tri-kotomis berdasar geografi lingkungan ini pada kenyataannya lebih berafiliasi pada realita bahwa masyarakat pedesaan di daerah *uluan*, sangat tergantung pada sistem transportasi sungai sebagai jaringan utama dalam komunikasi, baik antar mereka sendiri, maupun dengan daerah pusatnya yang terletak di *iliran*, Palembang. Transportasi komunikasi utama ini tercipta demikian rupa, karena pada masa itu jalan daratan belum dikenal sama sekali karena boleh dikatakan hampir tidak

ada jalan daratan. Landskap utama, oleh sebab itu yang terekam dalam memori penduduk di masyarakat *uluhan*, sungai adalah urat nadi utama mereka.

A. Kota Palembang: Muara Sungai, Bandar Dagang

Deskripsi tentang keadaan alam Kota Palembang di masa lampau, datang dari beberapa sumber asing. Berdasar berita Cina abad ke XII yang ada dalam catatan *Chau Ju-kua yang terdapat dalam Fiedrich dan Rockhill*¹, mengilustrasikan bahwa penduduk di Kota Palembang tinggal terpencar di luar kota atau tinggal dalam rumah rakit di atas air yang lantai untuk mengapungkannya terbuat dari bambu. Sementara berita abad ke-13 yang ditulis Ma Huan², mendeskripsikan bahwa Kota Palembang **merupakan tempat yang dikelilingi oleh air dengan sedikit tanah keringnya. Para pemimpin semuanya tinggal di rumah-rumah yang dibuat di atas tanah kering di pinggiran sungai. Rumah-rumah rakyat biasa terpisah dari rumah pemimpin semua tinggal di atas rumah-rumah rakit yang diikatkan pada tiang di tepian dengan tali. Apabila air pasang, rakit akan terangkat dan tidak akan tenggelam. Seandainya penduduk akan pindah ke tempat lain, mereka memindahkan tiang dan menggerakkan rumahnya sendiri tanpa mengalami banyak kesulitan. Di dekat muara sungai, pasang dan surut terjadi dua kali dalam sehari dan semalam.**

Berita Arab yang didapat dari perjalanan pengelana bernama Sulaiman, yang tercatat dalam buku Abu Zayid Hasan³, mengilustra-

¹ Friedrich & W.W. Rockhill (ed.) 1966. *Chau-Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the 12 & 13 Centuries, Entitled Chu-Fan-Chi*. Amsterdam: Oreintal Press. Hal. 60-66.

² Ma Huan, "The Overall Survey of the Ocean's Shores" ahli bahasa oleh Feng Ch'eng-chun. *Introduksi dalam catatan J.V.G. Mills, Cambridge University Press*. 1970. Hlm. 98-102.

³ Abu Zayid Hasan, "Voyage du marchand Arabe Sulayman en Inde et en Chine, redige en 851, suivi de remarques par Abu Zayd Hasan, vers 916", yang dialih bahasakan G. Ferrand. 1922. *T. VII des Clasique de l'Orient*. Paris. Hlm. 95.

sikan Kota Palembang sebagai berikut, Palembang merupakan pemukiman yang memanjang dengan gambaran luas kota dikiaskan bahwa dari kokok ayam di waktu subuh dan terus menerus berkokok bersahutan dengan ayam jantan lainnya yang berjarak lebih dari 100 prasang, satu prasang kurang lebih 6,25 km, karena kampungnya berkesinambungan satu sama lain tanpa terputus.

Berdasar berita Eropa yang ditulis oleh **Russel** pada abad ke-19, disebutkan bahwa penduduk Kota Palembang menyebut dirinya orang Melayu tulen, yang tidak akan pernah membangun sebuah rumah di atas tanah kering selagi mereka masih dapat membuat rumah di atas air, dan tidak akan pergi ke mana-mana dengan berjalan kaki, selagi masih dapat dicapai dengan perahu. Sedangkan, **Westenenk**⁴, seorang Residen Palembang menggambarkan dengan ilustrasi bahwa besarnya batas Kota Palembang sebagaimana seekor kucing dapat berjalan tanpa memijak tanah dari Palembang Lama ke Batanghari Leko, karena melompat dari satu atap ke atap rumah-rumah penduduknya.

Berdasarkan prasasti yang ditinggalkan masa Kerajaan Sriwijaya, maka dapat diperkirakan dan dibayangkan bahwa Kota Palembang pada waktu itu, ukuran jaraknya pada daerah barat terdapat Prasasti Talang Tuo berisi persembahan sebuah Taman Criksetra yang dibangun oleh raja Dapuntah Hyang Sri Jayanasa yang terletak di Talang Tuo, sekarang masuk Kecamatan Talang Kelapa, di tengah-tengah terdapat prasasti Prasasti Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi yang dianggap sebagai Proklamasi Sriwijaya, sementara pada bagian timur terdapat Prasasti Telaga Batu yang merupakan prasasti persumpahan, yang terletak di Kampung 2 Ilir, di belakang PT. Pupuk Sriwijaya, sekarang.

Deskripsi kolonial tentang keadaan alam Kota Palembang datang dari Marsden, yang menyebutkan bahwa kota yang terle-

⁴ L.C. Westenenk, "Boekit Sigoentang en Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Melajoe", dalam *Tijdschrift en Binnenland Goevernement tahun 1923*. Hlm. 223.

tak di dataran rendah berupa tanah rata dan berawa-rawa, selain bagian bahwa daerah Palembang yang menuju pantai merupakan tempat yang mudah digenangi banjir, sehingga seluruh daerah tersebut tidak cocok untuk daerah pertanian. Sementara daerah pedalaman, daerah ulu, sebaliknya merupakan tanah yang produktif. Akibatnya, di sana terdapat kebun-kebun dengan hasil alam yang dapat dipasarkan untuk kebutuhan daerah luar, seperti lada, damar atau darah naga, gambir, tembakau, benang pualam, sutra merah yang masih sangat kasar, gading gajah, tawas, arsenikum, kemenyan dan sebagainya.

Hasil kebun ini dibeli oleh para kaki tangan raja dengan harga yang murah, sebaliknya orang *iliran* kembali menjual berbagai keperluan pedalaman seperti candu, garam dan bahan pakaian kepada masyarakat *ulu*. Gambaran yang datang dari Marsden, bahwa kota ini terletak beberapa mil di atas delta sungai atau sekitar 60 mil dari laut dengan deskripsi pada masa kesultanan sebagai berikut, Palembang selalu digenangi air sungai, terutama ketika air pasang sehingga tidak memungkinkan



Gambar 10. rumah-rumah di Kota Palembang yang menghadap sungai. Sungai urat nadi utama transportasi kota, 1900.

untuk membangun jalan. Hampir seluruh perhubungan dilakukan dengan perahu. Perahu-perahu yang berjumlah ratusan meluncur di sungai ke segala penjuru.

Sungai Musi yang mengalir Kota Palembang merupakan sungai terbesar di Pulau Sumatera, berhulu di balik Bukit Barisan, hulunya disebut Anyer Musi dengan iliran disebut Tatong. Lebar sungai Musi lebih dari satu mil dapat dilayari dengan aman oleh kapal yang bagian bawah permukaan airnya tidak lebih dari 14 kaki. Pasang sungai Musi memiliki imbas luas, di mana rumah-rumah warga yang berada dekat pinggir Musi dan anak-anak sungai terendam, kadang air meluber ke badan jalan.

Kondisi alam ini bagi masyarakat Kota Palembang menjadi modalnya untuk memanfaatkannya, sebab air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Palembang termasuk kota lama, namun sulit untuk mentifologikan dengan jelas kota ini termasuk jenis kota kraton, kota pelabuhan atau kota maritim.⁵ Karena berdasarkan ciri, terutama ekologis kota, Palembang dapat dikatakan memiliki ketiga tipologi awal kecuali kota pedalaman. Letak kota di muara Sungai Musi menyebabkan Palembang tumbuh sebagai kota dagang yang mempunyai jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah pedalaman Kesultanan Palembang atau daerah Sumatera Selatan sekarang ini, yaitu tanah tinggi Sumatera bagian Barat yang terbentang di Bukit Barisan atau wilayah Sindang Kesul-

⁵ Tipologi kota lama seperti ini, pembagiannya beserta ciri-cirinya dengan jelas dibedakan oleh Djoko Suryo, "Sejarah Perkotaan di Indonesia: Dari Kota Tradisional sampai Kota Kolonial", Makalah dalam *Workshop: Street Image: Decolonization and Changing Symbolism of Indonesian Urban Culture, 1930-1960s*, PPAT-UGM dan NIOD, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agustus 2004. Tipologi kota lama oleh Djoko Suryo, berdasarkan ciri-cirinya dibedakan paling tidak dalam empat jenis yaitu, *pertama*, kota istana atau kraton, *kedua* kota pelabuhan, bandar atau maritim, *ketiga* kota pantai atau maritim dan *keempat* kota pedalaman atau agraris.

tanan, daerah kaki bukit atau *piedmont* yang merupakan tempat pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah atau wilayah sikep kesultanan, serta wilayah pesisir timur yang merupakan daerah kepungutannya. Dengan faktor-faktor tersebut masyarakat mampu mengadakan suatu jaringan komunikasi yang bersifat luas sehingga frekuensi tukar menukar informasi sudah bertaraf tinggi.

Kota Palembang memiliki beberapa anak sungai dengan sentranya terletak pada sungai Tengkuruk di sebelah timur dan sungai Sekanak di sebelah baratnya.⁶ Paling tidak tercatat lebih kurang 117 buah anak sungai yang mengalir ditengah kota dengan bagian jantungnya terdapat banyak air yang mengalir dan tampak jernih.⁷ Penunjang utama kota adalah tatanan perdagangan “ruang air” dengan sokongan dan dukungan dari kampung-kampung atau guguk-guguk yang menghasilkan industri

⁶ Pusat kota pada masa kesultanan, sebenarnya mengalami tiga kali pergeseran. Pusat kota awal, terletak di daerah apa yang disebut dengan *Palembang Lamo*, Palembang Lama, daerah sepanjang 1 sampai 3 Ilir, di mana dahulunya berdiri Kraton *Kuto Gawang*. Pusat kota awal ini terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Buah dan Sungai Linta. Kemudian kraton ini dibakar oleh Belanda, sehingga pusat kota bergeser ke arah Barat. Pusat Kraton kedua ini di daerah Beringin Janggut atau Kraton Beringin Janggut, di antara Sungai Rendang dan Sungai Tengkuruk. Terakhir pusat kota terletak di daerah 16 Ilir di antara Sungai Tengkuruk dan Sungai Sekanak, mula-mula sultan membangun Kraton Kuto Batu lalu disebelahnya dibangun Kraton Benteng Kuto Besak yang dibangun sebagai pertahanan dalam menghadapi Belanda. Lihat dalam J.W.J. Wellan, “de Stad Palembang in 1935: 275 Jaar Gelegen als een Phoenix, uit haar Asch Herrezen”, dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 1935, hlm. 17.; Djohan Hanafiah. *Kuto Gawang: Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. (Palembang: Pariwisata Jasa Utama, 1988).; dan Djohan Hanafiah. *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, (Jakarta: Penerbit Masagung, 1989).

⁷ Jumlah 117 buah anak sungai tersebut menurut Djohan Hanafiah. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 16.; Wawancara Palembang, 14 Maret 2004; 4 September 2006; dan 28 Oktober 2008.

kecil ditopang masyarakat pedalaman yang menghasilkan hasil kebun dan hutan serta tambang membuat sultan dan para pembesar kraton dapat berdagang dengan dunia luar di atas “ruang air” Kota Palembang.⁸

Oleh karena hampir setiap jengkal tanah yang timbul di Kota Palembang adalah daerah rawa yang berbentuk pulau karena dikelilingi oleh anak-anak sungai⁹, maka Palembang adalah sebuah ibu kota kesultanan yang berbentuk delta-delta. Penduduk, sebagai konsekuensi bertempat tinggalnya mereka di tanah sultan, memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan sultan. Kewajiban penduduk di “tanah darat” terhadap kepentingan kraton, dapat dilihat dari pemberian nama atas kampung tersebut yang dikenal dengan istilah sistem guguk.¹⁰

Letak Palembang yang strategis karena merupakan pusat penghubung antar “dunia luar” yang datang dari perairan Selat Bangka dengan pedalaman menjadikannya tumbuh sebagai kota pelabuhan. Palembang juga memiliki bandar-bandar dagang di mana sultan bertindak sebagai pengawas langsungnya. Prasarana dan sarana di Palembang sangat mendukung kemajuan perda-

⁸ Lihat dalam J.W.J. Wellan. *Zuid-Sumatra economisch overzicht van de Gewesten, Djambi, Palembang, de Lampoengsche Districten, en Benkoelen*. (Wageningen: H. Veenman & Zoon, 1932), hlm. 160.

⁹ Dalam bahasa Palembang anak-anak sungai tersebut juga disebut sebagai *soak*. Jadi, kalau *Soak Lado* adalah sungai kecil yang arusnya mirip patahan keris, *lado*. Wawancara Palembang, 15 Januari 2005.

¹⁰ Djohan Hanafiah, “Guguk, Lembaga Sosial Ekonomi di Kota Palembang pada Abad ke-18 dan 19”, dalam majalah *Jambatan: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Indonesia*, Amsterdam: Jaargang 7, nummer 2, 1980, hlm. 83. *Guguk* berasal dari kata sansekerta “*gugu*” yang mengacu pada kepatuhan masyarakat pada pemimpinnya. *Guguk* mencerminkan keahlian masyarakat yang mendiami kampung tersebut. Misalnya *Guguk Sayangan* kampung pengrajin tembaga, *Guguk Kepandean* kampung pandai besi. Berdasarkan status masyarakat misalnya *Guguk Ketandan* kampung para *tandha* atau bendaharawan kesultanan yang bertugas memungut pajak. Berdasarkan asal masyarakatnya misalnya *Guguk Kebanghan*, kampung yang didiami oleh penduduk asal daerah Bangka.

gangannya dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu, Palembang telah membuktikan dan terus secara seksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan dengan peraturan yang paling baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa.

Memasuki zaman kolonial, Belanda walaupun telah berkuasa atas Palembang sejak tahun 1821, namun dari segi fisik sampai menjelang awal abad XX hampir tidak ada yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda masih berkuat dengan persoalan menanamkan hegemoni politik terhadap daerah-daerah pedalaman bekas wilayah Kesultanan Palembang. Ketika Liberalisme bangkit di Eropa yang menyebabkan timbulnya Politik Ethis di tanah jajahan, membawah implikasinya yang tidak kecil bagi perkembangan Kota Palembang dengan lahirnya Undang-undang Desentralisasi yaitu terbentuknya kota otonom, *Gemeente* Palembang sejak tanggal 1 April 1906. Secara fisik kebijakan membangun Palembang baru dimulai setelah masa tiga belas tahun kemudian dari ditetapkannya sebagai *gemeente*. Hal tersebut disebabkan pada rentang waktu tersebut tidak ada penunjukan untuk seorang pemimpin, *burgemeester*, walikota atas kota tersebut.¹¹

Kampung masa kesultanan dibagi atas dasar sistem guguk yang ditujukan untuk patuh pada kepentingan dan kehendak pembesar kraton, dibagi dengan menciptakan “kampung-kampung baru” kolonial berdasarkan sistem administratif. Palembang yang geografisnya dibelah oleh Sungai Musi dibagi dalam dua distrik yaitu seberang ulu dan seberang ilir. Distrik Seberang Ulu secara administratif dibagi dalam 14 kampung, sementara Distrik Seberang Ilir sebagai pusat kota dipecah dalam 37 kampung.¹² Masing-masing kampung memuat dua atau lebih sistem

¹¹ Lihat dalam Djohan Hanafiah, 1988. *Ibid.* hlm. 19.

¹² *Staadblad van Nederlandsch Indie*. No. 506 jo Decentralisatie Verslag, Tahun 1929.

guguk tadi.

“Ruang daratan” yang ada sebagai hasil pembangunan sejak tahun 1921, tidak terlalu banyak, hanyalah berupa jalan sempit dan penuh tikungan dengan tidak memperhatikan garis sempadannya sehingga jalan hanya bisa dilewati satu arah saja. Masterplan *Gemeente* Palembang yang telah dibuat oleh Thomas Karsten harus direalisasikan pemerintah *gemeente* dalam modernisasi tersebut. Modernisasi pertama, dicurahkan pada infrastruktur jaringan transportasi air yang mengandalkan sungai sebagai urat nadi perhubungan dirubah dengan jalan darat sebagai media transportasi. Sungai Tengkuruk menjadi sungai pertama yang ditimbun oleh *Gemeente* Palembang pada tahun 1928 dengan memakai “puruh” yang banyak terdapat di perbukitan Palembang.

Kemudian pada tahun 1921, “ruang daratan” pertama tercipta sepanjang 20 Km mulai dari Jalan Belakang Benteng sampai ke Sungai Tengkuruk dengan menembok Sungai Kapuran, Sungai Tengkuruk, Sungai Sayangan dan Sungai Rendang. Jalan di atas Sungai Tengkuruk tersebut terbentuk mulai dari pelabuhan muara Sungai Tengkuruk yang diperpanjang sampai ke daerah Talang Jawa, sekarang depan Pasar Cinde. Ketika Pelabuhan Boom Baru dibangun tahun 1908 dirasakan mulai timbul kebutuhan untuk memperluas ruang daratan ke arah sebelah timur pada tahun 1932, maka pemerintah *gemeente* membuat jalan tembusan ke pelabuhan Boom Baru yang memanjang mulai dari Masjid Lama, melewati Sungai Sayangan, Sungai Rindang dan Sungai Bajas. Sementara untuk keperluan transportasi ke arah sebelah ilir bagian barat dibuat Jalan *Raadhuisweg*, sekarang Jalan Merdeka, yang bersambung dengan Jalan *Nassaulaan*, sekarang Jalan Taman Talang Semut, yang menghubungkan pusat kota dengan perkomplekkan pemukiman Eropa di Talang Semut dengan menimbun Sungai Kapuran dan melewati Sungai Sekanak. “Ruang daratan” semakin luas ketika dibangun jalan tem-

busan antara daerah 1 Ulu di tepi Sungai Ogan dengan wilayah Plaju di tepi Sungai Komering yang memanjang sepanjang tepi Sungai Musi. Kota Palembang, pada masa awal pembangunan oleh pemerintah kolonial adalah merubah secara perlahan dari kota air, yang memiliki ketergantungan dengan sungai-sungai ke kota daratan, yang dialihkan ke jalan-jalan.

B. Iliran Palembang: Batasan Geografis Ekologis Daerah Uluan Dataran Rendah

Pada dasarnya, daerah yang disebut Iliran Palembang, secara geografi ekologis terbelah menjadi dua yakni Iliran Palembang yang berada di daerah selatan dan Iliran Palembang yang berada di bagian utara. Dalam mencari bentangan alam yang memisahkan secara kasat mata secara fisik dari batasan geografi dua bagian Iliran Palembang ini akan kita lihat dalam pengaruh ekosistem geografi ini terhadap teknologi hidup yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.



Gambar II. Perahu Kajang di sungai Komering, 1920. Perahu yang juga tempat tinggal untuk beberapa hari selama perjalanan yang digunakan untuk berlayar dari Ilir ke Ulu dan sebaliknya.

Daerah yang dimaksud dengan nama Iliran Palembang, secara umum geografis ekologisnya, adalah daerah yang memiliki

bentangan tanah-tanah delta lebak berawa yang mendapat pengaruh utama dari munculnya pasang surut air laut yang masuk dari *iliran*. Pasang surut tersebut mampu mencapai masuk dan tetap dirasakan sampai jauh ke dunia *uluan* ini serta menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan permukaan air di sungai-sungai besar. Perubahan ini, kadang pada masa musim hujannya, air pasang besar ini mampu menyebabkan banjir.

Daerah Iliran Palembang sebelah selatan, memiliki dua sungai besar, sungai Ogan dan sungai Komering, yang juga memiliki anak-anak cabang sungai yang mengalir ke dua sungai utama ini, seperti Lempuing, Mesuji, Babatan, dan sebagainya. Kedua sungai ini muara alirannya menyambung dengan sungai Musi sebagai sungai utama dalam konteks Batanghari Sembilan tadi, muara kedua sungai ini berujung ke iliran Musi dan hampir terletak sangat dekat dengan lautan. Oleh karena itu, sentuhan laut yang berasal dari sungai Musi pertama sekali melanda aliran kedua sungai ini dan anak-anak cabangnya tadi, sehingga pasang ini menyebabkan tanah lebak di aliran kedua sungai ini dapat di airi sekaligus pasang ini mengakibatkan tanah alluvialnya menjadi daerah yang sangat subur untuk pertanian padi.

Lingkungan alam seperti ini yang kemudian menciptakan daerah pertanian produksi tanaman pangan yang terutama dapat mengisi pasaran lokal. Akibatnya, beberapa daerah di Iliran Palembang sebelah selatan, terutama wilayah yang dekat dengan pasar ibukota, kota Palembang, muncul sebagai wilayah komunitas dengan pemukiman yang besar, lebih kurang di atas seribu jiwa pada masa kolonial.

Dusun-dusun di daerah Pegagan, mulai dari Muara Penimbung di Marga Pegagan Ilir Suku I, pada *Onderafdeeling* Ogan Ilir sampai ke Tanjung Lubuk di Marga Pegagan Ulu Suku I pada *Onderafdeeling* Komering Ilir, serta di pusat Komering Ilir, Kayuagung menjadi daerah sentra utama pertanian dengan budidaya padi lebak, terutama padi basah, akibat anugerah dari genangan

air pasang tersebut. Kenyataan, bahwa penduduk Palembang pada awal abad ke-19 berjumlah lebih dari duapuluh ribu jiwa merupakan konsumen utama dari budidaya padi lebak ini. Realita menarik ini, juga sangat ditunjang oleh kedekatan geografis antara Palembang dengan daerah Iliran Palembang sebelah selatan ini.

Munculnya, sistem pasang surut di wilayah ini mengakibatkan mudahnya peramalan untuk bulan baik penanaman padi basah di daerah lebak rawa ini. Pada Iliran Palembang sebelah selatan ini, penanaman padi lebak di mulai ketika air surut di awal kemarau menjadi air dalam dengan meninggi permukaan air pada waktu musim penghujan. Musim seperti ini terjadi pada antara bulan Maret, April, dan Mei, di mana sebagian tanah lebak ini muali mengering.¹³

Penanaman padi basah, dalam proses tahapan-tahapan tersebut, tidak memerlukan teknik irigasi, karena secara alami pasang surut air telah tercipta demikian rupa. Padi basah ini umumnya hanya dapat ditanam dalam jangka waktu sekali setahun, karena mengikuti musim dan iklim yang terjadi di daerah Iliran Palembang sebelah selatan ini. Semakin tinggi tanah lebak-

¹³ Kegiatan menanam padi awal ini, oleh penduduk setempat disebut *merencam*. Padi *mulan*, bibit yang dipilah dari padi pilihan pada panen tahun yang lalu, ditanam, *ditugal*, pada daerah pematang yang tidak terendam air. Penanaman bibit padi di pematang ini dengan membuat lubang-lubang dangkal pada tanah, lalu menebar benihnya. Ada juga penanaman dilakukan pada tumpukan rumput kering di atas air yang dilakukan jika pematang juga tergenang air. Setelah padi mulai besar dan agak tinggi, kira-kira setumit orang dewasa, kemudian masuk dalam tahap *betandur*, mencabuti bibit padi di tanah pematang untuk dipisahkan dan ditanam serta disebar batangan bibit padi ini di area sawah lebak yang masih tergenang sedikit air. Kemudian, setelah padi ini agak besar dan tinggi lagi, kira-kira setinggi lutut atau dengkul orang dewasa, padi ini dicabut kembali untuk dipisah batangan-batangan dalam kelompok yang lebih kecil lagi, untuk *dicemai*, ditanam di tanah lebak yang kedalaman airnya relatif lebih surut sekitar setengah lutut orang dewasa, sehingga padi ini tetap terendam namun tidak tenggelam. Wawancara, Palembang, 8, 10 dan, 12 Agustus 2010

nya, maka makin besar panennya jika dibandingkan pada tanah lebak yang lebih rendah dan becek.

Menariknya, selain padi basah ini, di daerah Iliran Palembang sebelah selatan, terutama di *Onderafdeeling* Ogan Ilir dan *Onderafdeeling* Komering Ilir, tanah keringnya dalam hal ini sering disebut pematang juga menjadi sumber penghasilan yang tidak kalah menariknya dan memberi penghasilan lebih. Delta-delta pematang yang terjadi akibat pertemuan dua sungai besar, sungai Ogan dan Komering tadi, justru mengakibatkan munculnya tumbuhan pohon liar yang dikenal dengan nama pohon *Nur* atau kelapa aren (*areca catechu*) yang dapat diolah menjadi *tenguli*, gula cair dan gula batok, populernya disebut gula Jawa. Biasanya kepemilikan dan pemakaian pohon *Nur* ini diatur oleh *pasirah*, kepala marga setempat, yang dibagi secara rata dan adil, di mana satu kepala rumah tangga mendapat sekitar lima puluh batang pohon aren untuk dikelola dan disadap air buahnya. Dari sebatang batang pohon aren dapat dihasilkan kurang lebih tiga ratus keping gula arennya. Gula aren ini, tidak saja dijual di pasar ibukota, Palembang, namun juga diperdagangkan sampai ke Pulau Bangka.

Sementara, di Iliran Palembang bagian utara, di mana dengan sumbu utamanya sepanjang sungai Musi, Batanghari Leko dan Sungai Banyulincir mengalir ke *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken, keadaan tanah rawanya hampir sama dengan Iliran Palembang bagian selatan tadi. Pasang surut di daerah ini juga menciptakan genangan air selama musim penghujan dan baru berakhir di musim kemarau.

Namun berbeda dengan daerah selatan Iliran Palembang tadi, di bagian utara pada *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken secara ekosistem tanahnya tidak cocok untuk tanaman pertanian. Tanah rawa-rawa di daerah ini lebih banyak terbentuk dari dedaunan tanaman rawa

itu sendiri yang membusuk sehingga memiliki struktur tanah gambut. Tanah gambut ini ternyata memiliki ketebalan dan kedap air. Keadaan ini mengakibatkan daerah tersebut tidak cocok untuk lahan pertanian, khususnya padi basah seperti yang dikembangkan di Iliran Palembang bagian selatan tadi. Akibatnya, masyarakat di daerah bagian utara Iliran Palembang ini harus memanfaatkan tanah kering sebagai area penanaman padi ladang. Dapat dipahami jika di daerah *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken ini tidak terdapat surplus beras yang sangat berarti, sehingga masyarakatnya tidak memanfaatkan pasar kota Palembang yang sebenarnya cukup dekat dari *onderafdeeling* ini.

Proses komersialisasi industri pertanian di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken, wilayah Iliran Palembang bagian utara ini, baru dapat berjalan pada pertengahan abad ke-19. pengenalan kembali trayek perdagangan melalui sungai Batanghari Leko, baru dimulai kembali pada tahun-tahun pertengahan abad ke-19 tadi. Trayek ini baru dibuka kembali ketika Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda membentuk institusi pemerintahan lokal di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken tersebut.¹⁴

Pada daerah Iliran Palembang bagian utara ini, selain memiliki tanah lebak rawa yang cukup luas, terutama di sebelah selatannya, sementara pada sebelah utaranya muncul landskap tanah

¹⁴ Munculnya pemerintahan lokal di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken, iliran Palembang bagian utara ini, telah mempengaruhi jalur perdagangan ke daerah tersebut, peningkatan keamanan di jalur perdagangan ini telah membuka kembali trayek perdagangan sungai di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan Banjoeasin en Koeboestrekken ke Palembang. Dalam catatan sejarah, akibat ketegangan politik antara kesultanan Palembang dan Kesultanan Jambi, mengakibatkan jalur ini ditutup dalam jangka waktu yang lama, akibatnya jalur lalu lintas perahu dari Palembang ke Iliran Palembang bagian utara ini lebih sepih dibandingkan jalur lalu lintas perahu dari Palembang ke iliran Palembang bagian selatan.

kering yang juga tidak kalah luasnya. Tanah kering ini yang berbentuk tanah talang telah menciptakan keadaan alam yang luar biasa bagi tumbuhnya vegetasi asli yang alami. Pada tanah talang ini, akibat tidak terjadinya banjir di area ini menyebabkan dapat tumbuhnya pohon-pohon besar yang subur. Pada batang-batang pohon ini muncul konsentrasi pohon menyan yang dijadikan komoditi utama komersialisasi di daerah ini.

Namun akibat eksploitasi yang berlebihan, di mana batang pohon kemenyan ini bersifat terbatas, muncul krisis pohon menyan di kalangan masyarakat Iliran Palembang bagian utara, *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken. Tetapi seiring dengan meningkatnya pasar untuk komoditas menyan ini, maka hal ini menyebabkan masyarakat di daerah ini mulai melakukan rasionalisasi pohon menyan pertama dengan cara menanam kembali pohon-pohon menyan tersebut secara besar-besaran.

Rasionalisasi pohon kemenyan ini dilakukan di daerah *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken, di mulai pada wilayah Mantri Melayu, Lawang, Punjung dan Epil sampai ke daerah Pangkalan Balai. Pada daerah-daerah ini banyak dijumpai konsentrasi penanaman kemenyan di kebun-kebun khusus kemenyan milik masyarakat. Tercatat juga, dalam skala kecil pada bagian selatan masyarakat di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken juga mulai mengikuti cara penanaman pohon kemenyan seperti itu, terutama di daerah-daerah Penukal, Sungai Keruh dan Teluk Kijing.

Biasanya teknik penanaman pohon kemenyan dengan cara membakar habis lahan ladang, bibit yang diambil dari hutan liar, berbentuk biji dari batang pohon kemenyan ditanam dengan dibenamkan ke dalam tanah dengan diberi jarak tertentu. Kebun kemenyan milik masyarakat di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken ini, kadang sama

seperti hutan semak belukar lain, di mana masyarakatnya cenderung tidak mengadakan perawatan atas kebun kemenyan tersebut, sehingga batang pohon kemenyan tersebut tumbuh bersamaan dengan pohon semak liar lainnya. Penanaman pohon kemenyan kembali biasanya dilakukan setelah tujuh tahun kemudian. Pemanenan pohon kemenyan ini dilakukan dengan mengambil getah damarnya yang dapat menghasilkan menyan murni.

Pada dasarnya, produksi dari penanaman kebun kemenyan ini telah menghasilkan dan mendatangkan kemakmuran pada masyarakat Iliran Palembang, di *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken, seiring dengan meningkatnya harga menyan sampai tahun 1900-an. Keuntungan dari perdagangan kemenyan ini dapat dilihat dari perubahan bentuk sandang yang dipakai sebagai simbol kemakmuran masyarakat di Iliran Palembang bagian utara ini, rumah-rumah bagusnya beratapkan genteng, banyak pemilikan songket di kalangan wanita, ikat pinggang bersepuh dan perhiasan kepala yang dibeli dari pasar Palembang.

Dalam tulisan bagian ini, yang ingin ditonjolkan dan dibahas sebenarnya bahwa secara geografis ekologis daerah orang uluan yang disebut Iliran Palembang mencakup wilayah-wilayah *Onderafdeeling* Ogan Ilir, *Onderafdeeling* Komering Ilir dan *Onderafdeeling* Ogan Komering Ulu yang disebut daerah Iliran Palembang bagian Selatan di satu sisi. Sementara, *Onderafdeeling* Musi Hilir dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken adalah daerah yang disebut Iliran Palembang bagian utaranya.

C. Uluan Palembang: Batasan Geografis Ekologis Daerah Uluan Dataran Tinggi

Secara geografis, ekologis pembeda antara Iliran Palembang dan Uluan Palembang berpindahnya landskap, pemandangan, gambaran dan bentang alam, di Keresidenan Palembang dari

daerah dataran rendah di kawasan Iliran Palembang menuju daerah dataran tinggi, yang kita sebut Uluan Palembang. Ciri utama dari daerah dataran tinggi ini adalah hampir tidak ada laginya pasang surut dari sungai-sungai besar yang membentang di Keresidenan Palembang.

Empat sungai besar Ogan dan Komering di Iliran Palembang sebelah selatan serta Musi dan Batanghari Leko di Iliran Palembang sebelah utara, menemukan titik pasang surutnya pada daerah dataran tinggi ini. Menariknya, secara ekosistem pada dataran tinggi, Uluan Palembang ini tumbuhan memiliki jenis yang berbeda dari daerah dataran rendahnya, Iliran Palembang. Pada daerah Uluan Palembang ini semakin ke arah uluan sungai, semakin rapat hutannya dan juga semakin jarang ditemukan tanah terbukanya.

Pada akhir abad ke-19¹⁵, daerah Uluan Palembang ini sebagian besar ditumbuhi aneka tumbuhan yang disebut dalam bahasa Latin *Dipterocarpea* yang membentuk hutan tropisnya. Akibat ekologis yang tidak sama dengan daerah Iliran Palembang, maka di daerah Uluan Palembang masyarakatnya lebih banyak yang mengandalkan padi kering. Padi kering ini ditanam di tanah pematang, yang berbentuk renah pada daerah tepian sungai. Sebenarnya, tanah ladang lebih ke dalam yang ada di wilayah ini juga ditanam budidaya padi kering dengan membuka sawah ladang. Namun, hasil yang didapat tidak signifikan dengan tanaman padi kering yang ditanam di tanah renah. Menariknya, dari jenis penanaman padi seperti ini adalah penduduk umumnya lebih menyukai beras yang dihasilkan dari padi talang ini karena kelembatan dan keharuman baunya. Kadang produksi yang dihasilkan dari tanah renah dua kali lipat jika dibanding tanah talangnya. Hal ini disebabkan hasil tanah rendah lebih baik akibat

¹⁵ Menurut catatan Arsip Nasional No. 361 hal. 14 dan Arsip Nasional Tahun 1943, hal. 24.

kesuburan tanah yang diciptakan oleh endapan subur tanah aluvial yang ditinggal banjir tahunan di sungai-sungai dataran rendah ini. Banjir tersebut umumnya bukan karena pasang, tetapi karena tingginya curah hujan.

Menariknya, perbedaan panen antara daerah Uluan Palembang yang tidak sama dengan daerah Iliran Palembang. Panen padi di Uluan Palembang justru berakhir pada bulan Maret sampai April yang diakibatkan tanah renahnya ini kering pada bulan-bulan tersebut. Untuk itu, maka kemudian penduduk Uluan Palembang di lahan ini, setelah panen padi keringnya juga memiliki usaha penanaman pertanian lain dalam bentuk tananam kapas. Tanaman kapas di daerah ini, memiliki ciri yang khas sehingga identik dengan sebutan *kapas ulu*¹⁶. Ciri khas tersebut, karena kapas di daerah ini hanya berumur satu tahun saja, ditanam pada bulan Maret-April setelah panen padi kering dan panen pada bulan Juli hingga Agustus.¹⁷

Menariknya, penanaman kapas di uluan Palembang ini, memiliki pembatas yang jelas. Kapas sangat rentan dengan curah hujan yang tinggi, sementara tanah bukit barisan sifatnya basah. Kapas juga tidak cocok untuk tanah yang berawa karena cepat

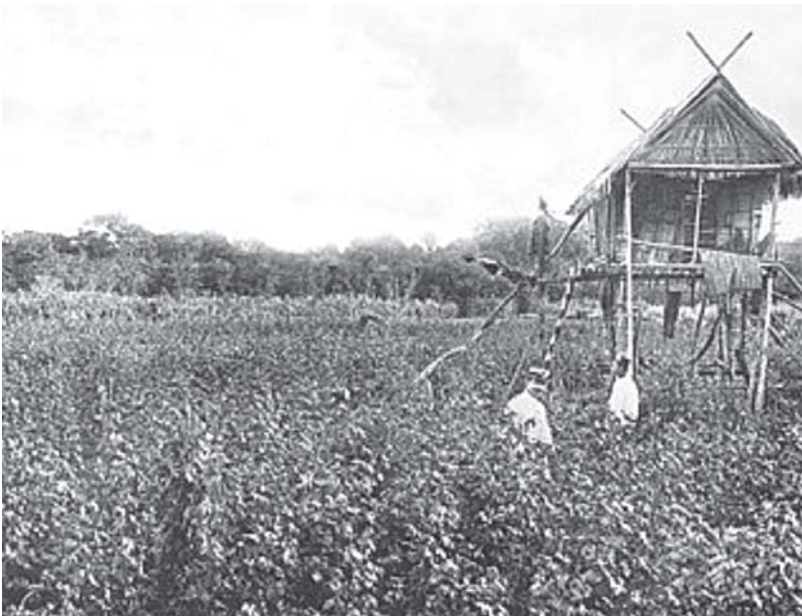
¹⁶ Sehubungan dengan penanaman kapas di uluan Palembang ini, pertanyaan kapan persis budidaya kapas yang dikembangkan di Keresidenan Palembang ini tidak dapat diketahui dengan jelas. Ada kemungkinan bahwa *kapas ulu* adalah varitas lokal yang dikenal orang uluan Palembang sejak lama. Peningkatan *kapas ulu* sebagai bahan importir baru terjadi di pertengahan abad ke-19, sebelumnya kapas ini hanya untuk kebutuhan substansif, antara lain untuk bahan baku pembuatan songket yang banyak diproduksi di Palembang.

¹⁷ Siklus *kapas ulu*, biasanya setelah padi di panen, ladang dibakar untuk dibersihkan, baru kemudian benih kapas ini ditanam. Dalam kurun waktu setelah benih ditanam, biasanya di Uluan Palembang ini curah hujan berangsur mengalami penurunan, sehingga memudahkan kapas untuk masak dan dipanen. Lihat dalam Kuyper, H.P. 1907. "Katoencultuur in Palembang", dalam *Jaarboek departement van landbouw over 1906*. Batavia. Hlm. 251-275.



Gambar 12. Sebuah mobil di atas angkutan penyeberangan Sungai Lematang dengan latar Bukit Serelo. Lambang *oejan mas* di pedalaman Palembang.

mengalami pembusukan sebelum berbuah. Akibatnya, tanaman *kapas ulu* hanya diproduksi pada Uluan Palembang dengan tanah yang agak melandai, turun dari dataran tinggi ke dataran menengahnya.



Gambar 13. Ladang *Kapas Ulu* di Uluan Keresidenan Palembang, 1910.

Pertama untuk daerah Uluan Palembang sebelah selatan yang meliputi wilayah Ogan Ulu di *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim, *Onderafdeeling* Lematang Ulu Lahat, dan Kikim produksi *kapas ulu* terpusat di tanah talang, karena minimnya tanah alluvial. Sementara, di Uluan Palembang sebelah utaranya hanya terbatas sepanjang Lematang Hilir saja. Di Lematang Hilir masyarakat menanam *kapas ulu* di bagian tanah alluvial yang memang cocok untuk kapas dengan produksi utama dari daerah ini. Munculnya produksi *kapas ulu* inilah yang kemudian menyemarakkan jalur perdagangan di sungai Lematang dari *ulu*, Uluan Palembang ke daerah *iliran*, Palembang pada tahap pertamanya.



Gambar 14. Para penebang pohon dalam hutan membuat parit untuk menarik kayu tebannya dari dalam hutan ke sungai, 1930.

Selain tanaman yang diusahakan tadi, yang tidak kalah penting untuk daerah Uluan Palembang ini adalah munculnya produksi kayu yang dihasilkan dari hasil hutan di daerah ini. Kayu-kayu berharga di uluan seperti *rengas*, *bungur*, *bayur*, *medang*, *meranti payo*, *ngrawan*, *kulim*, dan *kranji* banyak dihasilkan dari daerah ini, yang kemudian setelah ada peningkatan permintaan

juga banyak yang ditebang dari *Onderafdeeling* Musi Hilir. Produksi kayu hasil hutan ini, turut ditingkatkan karena banyaknya permintahan akan kayu *glondongan* akibat marak pembukaan *panglon* di Kota Palembang yang menggunakan mesin uap. Di Kota Palembang, terdapat empat *panglon* besar yang memproduksi kayu menjadi papan ini, yakni milik Masagus Haji Abdulhamid pada daerah Kertapati, Usman Abdulhamid di 4 Ulu, Sayid Alwi Munawar di 12 Ulu dan Sayid Assegaf di Musi Ilir. Peningkatan kayu dalam bentuk papan ini ikut dipicu dengan adanya ekspor ke Singapura.



Gambar 15. Pemandangan industri perkayuan di sepanjang Sungai Musi dengan latar sebuah kapal komersil milik KPM

Selain kayu, dari hasil hutan di daerah uluan ini, juga banyak didapat hasil lain berupa damar, getah perca dan rotan yang tidak kalah terkenalnya karena juga dieksport ke mancanegara dari pelabuhan Palembang. Menariknya, istilah *toke* berawal dari perdagangan jenis ini, petani penebang pohon yang berpergian untuk jangka waktu yang agak lama, pergi ke hutan menebang kayu yang tentunya berada jauh dari perkampungannya. Setelah

kayu ditebang kemudian dihanyutkan dibawah ke ilir sungai, di ilir sungai sudah siap pembeli, *toke tadi*, biasanya pemuka setempat atau pedagang luar yang kemudian mengadakan kontak dan menawar dengan saudagar besar dari Palembang.



Gambar 16. Kesibukan Penjualan Rotan dari Uluan di Dermaga Boom Baru Palembang, 1920

Sebenarnya, nantinya, selain tanaman yang lebih banyak bersifat pemenuhan kebutuhan substansif tersebut, tanaman komersialisasi utama kemudian muncul dalam bentuk tanaman kopi. Jenis tanaman kopi pertama yang dikenalkan di daerah Uluan Palembang ini adalah kopi Arabica. Kopi ini ditanam di daerah Uluan Palembang sebelah utara yang lebih banyak berbentuk pegunungan, yang tidak cocok ditanam *kapas ulu* tadi. Penanaman kopi Arabica ini, sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang, terutama di daerah Ulu Musi dan Ampat Lawang di *Onderafdeeling* Lematang Hulu Lahat dan *Onderafdeeling* Pagaralam. Namun, produksinya hanya terbatas pada pasar intern, karena kesulitan transportasi di daerah ini untuk dibawah keluar.

Pada awalnya, komoditas kopi Arabica ini lebih dulu dikenal lewat pasar Padang yang dibawah dari Pelabuhan Bengkulu,

karena perhubungan terbuka waktu itu lebih mudah lewat dataran tinggi yang menurun ke Keresidenan Bengkulu. Baru setelah jalur Bukit Barisan menuju ke Keresidenan Palembang lewat Hulu Musi terbuka, kopi Arabica mulai mendapat tempatnya karena meningkatnya persaingan. Menariknya, harga kopi ini, kemudian memicuh penanaman kopi Arabica di dataran tinggi Bukit Barisan, daerah Uluan Palembang lain yakni Basemah Lebar di *Onderafdeeling* Lematang Hulu Lahat dan di Semendo pada *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim. Akibatnya, Lahat dan Muara Enim muncul sebagai pusat perdagangan kopi di uluan.



Gambar 17. Petani kopi tradisional menjemur kopinya di alam terbuka, uluan Pasemah, 1920

Namun, kopi Arabica ini memiliki kendala yang sangat sulit untuk diatasi, karena rentannya jenis kopi ini terhadap penyakit tumbuhan. Oleh karena itu, pada awal tahun abad ke-20, produksi kopi Arabica ini mengalami penurunan drastis. Perlahan namun pasti, kemudian jenis kopi ini diganti oleh kopi jenis Robusta yang juga dapat ditanam di daerah dataran tinggi di bawah

ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Pada awalnya kopi Robusta mencoba menggantikan posisi kopi jenis Arabica dan ditanam di daerah Basemah di *Onderafdeeling* Pagaram, Semendo di *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim, dan Ampat Lawang di *Onderafdeeling* Lematang Hulu Lahat.



Gambar 18. Keadaan jalan di Muara Enim tahun 1921. Gambaran mulai munculnya kemakmuran uluan.

Kesuksesan penanaman kopi di Uluan Palembang, ternyata banyak menarik minat para enterpreneur, pengusaha Barat, yang pada akhir abad ke-19 datang sendiri ke daerah pegunungan dan membuka kebun kopi sendiri, terutama di tanah “tidak bertuan”, daerah Dempo dan Lembah Sindang. Pengusaha Barat ini kemudian memproduksi kopi Robusta secara besar-besaran, dan menggeser kopi rakyat yang banyak hanya menanam kopi Arabica. Pengusaha Belanda ini, tidak saja membuka kopi di Dataran Tinggi Bukit Barisan, namun juga melebarkan sayapnya sampai ke kaki Gunung Seminung di lembah Danau Ranau di *Onderafdeeling* Muara Dua. Di selah-selah himpitan perkebunan besar kopi Robusta milik pengusaha Barat ini, para petani lokal banyak juga yang mengusahakan perkebunan kecil kopi Robusta,

mulai dari daerah Bukit Barisan sampai ke Gunung Semuning, di *Onderafdeeling* Muara Dua.

Kembali ke permasalahan, yang ingin dilihat dalam tulisan pada bagian ini adalah batasan geografis mengenai apa yang disebut dengan daerah Uluan Palembang. Dari segi geografis, maka daerah-daerah yang termasuk pada area Uluan Palembang ini, umumnya mencakup wilayah geografis dataran tinggi. Berdasarkan ulasan pada bagian ini *Onderafdeeling* Pagaralam, *Onderafdeeling* Lematang Ulu Lahat, *Onderafdeeling* Tebing Tinggi termasuk dalam wilayah Uluan Palembang sebelah utara. Sementara, Uluan Palembang sebelah selatan mencakup wilayah *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim dan *Onderafdeeling* Muara Dua.

BAGIAN TIGA

ULUAN DAN ILIRAN SECARA KULTURAL

A. Kota Palembang: Melayu Palembang, Basis Utama Iliran

Berbeda dengan masyarakat *uluan*, penduduk Kota Palembang dengan jelas lebih mengidentifikasi diri sebagai etnis Melayu yang menggunakan Bahasa Melayu sesuai dengan dialek setempat yang dikenal dengan istilah *Baso Palembang*, Bahasa Palembang. Suku Melayu, dalam hal ini secara spasial, boleh dikatakan hampir mencakup seluruh kawasan Asia Tenggara, namun konsentrasi terbesar dan dianggap sebagai keturunan Melayu Asli mencakup kawasan Semenanjung Melayu dan Pulau Sumatera. Suku Melayu di Pulau Sumatera, lebih banyak dilekatkan pada kawasan yang lebih dikenal sebagai Sumatera Timur pada masa lalu. Lokalitas daerah ini mencakup kediaman orang Melayu Langkat dan Melayu Deli di Provinsi Sumatera Utara sekarang ini, Melayu Riau yang ada di Provinsi Riau dan Provinsi Riau Kepulauan sekarang ini, Melayu Jambi yang ada di Provinsi Jambi sekarang ini, serta Melayu Palembang yang ada di Provinsi Palembang sekarang ini.

Menilik bahasa dan kebiasaan hidupnya, Suku Melayu Palembang memang termasuk ke dalam rumpun bangsa Melayu, di mana beda bahasanya dengan Bahasa Indonesia yang dianggap sebagai Bahasa Melayu sekarang ini, amat sedikit sekali perbe-

daannya. Kosa kata yang berakhiran vokal "a" dalam Bahasa Indonesia menjadi kosa kata vokal "o" dalam bahasa Melayu Palembang. Misalnya, dimana menjadi "dimano", kemana menjadi "kemano", siapa menjadi "siapo", kira menjadi "kiro", mata menjadi "mato", dan sebagainya.

Penghubungan Palembang dengan Melayu, tidak dapat diketahui secara pasti. Bukti tertua dari hal ini didapat sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang terdapat dalam Kedukan Bukit, Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Birahi, dan Palas Pasemah misalnya yang terdapat di Kota Palembang, walaupun ditulis dalam huruf Pallawa, namun jelas menggunakan Bahasa Melayu yang termasuk Melayu Tua. Dalam berita Cina, meskipun Melayu, dalam hal ini Kerajaan Melayu lebih banyak diidentikkan dengan Jambi, namun acapkali memiliki relevansi jelas dengan Palembang. Berita Cina tertua tahun 644 Masehi menyebutkan bahwa utusan *Mo-Lo-Yeu* mempersembahkan hasil buminya kepada Kaisar Cina. Melayu dalam berita ini diperkirakan Kerajaan Melayu yang ada di daerah Jambi sekarang ini.

Kemudian hubungan jelas antara Melayu dan Palembang, berdasar tulisan perjalanan I-Tsing yang bermaksud memperdalam agama Buddha di India, namun sebelum ke India singgah dulu ke Sriwijaya. Terjemahan catatannya itu ialah "apabila I-Tsing melawat Sumatera, dia menemui dua kerajaan yang besar, yaitu Melayu berpangkalan di Sungai Batang dan Sriwijaya berhampiran dengan Palembang".

Sumber lain dalam berita Cina terdapat dalam catatan buku *Ta Dang Si Yi Chiu Fia Kao Cheng Zhuan*, yang menyebutkan perkataan *Mo-Lou-Yu*. Buku *Hai Nan Chi Guai Nun Fa Zhuan* juga menyebutkan perkataan Melayu dengan tulisan *Mo Lou Yÿ* (u terdapat dua titik). Demikian juga buku *Hai Lu Chu* dan buku *Zheng He Hang Hai Tu* yang menyebutkan perkataan Wu Lai Yu didalamnya. Chen Chung Shin yang menulis buku *Tong Nan Ya Lien Guo Zhi* (Negeri-negeri di Asia Tenggara) menyatakan

bahawa orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu mendapat namanya daripada perkataan *Mo Lo Yu*, tetapi orang Cina pada masa itu ada yang menyebutnya sebagai *Ma Li Yi Er*, *Wu Lai Yu*, dan *Ma La Yu*.

Sumber tertulis setempat, buku *Sejarah Melayu* mengilustrasikan perkataan Melayu dengan dihubungkan nama sebatang sungai, yaitu sungai Melayu. Perhatikan petikan buku *Sejarah Melayu* sebagai berikut, “*Kata sahibul hikayat ada sebuah negeri di tanah Andalas, sekarang disebut Sumatera, Palembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak cucu Raja Suran, Muara Tatang nama sungainya. Adapun nama Perlembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya*”.

Sementara patung Padang Rocore bertarikh 1286 Masehi yang ditemukan di kawasan Sungai Batanghari, menyebutkan kata Melayu. Batu bersurat Kartanegara yang dijumpai di Sungai Langsat bertarikh 1208 Tahun Saka, ditemui perkataan *Malayapura* yang artinya Kerajaan Melayu. Di Jawa terdapat beberapa prasasti yang berhubungan dengan Melayu, misalnya prasasti Gandasuli di Jawa Tengah bertarikh 832 Masehi yang beberapa kosa katanya menggunakan Bahasa Melayu. Padahal batu bersurat Gandasuli ini ditulis dengan huruf Dewanagari, yaitu sejenis tulisan purba India Utara bagi penyebaran agama Buddha. Demikian juga batu yang ditemui di Kedu yang walaupun tarikhnya tidak diketahui dengan pasti namun bahasanya menyerupai Bahasa Melayu Kuno ataupun sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh Bahasa Melayu. Jadi dapat dikatakan walaupun persebaran perkataan Melayu luas dan terutama sering diindentikkan dengan Jambi, tetapi Melayu memiliki relevansi jelas dengan Palembang.

Melayu Palembang yang tinggal di Kota Palembang dengan Bahasa Melayu Palembang atau Bahasa Melayu dialek Palembang digunakan sebagai bahasa Palembang *sari-sari*, sehari-hari. Pada

masa Kesultanan Palembang, bahasa Melayu Palembang hanya dipergunakan sebagai bahasa pasaran, sementara bahasa *Palembang Alus*, halus, yang memiliki campuran dengan bahasa Jawa, hidup di lingkungan Kraton Palembang sebagai bahasa kelas tinggi. Bahasa *Palembang Alus*, merupakan kalaborasi dua budaya yakni Jawa dan Palembang, hal ini tidak mengherankan mengingat proses panjang pendirian dan perkembangan Kesultanan Palembang itu sendiri¹. Palembang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan Islam Jawa, Raden Fatah sebagai pendiri Kerajaan Demak, berasal dan dibesarkan dari Palembang. Jadi ketika terjadi huru-hara di Kerajaan Demak pasca transisi suksesi generasi ketiga keturunan Raden Fatah, pengikut yang kalah kemudian melarikan diri ke Palembang karena memang masih memiliki hubungan darah dengan Palembang dan mendirikan Kerajaan Palembang.² Namun karena bahasa *Palembang Alus*, dianggap sebagai bahasa kelas dalam mencari legitimasi para pelarian dari Jawa dan hanya dikembangkan di kalangan kraton, begitu kesultanan dapat dikalahkan Belanda berangsur-angsur

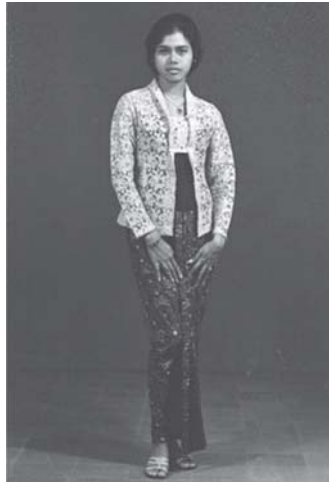
¹ Hubungan erat Palembang Jawa, baca dalam Johan Hanafiah. 1995. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada.

² Raden Fatah sebagai pendiri Demak datang dari Palembang. Keberadaan Raden Fatah di Palembang, tidak saja di kota tetapi juga sampai ke Uluan Palembang, sebuah tempat bernama Pagar Gunung memiliki relevansi ketika Raden Fatah menghilang dari Demak dalam beberapa tahun sebelum penyerangan ke Malaka. Selama masa itu, ada beberapa bukti logika keberadaan tokoh ini kembali ke Palembang yang dihubungkan dengan tokoh wanita Kaladiwe Pinatih, pada masa menghilang ini Raden Fatah bersama Kaladiwe Pinatih berada di Palembang, namun ia mengasingkan diri sampai ke pedalaman, daerah yang dianggap paling ulu sekali, Pagar Gunung. Di sana ia mencari ketenangan dan hidup berumah tangga dengan Kaladiwe Pinatih sampai beranak pinak sebelum kemudian membantu penyerangan ke Malaka. Sebagian besar prajurit yang menyerang ke Malaka berasal dari Palembang, makam Kaladiwe Pinatih bergaya dan bercorak Islam masih terdapat di Pagar Gunung dan nama desa Prabu Menang. Prabu adalah Raden, menang bahasa Arab dari Fatah. Wawancara, Saudi Berlian, Palembang, 20 Agustus 2010.

bahasa *Palembang Alus* kehilangan identitasnya. Kaum bangsawan Palembang yang tidak berada di kraton perlahan banyak yang menggunakan bahasa Melayu Palembang kembali, terlebih ketika generasi pertamanya ini meninggal, maka boleh dikatakan bahasa *Palembang Alus* tersebut tidak meninggalkan jejaknya lagi.

Secara etnisitas dan penuturan beberapa kosa kata, masyarakat Melayu Palembang yang umumnya berdiam di Kota Palembang, memiliki hubungan kekerabatan erat dengan suku-suku *uluhan* yang ada di pedalaman Palembang, seperti Suku Penesak, Suku Ogan, Suku Pegagan, Suku Enim, Suku Rambang, Suku Lematang, Suku Semendo, Suku Kisam, Suku Pasemah, Suku Gumay, Suku Kikim, Suku Lintang, Suku Banyuasin, Suku Musi, baik yang berada di Sekayu maupun Rawas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa walaupun hidup berkelompok sendiri-sendiri secara etnis tersebut, tetapi mereka memiliki budaya dan adat istiadat yang hampir sama dengan spesifikasi yang berbeda sesuai dengan dialek bahasa suku sehari-harinya. Namun di antara suku-suku tersebut, yang disebut sebagai pemilik asli Melayu, *indigenous peoples*, adalah orang atau suku Melayu Palembang yang berdiam di daerah *iliran*, Kota Palembang.

Secara historis, Melayu Palembang yang berdiam di Kota Palembang, memeluk agama Islam. Islam menjadi agama negara pada masa Kesultanan Palembang, sehingga masyarakat kesultanan, tidak saja di ibukota, tetapi juga di daerah *uluhan*, mayoritas beragama Islam. Sebagai bagian dari sejarah Kesultanan Palembang, orang Palembang asli telah memiliki kesadaran kelas, akibat pengaruh budaya Jawa yang disesuaikan budaya lokal Palembang. Kesadaran kelas tersebut dengan jelas dapat dilihat dalam identitas pemakaian gelar di kalangan lingkungan kraton. Berbeda dengan bahasa *Palembang Alus*, identitas pemakaian gelar masih tetap hidup dalam kalangan masyarakat Palembang. Identitas gelar tidak saja berlaku sebagai pembeda antara kelas bangsawan, priyayi, dengan kelas rakyat, namun juga di kalangan priyayi itu sendiri.



Gambar 19. Annie Djohar dari Plaju Palembang, gambaran kemolekan gadis iliran Palembang

Priyayi berarti keturunan raja-raja, sultan, atau kaum ningrat, kedudukan itu dapat diperoleh karena kelahiran atau atas perkenan dari raja atau sultan³. Golongan priyayi ini dibedakan lagi menjadi tiga golongan yaitu pangeran, raden dan masagus. Pangeran harus selalu diberikan oleh sultan, berarti yang memerintah, oleh karena itu tidak seorangpun yang mendapatkannya yang tidak memiliki jabatan. Anak laki-laki raja atau para pangeran itu sendiri biasanya dikaruniai gelar itu sendiri. Tetapi menurut van Sevenhoven, gelar pangeran ini tidak pernah diwariskan sebab raja dapat menahannya seperti dapat diberikannya kepada siapa saja yang diberikannya. Oleh karena bisa diberikan, maka di daerah *uluan*, pedalaman terdapat juga gelar pangeran yang diberikan kepada pembesar yang berjasa dengan sultan.

Sementara, gelar raden atau *radin* memiliki arti tinggi, luhur atau terpilih, anak laki-laki dari perkawinan antara seorang pangeran dengan anak perempuan seorang pangeran dilahirkan

³ Van Sevenhoven, J.C. 1971. *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Diterjemahkan Sugarda Purbakawatja. Jakarta: Bhratara. Hlm. 25-30.

sebagai raden dan tidak seorangpun dapat merebut gelar ini darinya. Masagus berarti berharga banyak, gelar ini dimiliki oleh anak laki-laki sah dari perkawinan seorang pangeran atau raden dengan perempuan dari golongan rakyat.

Selain itu, istri para priyayi ini memiliki gelar-gelar, jika istri sultan disebut ratu, istri dan anak-anak perempuan pangeran dan raden disebut raden ayu yang berarti cantik, terpilih dan agung. Sementara, istri dan anak-anak perempuan dari seorang masagus disebut mas ayu, si cantik yang banyak harganya. Golongan pangeran dan raden serta masagus, biasanya tidak memiliki harta benda yang dapat diwariskan, namun raja mengaruhi mereka beberapa dusun atau marga, tetapi sekehendaknya dicabut kembali kalau mereka tidak dianggap berjasa kepada sultan atau sultan merasa tidak menyenangkannya. Namun jika ada diantara mereka yang tidak memiliki dusun atau marga tadi, biasanya mereka hidup dari usaha kerajinan barang-barang emas dan perak, serta kerajinan tangan halus lainnya atau berdagang dan memiliki kebun.

Golongan rakyat juga memiliki gelar lain, yakni kiai mas atau kemas, kiai bagus atau kiagus dan orang-orang yang tidak memiliki gelar atau rakyat jelata. Kemas adalah anak laki-laki dari perkawinan seorang masayu dengan seorang laki-laki dari rakyat jelata. Sementara kiagus adalah anak laki-laki turunan raden terendah yang kawin dengan laki-laki rakyat jelata. Rakyat jelata dibagi-bagi lagi atas pertama, orang-orang *miji* yang tidak dipungut pajak mereka memiliki kewajiban kerja halus dengan para raja, pangeran atau raden atau bisa diminta tenaga kasarnya dalam keadaan peperangan. Orang *miji* mempunyai sejumlah *alingan*, keluarga yang ikut dengannya yang membantu dalam pekerjaan dibawah naungan seorang pangeran atau raden. Kedua, orang-orang *senan* yang kedudukannya lebih rendah dari seorang *miji*, namun mereka tidak dapat diperkerjakan oleh siapa pun kecuali untuk pekerjaan sultan. Perkerjaan yang

dibebankan untuk orang-orang *senan* ini seperti memperbaiki perahu dan rumah serta mendayung untuk sultan. Ketiga dan keempat adalah golongan yang menggadaikan diri serta para budak yang kerjanya tidak berhubungan langsung dengan sultan tetapi digunakan oleh orang yang meminjamkan uang atau membelinya. Orang-orang *miji* dan *senan* dapat disamakan dengan orang-orang pedusunan, *mata gawe*.⁴

Kalau kita bandingkan dengan kelas sosial yang secara tradisional dikenal di Surakarta yaitu: santana dalem, abdi dalem dan kawula dalem yang termasuk rakyat jelata.⁵ Susunan masyarakat seperti ini tidak dikenal atau tidak terdapat di daerah *iliran* dan *uluhan* Palembang, walaupun kepala-kepala marga itu sendiri ada atau tidak adanya hubungan dengan keluarga penguasa di dalam sistem kesultanan. Mereka merupakan golongan penguasa yang jumlahnya relatif kecil di antara rakyat jelata yang jumlahnya lebih besar. Dengan kata lain masyarakat pedusunan yang sebagian besar hidup bercocok tanam, bertani, susunannya sangat sederhana dan hanya terdiri dari golongan penguasa “formal-tradisional” dan rakyat jelata yang lazim disebut “*mata-gawe*”.

Dalam bidang pemerintahan pemakaian gelar diberikan pada santana mantri pada pegawai tinggi dengan sebutan pangeran, *perdano*, mantri pengulu dan sebagainya, kedudukan kedua para mantri yang terdiri dari tumenggung, angabei dan rangga, demang atau adipati yang merupakan penasihat sultan. Namun pemberian gelar yang dipakai para mantri ini tidak harus dihubungkan dengan jabatan-jabatan tertentu. Selain itu, sultan

⁴ Boedenani. TT. *Undang-undang Simbur Tjahaja jang Terpakai di Pedalaman Palembang*. Jakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, Kementerian P.P. dan K.; Lihat juga, “Kumpulan makalah yang membicarakan sistem “Marga”, dalam Panitia Penyelenggara Diskusi Adminstrasi Pemerintahan Marga di Universitas Sriwijaya, Oktober 1979.

⁵ Mosca, Gaetano. 1939. *The Rulling Class*. New York: Mc. Grawill, hlm. 50.

menciptakan dan memberi gelar kepada orang-orang dari keluarga atau anak masnya untuk menaikkan kedudukan dan gengsinya seperti prabu anom, penembahan, dipo ario, purbo, mangkubumi dan sebagainya. Selain itu untuk para keluarga raja yang menjadi pemimpin di sebuah distrik tertentu di luar wilayah ibukota diberi gelar *jenang* atau *raban*.

Kecuali penduduk asli Palembang, di Kota Palembang terdapat juga orang Cina dan Arab serta orang-orang asing lainnya. Orang Arab ditempatkan di daerah-daerah tertentu membentuk komunitasnya sesuai klannya⁶. Mayoritas orang Arab di Palembang adalah keturunan *Ba'Alawi* yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad dari cucunya Husien. Oleh karena mereka terdiri dari para Sayid, maka mereka memiliki martabat tersendiri di mata "warga kota asli", selama abad ke-19, setelah runtuhnya kesultanan, para sayid mengadopsi gaya hidup eksklusif yang membedakan mereka dengan lapisan sosial yang lain mulai dari bahasa, konsumsi dan reproduksi.

⁶ Terdapat dua kampung Arab di Kota Palembang, yaitu pada seberang ilir, tepi utara sungai Musi, mulai dari 8 sampai 15 Ilir dan pada daerah seberang ulu, tepi selatan sungai Musi, mulai dari 7 Ulu sampai 16 Ulu. Lingkungan fisik di kampung-kampung Arab tersebut dikuasai oleh saudagar Arab yang kaya yang membentuk semacam komplek keluarga yang berkelompok di sekitar kediaman, *pater familias*, "kepala keluarga besar". Dalam sistem seperti ini setiap kepala keluarga besar tersebut mengawasi wilayahnya sendiri, misalnya di Kampung 7 Ulu kepala keluarga besar ada Klan Barakah, Kampung 10 Ulu Klan Alkaf, Kampung 13 Ulu klan Almunawar, Kampung 14 Ulu klan Almesawa, Kampung 16 Ulu klan Assegaf, dan Kampung 15 Ulu klan Aljufri. Sementara di daerah seberang ilir, kepala keluarga besarnya di Kampung 8 Ilir adalah klan Alhabsyi dan klan Alkaf. Namun dari apa yang disebut "kampung Arab" tersebut, mayoritas penduduk yang terbesarnya tetap adalah "warga kota asli", selain "warga kota lain", orang-orang Arab ini. Lihat dalam J.L. van Sevenhoven, "Beschrijving van de hoofdplaats van Palembang". *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten* 9. 1923. diterjemahkan *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. (Jakarta: Bhartara, 1971), hlm. 57-58. Lihat juga L.W. C. van den Berg, *Le Hadramut et les Colonies Arabes dans l'Archipel Indien*. Sebuah terjemahan, (Batavia, 1885), hlm. 226.

Sikap eksklusivitas para sayid tercermin dengan baik dalam politik perkawinan mereka yang menganut prinsip *kafaah*, dalam sistem ini perkawinan kedua belah pihak harus memiliki derajat yang sama. Seorang sayid memilih untuk kawin dengan wanita sederajat, namun kalau tidak ada ia boleh memilih yang lebih rendah. Perkawinan ini sah mengingat sistem patrilinear yang berlaku, namun untuk para syarifah tidak demikian, karena mereka tidak boleh kawin dengan laki-laki keturunan yang rendah derajatnya. Wanita *Ba'alawi* ini harus kawin dengan yang sama derajatnya, para sayid atau syarif lainnya, karena kalau ini dilanggar, dianggap anaknya tidak memilih derajat yang sama lagi dengan mereka. Akibatnya, sering terjadi perkawinan antara sayid dengan anak priyayi Palembang, sebaliknya jarang terjadi perkawinan antara syarifah dengan laki-laki Palembang. Namun, bukan berarti ini terjadi pembauran, karena setelah keruntuhan kesultanan, pada awal abad ke-19, mulai jarang ditemukan perkawinan antara sayid atau keturunan campurannya tadi dengan anak bangsawan Palembang. Mereka lebih banyak memilih perkawinan dalam lingkungannya sendiri, kecuali untuk beberapa sayid yang kurang terkemuka masih menerima putri bangsawan atau saudagar Palembang, meskipun kadang untuk istri kedua atau ketiganya.

Orang Cina juga ditempatkan secara khusus pada komunitas tertentu, umumnya pada masa kesultanan mereka tinggal di rumah rakit. Pada masa kolonial, banyak dari orang Cina yang berpindah ke daratan. Orang-orang Cina di Palembang cukup dominan dalam usaha atau bekerja sendiri, mereka tidak dapat digolongkan begitu saja dalam kelas buruh atau kuli kasar, karena sebagian besar di antara mereka berdiam di Palembang sebagai pendatang-pendatang bebas yang mampu dengan cepat menguasai sektor-sektor ekonomi, terutama bidang perdagangan. Bahkan, ada di antaranya yang dapat muncul dan berkembang menjadi konglomerat yang mendominasi perdagangan Palembang.

B. Daerah Uluan: Tanah Berpuyang dan Beraneka Suku

Jika pada batasan geografis, yang dimaksud dengan konsepsi *uluhan* mengalami keambiguan makna, karena ekologis fisiknya yang bertolak belakang, dengan menempatkan Iliran Palembang dan Uluan Palembang secara berbeda. Tidak demikian dengan konsepsi berdasar batasan kulturalnya, batasan ini dengan jelas dan tegas menyamaratakan konsepsi *uluhan*, yakni semua daerah dan suku di luar suku Melayu Palembang yang ada di Kota Palembang yang dikenal sebagai, *wong iliran*, orang *iliran*. Artinya, semua *wong*, orang di luar orang Melayu Palembang yang berdiam di Kota Palembang adalah *wong uluan*, “*wong ulu*”, orang *uluhan*.

Pada dasarnya, masyarakat di luar kota Palembang, orang *iliran*, yang disebut orang *uluhan* ini juga dikenal dengan nama, “masyarakat pedalaman” Sumatera Selatan, atau Keresidenan Palembang di masa lalunya⁷. Namun dibanding istilah “pedalaman” ini, istilah *uluhan* jauh lebih populer, karena penyebutan ini sebenarnya sudah dikenal sejak masa Kesultanan Palembang, bahkan lebih jauh masa Kerajaan Sriwijaya. Penyebutan dan pengenalan pada istilah ini lebih banyak pada persoalan orientasi masyarakat Palembang pada sungai, kebudayaan sungai ini memiliki dualisme arah antara sungai bagian ilir dan sungai

⁷ Arlan Ismail. 2004. *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan*. Palembang: Unanti Press. Hlm. 1-2. lebih menyukai penyebutan *uluhan* dibanding istilah pedalaman. Baginya, istilah pedalaman di Sumatera Selatan, agak berbeda dengan di Jawa. Masyarakat yang berdiam di luar kota-kota di Jawa, bermukim menjorok ke dalam di luar jalan raya utama, oleh sebab itu mereka disebut orang pedalaman. Selain itu, istilah masyarakat pedalaman di Jawa sering dihadap-hadapkan dengan istilah masyarakat pesisir yang terletak di tepi pantai. Artinya, orientasi masyarakat Jawa adalah Laut, dengan arah utamanya adalah Laut Jawa yang terletak di utara, jadi daerah selatan adalah pedalamannya. Menurut Arlan, istilah “pedalaman” di Sumatera Selatan lebih identik dengan penamaan suku Anak Dalam, orang Kubu.

bagian ulu. Jadi, mereka yang berdiam di ilir sungai disebut *wong ilir*, orang *iliran*, sementara mereka yang tinggal di bagian sebelah ulu sungai disebut *wong ulu*, orang *uluan*. Artinya, mereka yang tinggal di ilir sungai Musi adalah orang *iliran*, sementara masyarakat yang bermukim di ulu sungai Musi dengan delapan anak sungai besarnya, dinamai orang *uluan*.



Gambar 20. Wanita uluan ikut membantu suami bekerja di sawah dan ladangnya, Muara Enim, 1935.

Kata *uluan*, juga dipakai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, ketika terjadi revisi tentang Undang-undang Simbur Cahaya dengan memakai subjudul dan embel-embel "*Oendang-Oendang Simboer Tjahaja: jang diturut didalam Hoeloean Negeri Palembang*". Orang *uluan* juga, memiliki kebanggaan dengan identitas mereka sebagai orang *uluan*, mereka merasa sebagai orang asli penduduk yang mendiami daerah Sumatera Selatan, seperti kutipan William Marsden⁸, "*I had with him, at my supposing him, as he is usually*

⁸ Marsden, William. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966. Hlm. 40.

considered, a Malay, and replied, with same emotion: *Malajoe tidak, Sir, orang oeloe betoel saio. No Malay, Sir, I am a genuine, aboriginal countryman*".



Gambar 21. Penganten *uluan* dengan latar belakang rumahnya beratap rumbia, di Komerling, 1930.

Orang *uluan* yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli wilayah Sumatera Selatan, menurut van Royen, berdasar sastra lisan yang berkembang, orang *uluan* berasal dan berawal dari tiga pusat pegunungan yang terdapat di Sumatera Selatan. Pertama, mereka yang mengidentifikasi diri bermula dari Gunung Seminung di bagian Selatan Bukit Barisan pada Keresidenan Palembang yang memiliki ketinggian 1954 meter dari permukaan laut di daerah Danau Ranau, *Onderafdeeling* Muara Dua⁹.

⁹ Sekarang Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan dengan ibukota Martapura.



Gambar 22. Gunung Seminung dengan perahu di Danau Ranaunya, 1920. Gunung ini dianggap tempat pertama Suku Komerling, Ranau, Daya dan Aji berasal.

Gunung ini adalah sumber utama dari air yang mengalir di sungai Komerling¹⁰, Sekala Berak, Sakala Bhra¹¹, yang merupakan nenek moyang orang Komerling berasal dari gunung ini yang kemudian turun dari ulu sampai ke aliran ilir sungai Komerling, maka semua anak cicitnya dinamakan suku Komerling, orang Komerling, sesuai dengan nama sungainya. Suku Komerling ini memiliki sub-sub suku lainnya seperti Daya, Ranau dan termasuk Lampung Peminggir.

Kedua, mereka yang berasal dari Gunung Dempo¹² di bagian

¹⁰ van der Tuuk menulis *Kembering*, nama sebuah sungai dan daerah pedalaman Palembang yang penduduknya dikatakan dapat menjelma menjadi harimau. Lihat dalam Faille, P. de Roo de la. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Diterjemahkan Soegarda Poerbakawatja. Jakarta: Bhratara.

¹¹ Disebut juga orang Faille, P. de Roo de la sebagai *batu-brak* atau *segalo-brak*, daerah sekelilingnya danau Ranau, mata air sungai Komerling. *Ibid*.

¹² Gunung Dempo atau Gunung Dempu, artinya Gunung yang di(e)mpu, gunung yang dipuja (pu), dipuji (pu), dikeramatkan, dianggap sakti dan bertuah. Ahmad Bastari Suan, dkk. 2007. *Atung Bungsu: Sejarah Asal Usul Jagat Basemah*. Pagaralam: Pemerintah Kota Pagar Alam & Pesake. Hlm. 11



Gambar 23. Gunung Dempo di *Onderafdeeling* Pagaralam, 1920. Tempat berasalnya suku Pasemah, Kikim, Gumay, Lintang, Enim, Semendo, Kisam atau orang-orang yang menggolongkan diri Jagad Basemah.

tengah Bukit Barisan pada Keresidenan Palembang, yang terletak *Onderafdeeling* Pagaralam¹³, dari gunung ini berasal mata air sungai Ogan di sebelah selatannya, sungai Lematang di sebelah utaranya, sungai Lematang memiliki anak-anak sungai lainnya, seperti sungai Kikim, Lintang, Mulak, Kunder, Dendan, dan Enim. dari Gunung Dempo ini turun orang-orang dan suku Pasemah, Lintang, Kikim, Semendo, Enim, Lingsing dan Ogan. Orang Pasemah melewati aliran sungai Lematang, sementara orang Ogan menelusuri sungai Ogan, di mana pertemuan sungai Ogan dan sungai Lematang mengalir sungai Enim yang menurunkan Suku Enim, campuran antara suku Lematang dan Ogan. Di antara pertemuan sungai Lematang dan Musi terdapat Suku Musi bagian tengah atau orang Belida.

¹³ Sekarang menjadi Kota Pagaralam yang beribukota Pagaralam.



Gambar 24. Sungai Ogan di Baturaja, 1935. Dari sinilah bermula suku Ogan menyebar dan menjadi sub-sub suku lainnya.

Ketiga, mereka yang berasal Gunung Kabah di bagian utara Bukit Barisan pada Keresidenan Palembang, yang terletak di antara *Onderafdeeling* Rejang Kahpayang¹⁴ dan *Onderafdeeling* Lubuk Linggau¹⁵, mereka menjadi suku Rejang yang menuruni dan menelusuri sungai Rawas yang menjadi Suku Rawas, sungai bagian Musi sebelah hulu yang menjadi Suku Musi Sekayu, sungai Lematang bagian Ilir melewati Sungai Keruh dan Penukal dan menjadi suku Penukal Abab.

Pada intinya, memang ketiga rumpun suku bangsa inilah yang menjadi sumber utama dari penyebaran etnis di *uluan* Keresidenan Palembang ini. Menariknya, ketiga rumpun suku bangsa ini menyebar dan berkembang sendiri-sendiri, melahirkan sub-sub suku lainnya, yang namanya disesuaikan dan dicocokkan dengan aliran sungai tempat mereka berdiam masing-masing.

¹⁴ Sekarang menjadi Kabupaten Curup dan Rejang, di Provinsi Bengkulu.

¹⁵ Sekarang menjadi Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau.

Perbedaan utama dari ketiga rumpun suku bangsa ini terletak pada bahasa dan adat istiadat yang mereka kembangkan, hanya setiap sub-sub suku ini walaupun sedikit berbeda umumnya memiliki kesamaan dengan induk suku bangsa mereka.

Setelah menyebar, biasanya mereka membagi diri dalam kelompok-kelompok kekerabatannya yang menyandarkan diri dengan *kepuyangan* yang sama. Artinya sub-sub suku ini, biasanya dipersatukan dengan *kepuyangan*, bahwa mereka masih satu genealogis dengan melihat *kepuyangan*, *puyang* yang sama, satu nenek moyang. Dengan satu genealogis, azas seketurunan, berdasar *kepuyangan* tadi, mereka menempati lokasi dan pemukiman tertentu dengan batas-batas tertentu pula.

Puyang berhubungan erat dengan pengkultusan akan sesuatu, baik orang maupun benda, dari masyarakat pendukungnya. Pengkultusan merupakan corak klasik dari munculnya kebudayaan umat manusia di muka bumi ini. Ia sudah terbentuk demikian rupa, sejak adanya tradisi kekuasaan pada awal pemerintahan dalam sejarah umat manusia. Salah satu sikap pengkultusan tertua dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang berbentuk despotik. Kalau dilihat hampir semua pusat kebudayaan tertua di dunia, yang terhampar dari lembah Sungai Nil, Eufkrat-Trigris, Hindius sampai lembah Sungai Kuning sistem ini selalu ada.

Despotik adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan, di mana seorang penguasanya menempatkan dan ditempatkan sebagai pemegang kendali kehidupan duniawi dan sorgawi. Oleh karena itu, penguasa ini memposisikan dan diposisikan dalam kerangka manusia setengah dewa, karena dianggap sebagai wakil Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri di muka bumi. Oleh sebab itu, secara ragawi dan rohania ia mengkultuskan dan dikultuskan oleh masyarakat pendukungnya, baik semasa hidup terlebih sesudah mati. Di lembah Sungai Nil, misalnya terdapat dalam sosok Fir'aun.

Untuk Keresidenan Palembang, paling tidak ada dua hal

yang dapat dikedepankan yang mempengaruhi munculnya sikap pengkultusan masyarakat di seperti ini. Pengaruh pertama, adalah adanya pola sistem kekerabatan yang terbentuk bagi pendukung kebudayaan ini. Pengaruh kedua, lebih disebabkan faktor eksternal terhadap perkembangan sistem kemasyarakatan itu sendiri dari pendukung kebudayaan ini.

Sistem kekerabatan, dilihat lebih menonjol dalam struktur kemasyarakatan Uluan Palembang, sementara pengaruh eksternal dapat dilihat dalam struktur kemasyarakatan Iliran Palembang. Kunci pengertian mengenai ikatan kekeluargaan di *uluhan* yang sangat mempengaruhi ekonomi, terlebih sistem produksi pertanian dan politik, pola kepemimpinan adalah apa yang disebut dengan struktur kemasyarakatan yang berpangkal pada *jurai*. *Jurai* ini memiliki pengertian keturunan, namun lebih jauh ia dipahami sebagai pada sosok prima dan utama dari sebuah sistem kekerabatan *uluhan* Keresidenan Palembang. Putra tertua dari sebuah keturunan diposisikan sebagai *jurai tuo*, namun tidak selalu putra tertua yang diangkat sebagai *jurai tuo*. Jika di antara pewaris ada yang memiliki kelebihan paling menonjol, para pendukung *jurai* dapat menyimpang dari prosedur, dan salah seorang di antara saudara laki-laki yang lain ditempatkan dan diangkat sebagai *jurai tuo*.

Yang lebih menariknya dalam sistem kekerabatan kental ini, kepala *jurai* secara ekonomis, merupakan pengelola dan penanggung jawab milik bersama keluarga, sedangkan anggotanya yang lain dapat menikmati hak pakai hasil. Pemilikan kolektif ini dipegang sangat teguh dan meliputi tanah ladang, sawah, kebun sayur dan buah-buahan, semua tanah ini merupakan milik kolektif dari sebuah sistem *jurai*. Secara politis, *jurai tuo* bertanggung jawab atas semua pusaka suci *jurai*, seperti keris, tombak dan lain sebagainya. Termasuk rumah moyang dianggap sebagai milik bersama dan tidak dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan semua anggota *jurai* yang lainnya.

Sebetulnya, yang ingin dikedepankan dari sistem *jurai* ini, adalah munculnya konsepsi kata *puyang* dalam struktur kekerabatan tersebut. Si *puyang*, diposisikan sebagai orang yang pertama dan paling penting dalam struktur ini. Seorang *puyang*, sesudah ia meninggal pun masih tetap memiliki pengaruh psikologis kuat atas sisa *jurai* yang ada, sebab si *puyang* tersebutlah yang selalu menjaga supaya *jurai* tetap bersatu dan sekaligus merupakan mata rantai masyarakat kolektif dengan para leluhur atau nenek moyang yang dianggap tetap berhubungan dengan yang hidup. Putranya yang nomor satu, sesudah *puyang* meninggal, dijadikan sebagai *jurai tuo* dan semua kerabat yang lain dari adiknya sampai anak cucunya dan anak cucu adik-adiknya menempatkan diri sebagai pengikutnya. Kalau ia meninggal, maka penggantinya datang dari golongan laki-laki adik-adiknya yang masih hidup. Setelah generasi mereka, yang berhak dan dapat diangkat sebagai *jurai* adalah anak laki-laki keturunan pertama digenerasi keduanya, dan semua yang ada dibawahnya menempatkan diri sebagai pengikutnya.

Struktur patrilineal, seperti ini dapat terjaga dengan baik di daerah *uluhan* karena dukungan faktor ekologis yang mempengaruhi struktur sosial kemasyarakatan mereka. Pertama, secara ekologis penduduk daerah ini tidak banyak dan mereka cenderung terpencar. Kedua, keadaan tersebut menciptakan pola pemukiman yang mengelompok antara satu *jurai* saja. Ketiga, dalam sistem seperti ini, tenaga kerja selalu dapat diorganisir dalam sistem kekerabatan yang ada. Akibat lebih jauhnya, adanya keharusan dan diharuskan para anggota *jurai* dapat berkerjasama dalam sebuah ikatan patrilineal.

Namun, menurut Peeters¹⁶, menempatkan alasan ekologis sebagai sebuah faktor pelestarian kelembagaan *jurai* akan terlihat

¹⁶ Peeters, Jaroen. 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS. Hlm. 48.

terlalu kaku. Terlalu lemahnya sistem perlindungan terhadap individu secara politik akibat letak uluan yang termasuk *periferi* dari pemerintahan pusat dapat dijadikan alasan lain terciptanya kekompakan kerjasama sebuah struktur dalam kelembagaan *jurai* seperti itu. Akibatnya, kekuasaan lebih diidentikkan dengan kekuatan fisik, dan cara aman untuk melindungi individu dari rasa takut dan rawan keamanan adalah dengan membentuk kesatuan dan persatuan antara saudara, *sejurai*. Terciptanya, struktur kekerabatan dalam sebuah jalinan *sejurai* inilah yang menjadi *setting* lahirnya konsepsi *puyang* di daerah *uluan* Keresidenan Palembang.

Setting konsepsi yang berbeda akan terlihat ketika berpaling ke daerah Iliran Palembang. Di sini, struktur kekerabatan lebih bersifat longgar, karena secara ekologis berbeda dengan Uluan Palembang. Secara ekonomis, sistem produksi pertanian tidak memaksa suatu bentuk pola kerjasama yang ketat antar seketurunan. Penggarapan padi basah di *iliran* yang dikerjakan hanya dalam dua bulan dengan mudah dapat dilakukan oleh keluarga inti saja. Jarak sawah tidak terpisah jauh dengan pemukiman dan bisanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari dusun marganya yang berjarak hanya beberapa kilometer saja. Secara politis, pola kekuasaannya sama dengan ekonomis, sebab tidak adanya bentuk harta, terutama pusaka yang dikuasai secara bersama.

Sejalan dengan proses Islamisasi, daerah Iliran Keresidenan Palembang mendapat sentuhan agama yang paling besar dibanding daerah uluan Keresidenan Palembang. Sebagai akibatnya, *iliran* banyak mendapat syiar agama, terutama dari ulama yang datang dari pusat, ibukota keresidenan. Menariknya, dalam menjalankan syiarnya, para "*utusan*" tersebut memiliki pesan budaya dalam menarik umat. Tokoh-tokoh tersebut misalnya menjelma dalam diri H. Samman di Penukal, Musi Ilir, Kiyai Jaman di Rantau Alai Ogan Ilir, atau misalnya Raden Syarif Abdullah

Assegaf di iliran Palembang. Pesan budaya tersebut, umumnya mereka ejawantahkan dalam ajaran-ajaran yang mereka berikan seperti, ilmu padi, intan buntat, atau sebagai Imam Mahdi.

Agama, dalam mendeskripsikan kegiatan penduduk yang kurang diketahui dunia, menempati posisi yang sangat penting. Agama, dilihat dari segi keuntungan-keuntungannya, adalah segala bentuk pemujaan, baik pribadi maupun umum. Maka dalam konsepnya, melakukan prosesi, pertemuan, persembahan korban dan lainnya sejatinya dapat diidentifikasi sebagai sebuah bentuk pemujaan terhadap agama.

Melacak agama asli dan kuno masyarakat di Keresidenan Palembang pada waktu awalnya, walaupun ada, sangat sulit untuk dilakukan. Kadang, mereka yang belum masuk Islam dan sudah masuk Islam pun masih dilanda keragu-raguan yang seolah membuat orang-orang tersebut diliputi perasaan belum tercerahkan.

Gambaran menarik seperti itu, dilukiskan dengan baik oleh Marsden¹⁷, yang mendeskripsikan percakapan seorang Melayu Islam dengan seorang Pasemah penganut Islam tradisional. "*Kau memberi sesembahan kepada makam nenek moyangmu, atas dasar apa kau menganggap bahwa mereka bisa membantumu?*", tanya si Melayu. Kemudian dijawab Si Pasemah dengan balik bertanya, "*Atas dasar apa pula kau yakin bahwa Allah dan Muhammad akan membantumu?*". Si Melayu dengan simbolis menjawab, "*Apa kau tak tahu, bahwa itu ditulis di Kitab Al-Qur'an? Apakah kau tidak pernah membacanya?*".

Maksud dari hal penjabaran ini, adalah dapat dilihat luas atau sempitnya pengetahuan seseorang tentang agama yang dipeluknya. Agama sering ditempatkan pada persoalan penyerahan total pada keesaan Tuhan-Nya. Namun penyerahan totalitas tersebut yang menyangkut persoalan pengetahuan ini, sering berbenturan dan dibenturkan, dihalangi dan dirintangi

¹⁷ Marsden, William. 1966. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Hlm. 263.

dengan apa yang disebut adat. Adat berkenaan dengan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Maka penyimpangan dari kebiasaan, berarti menentang dari adat yang sudah ada sejak turun temurun tadi. Oleh karena itu, ada kecenderungan mempolalisasikan Islam yang berdampingan dengan pengetahuan adat tadi, disebut Islam tradisional.

Selain menyembah kepada Tuhan dalam menjalankan syariat agamanya, maka orang-orang yang tergolong dalam kelompok tadi, mau tidak mau masih tunduk dan terbelenggu dalam aturan adatnya. Dalam kelompok ini selalu ada kecenderungan, bahwa selain takut dengan Tuhan-nya, tumbuh juga ketakutan dengan setan, jin atau idola lainnya. Dalam konsepsi pemikiran adatnya yang tumbuh di kepalanya, mereka tidak meragukan bahwa ada makhluk superior, selain Tuhan-Nya, yang bentuknya bisa kelihatan ataupun tidak yang membantu mereka dapat memperoleh kenikmatan.

Ide-ide seperti itu, bisanya didapat secara turun temurun atau dari percakapan orang lain. Mereka menyebut makhluk-makhluk ini dengan nama "*orang alus*" atau "*makhluk yang tidak kasat mata*". Menurut gambaran mereka, makhluk tersebut dapat menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Maka mengundang amarah mereka, bisa dan dapat menjadi sebuah sebab kesialan saat ini atau di masa depan.

Menariknya, jika menyebut dan membicarakan makhluk-makhluk ini mereka menyebutnya dengan nama malaikat atau jin. Eksistensial dari makhluk-makhluk ini sering berhubungan dengan sesuatu tempat, wilayah atau daerah. Tempat di mana keberadaan makhluk-makhluk tersebut terdeteksi sering diiringi dengan menganggap kekeramatan tempat tersebut. Dengan demikian konsepsi mereka tentang makhluk halus ini adalah awal munculnya pemujaan pada hal yang berbau kekeramatan.

Selain itu, hal mistik lain yang sangat mempengaruhi orang-orang di Keresidenan Palembang, dan dapat dikategorikan men-

dekati sebagai agama sampai kepada tahap hampir pemujaan adalah makam-makam dan jejak-jejak dari nenek moyangnya. Mereka sangat menghargai ini bagaikan hidupnya. Salah satu alasan paling mendasar akan munculnya hal ini adalah kepercayaan akan “reinkarnasi” di kalangan orang-orang di Keresidenan Palembang. Orang-orang seperti ini mempunyai pemikiran tentang kelahiran kembali seseorang yang telah mati. Bahkan kadang reinkarnasi ini dianggap sebagai hal yang bersifat iman religius, sekaligus berkembang menjadi cerita-cerita populer yang beredar di antara mereka.

Mereka cenderung memiliki anggapan, bahwa seseorang yang telah mati dapat berubah menjadi makhluk lainnya, seperti macan, buaya atau hewan lainnya. Bahkan kedua binatang ini terbukti menjadi ketakutan orang-orang Keresidenan Palembang. Ketakutan adalah akar dari takhayul. Gambaran tersebut terlihat dengan adanya ketakutan mereka untuk tidak menyebut binatang-binatang ini seperti nama biasanya, harimau, macan atau buaya. Mereka lebih menyebutnya dengan nama-nama halus dan terhormat, seperti *nenek* (leluhur). Mereka percaya tentang adanya daerah-daerah pedalaman tempat harimau atau buaya memiliki kerajaan sendiri.

Konsepsi lain tentang pemikiran kepercayaan mereka, dapat dilihat dari keyakinan tentang adanya orang-orang yang dapat berkemampuan khusus, mereka menyebutnya dengan sebutan “*bertuah*”. Mereka menganggap bahwa sifat-sifat seperti ini juga terdapat pada benda-benda, seperti keris, pisau, tombak atau senjata lainnya, perahu, dan sebagainya. Mereka percaya, kalau orang *bertuah* tidak akan mempan bila ditusuk senjata. Walaupun pemikiran seperti ini sangat sulit untuk untuk dibuktikan secara ilmiah dan rasional. Akan tetapi asumsi ini telah menjadi bagian dari manusia-manusia itu. Asumsi ini membuktikan betapa praduga dapat menghilangkan cahaya pengertian. Kepercayaan ini, menunjukkan kedangkalan pemikiran mereka. Sifat mereka

lemah dan mudah percaya, sehingga orang Keresidenan Palembang seperti ini sulit berpikir jernih dalam mengkaji sesuatu hal. Usaha untuk menghilangkan kepercayaan pada takhayul sangat sulit sebab kepercayaan ini lebih berakar dalam jiwanya, walaupun Islam sudah menduduki tempat di hati mereka. Artinya, pengetahuan seperti ini kadang mengalahkan pengetahuan ke-Islamannya.

Berdasarkan penjelasan konsepsi tersebut, maka untuk masuk kepada pemahaman tentang adanya kebudayaan pemujaan terhadap *puyang* ini, perlu ditarik garis lurus pengertian pada konsep *puyang* tersebut yang mengacu pada kata keramat dan sakti, yang mengarah pada adanya kekuatan gaib yang dimiliki oleh orang atau benda tersebut. Berbagai hal dapat dikatakan keramat, tetapi yang terpenting dalam kesadaran masyarakat tersebut ialah pemujaan terhadap makam *puyang* sebagai keramat.

Penempatan konstruksi ideologis pada *puyang* lebih mengarah pengidentifikasian mereka tenaga gaib dengan tenaga fisik istimewa. Seseorang yang memiliki kekuatan istimewa, ia dapat mengatasi segala hal tentang keresahaan yang dihadapi masyarakatnya. Maka ketika ia dapat mengatasi penyakit, kelaparan atau kekerasan dengan cepat orang tersebut dianggap sakti. Penduduk Keresidenan Palembang terbiasa mengkonstruksikan tenaga gaib dengan “kesaktian dari seorang”, “pria yang dianggap kuat”. Oleh karena itu, seorang dukun yang mampu menyembuhkan penyakit diposisikan dan dikukuhkan sebagai pemilik bakat istimewa dalam hal tenaga gaib.

Yang menarik konstruksi ideologis mereka tentang kekuatan gaib, seorang dukun sering dianggap sebagai pewaris “kekuatan gaib” *puyang*. Cara dukun memperoleh kekuatan gaib biasanya digambarkan dengan lukisan yang sama. Di mulai dengan masa pertapaan dukun tersebut ditempat keramat *puyang* terpencil. Ia melakukan hal tersebut dalam waktu lama, antara dua minggu sampai satu bulan, tidak makan dan hanya meminum air. Selama



Gambar 25. Tetua Marga di pinggir sungai Komerling, 1920

bertapa, ia hanya berkemat-kamit dengan tujuan berkomunikasi dengan arwah leluhur, sang *puyang*. Jika ia dapat berhubungan dengan arwah leluhur ini, selanjutnya sang *puyang* akan menjelma kembali dalam raga sang pemuja tersebut. Setelah ia secara spiritual lahir kembali sebagai *puyang*, kemudian ia kembali ke dusunnya untuk mengadakan pertemuan dengan kerabatnya. Diilhami dupa, dalam keadaan *transeden*, kesurupan, dalam kesempatan tersebut, sang *puyang* yang masuk ke dalam tubuhnya memperkenalkan jati dirinya kepada para pengikutnya. Demikian si dukun memperoleh kekuatan gaibnya.

Konstruksi ideologis tentang *puyang* seperti ini, bukan saja terdapat di *uluan*, namun juga di Iliiran Palembang. Tetapi di *iliran*, *puyang* diidentikkan bukan sebagai jelmaan leluhur asal. Namun lebih pada orang-orang sakti yang pernah ada di dusun-dusunnya, maka dalam gambaran masyarakat iliran Palembang yang lebih Islami, penganggapan terhadap orang keramat, cenderung pada tokoh kiyai atau ulama, penyebar syiar di kampung-

nya. Namun menariknya, konstruksi ideologi tersebut, berarti hanya menyangkut ruang lingkup wilayahnya semata. Artinya, kekeramatan dari orang sakti tersebut hanya pada lingkup marganya saja. Seperti makam *Puyang Sekampung* untuk marga Danau, Kecamatan Pedamaran sekarang ini, yang sebetulnya mengarah pada tokoh pertama penyebar Islam di Marga Danau ini saja.

Ini yang secara kultural merepresentasikan dari asal usul keberadaan sekelompok suku di sebuah lingkungan. Jadi, sering kali untuk membedakan sebuah kelompok kesukuan ditarik dari asumsi *kepuyangan* dimana mereka berasal. Demikian juga sebaliknya, kesamaan sebuah suku walaupun berasal dari daerah dan wilayah yang posisinya berjauhan serta berbeda, asal usul *kepuyangan* sering menjadi benang basah penghubungnya.

Berdasar uraian di atas, secara kultural, terdapat berbagai aneka suku yang mendiami daerah uluan sungai Musi, mereka yang disebut orang *uluan* ini. Varian aneka suku tersebut umumnya bersifat tersebar dan menyatu pada satu suku tertentu. Pada wilayah bagian timur sebelah selatan¹⁸, suku Pegagan, suku Pene-sak, dan suku Rambang Senuling atau suku Komering Kayuagung yang dianggap sebagai Komering Iliran yang berdiam di ilir sungai Komering.

Suku Pegagan sebenar identik dengan suku Ogan iliran yang berdiam di aliran sungai Ogan sebelah ilir.¹⁹ Umumnya secara administrasi mereka berdiam di daerah identitasnya pada Marga

¹⁸ Saya lebih menyukai penyebutan istilah ini secara kultural untuk wilayah batasan Iliran Palembang bagian selatan secara geografis.

¹⁹ Dalam catatan Saudi Berlian. 2003. *Mengenal Seni Budaya OKI, Ogan Komering Ilir*. Kayuagung: Pemkab Ogan Komering Ilir. hlm. 22. Kata Pegagan walaupun belum terlalu jelas dianggap turunan dari kata *gaga*, baca *gogo*, yang dikompilasikan dengan dunia pertanian. Kenyataan ini menurut Saudi Berlian sesuai dengan realitas historis masa lampau jika dihubungkan dengan keunggulan dunia pertaniannya dalam bentuk *beras pegagan* yang rasanya sangat nikmat jika dimasak menjadi nasi.

Pegagan Ilir Suku 1²⁰, Marga Pegagan Ilir Suku 2²¹, Marga Pegagan Ilir Suku 3,²² di *Onderafdeeling* Ogan Ilir²³, serta Marga Pegagan Ulu Suku 1²⁴ dan Marga Pegagan Ulu Suku 2²⁵ *Onderafdeeling* Komering Ilir. Sekarang suku ini tersebar di Tanjung Raja, Inderalaya, Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir serta di Kayu Agung, Tanjung Lubuk, Sirah Pulau Padang dan Mesuji di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diperkirakan jumlah pendukung suku ini berkisar sekitar 180.000 jiwa dengan mata pencaharian utama bertani di sawah dan ladang, disamping bertikar, menganyam tikar berunang atau tikar bengkuang dan lain-lain. Prinsip hubungan kekerabatan bersifat bilateral dengan menganut agama Islam.

Suku Penesak, disebut juga suku Sasak, dikatakan demikian kemungkinan berasal dari kata “terdesak”, mundur ke belakang. Kata terdesak ini sesuai dengan realitas historis bahwa suku ini dari tata bahasanya dianggap sebagai orang Melayu Palembang, bahkan dari beberapa sumber wawancara mereka ini dianggap sebagai orang-orang Palembang asli yang dulunya mendiami Kraton Palembang²⁶.

²⁰ Dulu berkedudukan di Tanjung Sejaro, sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir.

²¹ Sekarang Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir.

²² Berkedudukan di Sirah Pulau Kilip, sekarang masuk daerah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir

²³ Sekarang Kabupaten Ogan Ilir

²⁴ Dulu berkedudukan di Sugih Waras, sekarang masuk Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

²⁵ Dulu berkedudukan di Buluh Cawang, sekarang masuk wilayah Kota Kayuagung, Ogan Komering Ilir.

²⁶ Ada dua versi tentang migrasi suku ini ke daerah *uluhan*. Versi pertama, sumber lisan yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari masa akhir Sriwijaya dan masa awal berdirinya Kerajaan Palembang sebagai pendahulu Kesultanan Palembang awal. Mereka dianggap pewaris kebudayaan Hindu-Buddha di Zaman Sriwijaya yang merasa tidak mau mengakui kekuatan Islam yang baru muncul. Akibatnya, mereka kemudian bermigrasi ke pedalaman dengan naik perahu masuk

Suku ini mendiami marga Meranjat, Marga Burai, Marga Tanjung Batu serta²⁷, di *Onderafdeeling* Ogan Ilir²⁸ serta Marga Danau²⁹, di *Onderafdeeling* Ogan Komering Ilir. Bahasa utama yang menjadi dialek sehari-hari suku ini adalah Bahasa Melayu dengan lebih pada bercirikan kata “o”. Misalnya mau ke mana, menjadi “nak ke mano”, di sana menjadi “di sano”, mengapa dilogatkan menjadi “ngapo”, dan sebagainya. Namun di antara suku Penesak yang ada di lingkungan Meranjat dan Kecamatan Tanjung Batu sekitarnya dengan suku Penesak yang ada di Kecamatan Pedamaran, walaupun bahasanya sama, tetapi dialek logatnya berbeda. Kalau di Meranjat sekitarnya yang merupakan asal orang

ke sungai Ogan dan menyebar di tanjung lebak Penesak yang bertanah talang. Mereka dikenal juga sebagai suku seniman dengan seni mendirikan rumah, membuat perhiasan dari emas, perabotan rumah tangga dari almunium dan kerajinan pandai besi khas Palembang. Versi kedua, menyebutkan bahwa suku ini eksodus ke daerah pedalaman pada masa yang lebih muda. Ketika pecah Perang Banten dan Palembang, yang diikuti oleh kekalahan Banten tahun 1596, sehingga mereka masuk ke daerah pedalaman di uluan. Dari dua versi ini, tampaknya versi pertama lebih mendekati, jika dihubungkan dengan bahasanya yang lebih condong ke Melayu Palembang, dari pada Palembang-Jawa atau Bahasa Banten pada masa Kesultanan Palembang.

²⁷ Ketiga Marga ini Meranjat, Burai dan Tanjung Batu, sekarang menjadi Kecamatan Tanjung Batu, sementara Payaraman menjadi Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.

²⁸ Pada umumnya Suku Penesak yang berdiam di wilayah ini lebih dikenal sebagai Suku Meranjat. Suku Meranjat pada masa sekarang diperkirakan berjumlah 4.000 jiwa dan bermukim di Kecamatan Meranjat, Tanjung Batu dan Payaraman. Bahasa termasuk kelompok Melayu dengan dialek sendiri. Sebagian besar bermata pencarian bertani, menangkap ikan, tukang kayu, pengrajin, pedagang kecil dan sebagainya. Pola hubungan kemasyarakatan bersifat bilateral. Menganut agama Islam.

²⁹ Sekarang meliputi Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Suku Penesak di daerah ini umumnya disebut suku Pedamaran yang sekarang diperkirakan berjumlah pada kisaran antara 5.000-10.000 jiwa. Mereka bermukim di Dusun Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mata pencarian bersawah dan berladang dengan prinsip hubungan kekerabatan bilateral dan penganut agama Islam.

Pedamaran dialeknya lebih lamban dan sedikit melankolis, sementara Penesak Pedamaran bahasanya lebih cepat dan tegas.³⁰

Suku Rambang-Senuling dianggap sebagai sub suku Ogan yang berdiam di aliran sungai Ogan bagian tengah. Suku ini

³⁰ Perbedaan dialek tersebut lebih disebabkan Puyang asal dusun masing-masing. Menurut cerita tutur versi masyarakat Pedamaran, puyang Meranjat, Sang Sungging adalah kakak dari Sang Seberenak, puyang Penesak Pedamaran. Keduanya, hidup di daerah Meranjat, Sang Sungging pembawaannya kalem, lemah lembut, senang tinggal di rumah, dan mengerjakan pekerjaan yang halus. Sementara adiknya, Sang Sebernak perangainya tegas dan keras, senang mengembara masuk hutan keluar hutan, lebih menyenangi pekerjaan kasar. Syahdan Sang Sebernak mendengar kecantikan seorang putri di seberang, Senuro nama dusunnya, dengan naik perahu pada malam-malam hari didatanginyalah sang putri dengan cara *nyubuk*, ngapel dari bawah rumah sementara sang gadis membuka sedikit pintu jendela untuk mengobrol. Kecantikan sang putri, yang bernama Putri Pinang Masak ini tersebar di seantero kampungnya dan kampung-kampung sekitarnya, termasuk ditelinga orang tua Sang Sungging dan Seberenak. Karena mendengar kecantikan sang dara, maka orang tua Sang Sungging berniat melamar sang putri untuk anaknya yang mulai beranjak menjadi bujang *tuo*, laki-laki berumur. Ketika dilamar, Putri Pinang Masak setuju, namun betapa kecewanya ia setelah tahu bahwa yang melamarnya bukan Sang Seberenak yang sering berkunjung dengannya di malam hari, melainkan kakaknya Sang Sungging. Sang Seberanak pun tidak kalah kecewanya melihat kenyataan tersebut, demi kebahagiaan kakaknya kemudian ia pergi merantau dengan perahunya meninggalkan dusun Meranjat. Dari Danau Lebak Penesak, masuk ke sungai Ogan menuju ke ulu, tanpa mengenal lelah ia terus mengayu perahunya sampai ke sungai Babatan. Pada daerah ulu sungai Babatan yang terdapat tanah tinggi berbentuk delta dengan hutan lebatnya, Sang Seberenak menambatkan perahunya dan bersemedi. Setelah satu tahun lebih ia menenangkan diri di daratan berbentuk pulau ini, ia teringat dengan keluarga dan kampung halamannya lalu memutuskan untuk pulang. Karena sudah cukup lama berada di sana, perahunya sudah banyak yang bocor di sana-sini, kemudian dilihatnya pada batang-batang kayu yang tumbuh di sana banyak yang mengeluarkan getah. Getah dibakar dan dijadikan *dempul*, penambal perahu bocornya tadi. Sebagian getah damar ini ia bawa pulang ke kampungnya dan mengiliri sungai pulang ke dusun Meranjat. Betapa terkejutnya Sang Seberenak, kedua orang tuanya sudah meninggal memikirkan kepergian tanpa pesannya, sementara sang kakak dan istrinya hidup tidak bergairah dan bahagia. Melihat keadaan ini, akhirnya ia meneruskan perjalanan menuju Kota Palembang dan menjual getah damarnya

berdiam dan menyebar di Marga Muara Kuang³¹, Marga Lubuk Keliat³², Marga Rantau Alai, Marga Alay³³, Marga Rambang Suku IV, Marga Tembangan Kelekar, Marga Lubai Suku I³⁴, Marga Parit³⁵, Marga Lembak³⁶, Marga Gelumbang, Marga Kartamulia³⁷ di *Onderafdeeling* Ogan Ilir.

Marga Rambang Senuling ini juga menyebar di dusun-dusun *Onderafdeeling* Komering Ilir yang didaerah ini juga dikenal dengan sebutan orang *renah*. Penyebaran ini meliputi dusun Anyar, Serinanti, Sukadamai, Sukaraja³⁸, Embacang, dan Kayu

yang ternyata berharga mahal di sana. Getah tersebut sebagian ditukar dengan barang-barang emas batangan, benang, besi dan almunium, kemudian di bawahnya pulang ke dusun Meranjat. Kakaknya Sang Sungging diminta mengajak lelaki-lelaki di dusunnya untuk menempah batangan emas, membuat pandai besi dan membentuk almunium menjadi alat-alat memasak keperluan rumah tangga. Ia juga mencari batangan kayu yang dapat diolah kakaknya menjadi rumah dan peralatan lainnya. Sang Putri Pinang Masak dimintah untuk mengolah benang menjadi kain songket. Sejak saat itulah dusun Meranjat menjadi sibuk, terdapat tukang-tukang handal yang bisa mengelola berbagai bentuk emas, besi dan almunium serta para pengrajin songket. Perlahan, kehidupan keluarga kakaknya normal kembali, Sang Seberenak pamit untuk kembali ke tempat di mana ia menenangkan diri, namun kepergiannya kali ini diikuti juga oleh penduduk lain. Di delta berbentuk pulau ini, Sang Seberenak mendirikan dusun, yang disebut dusun Sekampung, cikal bakal Kecamatan Pedamaran sekarang ini.

³¹ Sekarang menjadi Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir.

³² Sekarang menjadi Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir.

³³ Kedua marga, Rantau Alai dan Alay, menjadi Kecamatan Rantau Alai, Ogan Ilir.

³⁴ Ketiga marga ini dahulunya masuk Kecamatan Muara Kuang, namun memekarkan diri menjadi Kecamatan Rambang, Kabupaten Ogan Ilir.

³⁵ Sekarang menjadi salah satu dusun di Kecamatan Inderlaya Utara, Ogan Ilir.

³⁶ Sekaang Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

³⁷ Kedua Marga, Gelumbang dan Kartamulia, sekarang menjadi satu Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

³⁸ Keempat dusun Anyar, Serinanti, Sukadamai dan Sukaraja masuk dalam Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Labu³⁹. Selain itu, Marga Rambang Senuling ini juga menyebar ke dusun, Sugih Waras, Serapek, Benawe, Kuripan di Marga Pegagan Ulu Suku I⁴⁰, kemudian dusun Sungai Menang dan Gajah Mati di Marga Tulung Selapan⁴¹, serta di dusun Serigeni, Muara Burnai, Lubuk Seberuk, di Marga Teloko⁴².

Sementara Suku Ogan⁴³ terdapat di sebagian Marga Sirah Pulau Padang, Marga Jejawi, Marga Tulung Selapan, Marga Pampangan, dan Marga Pemulutan di *Onderafdeeling* Komerling Ilir⁴⁴. Berbeda dengan suku Pegagan yang diuraikan di atas tadi,

³⁹ Kedua dusun, Embacang dan Kayu Labu, masuk dalam Kecamatan Pedamaran Timur yang memekarkan diri dari Kecamatan Pedamaran.

⁴⁰ Dusun-dusun dan marga ini sekarang masuk dan menjadi Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komerling Ilir.

⁴¹ Dusun dan marga ini sekarang menjadi Kecamatan Pampangan, Ogan Komerling Ilir.

⁴² Dusun dan marga ini sekarang menjadi Kecamatan Lempuing, Ogan Komerling Ilir.

⁴³ Pada wilayah Keresidenan Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini, persebaran suku Ogan cukup luas dikarenakan sungai Ogan sendiri memiliki berbagai anak cabang lainnya, serta kalau dilihat secara geografis memiliki posisi strategis dalam migrasi masyarakatnya sebab ada di posisi tengah di antara sembilan buah batang hari lain. Sehingga suku Ogan yang mendiami *Onderafdeeling* Komerling Ilir, Kabupaten Ogan Komerling Ilir (OKI) dan *Onderafdeeling* Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir (OI) sekarang ini disebut suku Ogan Iliran, yang berdiam di *Onderafdeeling* Ogan Ulu yang berkedudukan di Baturaja, Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU) Induk sekarang ini, *Onderafdeeling* Komerling Ulu, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (OKUS) sekarang ini dan *Onderafdeeling* Muara Dua, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan (OKUS) sekarang ini disebut suku Ogan Uluhan, serta di *Onderafdeeling* Lamatang Ilir, Kabupaten Lamatang Ilir Ogan Tengah (LIOT) atau Kabupaten Muara Enim sekarang ini disebut suku Ogan Tengahan. Selain itu Suku Musi Sekayu di *Onderafdeeling* Musi Hilir, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan Suku Rawas di *Onderafdeeling* Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas (Mura) juga memiliki orientasi pada suku Ogan ini. Lihat dalam Hambali Hasan, dkk. 1983. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

⁴⁴ Sekarang nama-nama marga ini menjadi kecamatan di Kabupaten Ogan Komerling Ilir, kecuali Pemulutan yang masuk ke Kabupaten Ogan Ilir.

suku Ogan ini berdiam di aliran sungai Ogan bagian ilir. Karena kedekatan geografisnya mendapat pengaruh besar dari kebudayaan Palembang. Identitas pengaruh ini tidak lepas dari masuknya daerah ini sebagai wilayah *kepungutan* masa Kesultanan Palembang. Di daerah *kepungutan* ini Kesultanan Palembang menempatkan seorang *jenang*, sebagai kepala wilayah yang mewakili dan mengatasnamakan Sultan Palembang, salah seorang *jenang* yang terkenal bernama Jenang Siliwangsa.

Suku lain yang ada di daerah Iliran Palembang ini, disebut suku Komering Kayuagung. Suku Komering Kayuagung dianggap sebagai Komering yang mendiami sungai Komering bagian ilir. Suku ini dianggap masih memiliki hubungan darah yang erat dengan suku Komering⁴⁵ yang ada di *Onderafdeeling* Komering Ulu⁴⁶ yang berkedudukan di Martapura, maupun yang ada disebagian *Onderafdeeling* Ogan Ulu yang berkedudukan di Baturaja⁴⁷ serta disebagian *Onderafdeeling* Muara Dua⁴⁸.

Suku Komering Kayuagung mendiami daerah Kayuagung, ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang ini. Pada masa lampau masyarakat Suku Komering Kayuagung berdiam di Mar-

⁴⁵ Menurut cerita tutur, asal usul suku Komering Kayuagung berpuyang pada Makodum Mutar Alam yang berasal dari suku Abung Bunga Mayang yang ada di Lampung Selatan bernama Sewo Mego dalam wilayah Wai Kunang. Suku Abung Bunga Mayang masih satu keturunan dengan suku Komering yang berpuyang pada Skala Berak yang turun dari Gunung Seminung di Danau Ranau. Makodum Mutar Alam meninggalkan daerah tersebut untuk mencari wilayah yang lebih subur dan makmur. Pada daerah Kayuagung, mereka mula-mula membuat perkampungan di daerah Kijang Batu Ampar dengan puyangnya bernama Raja Jungut, anak dari Makodum Mutar Alam. Lihat dalam Hambali Hasan, dkk. 1991/1992. *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan. Lihat juga Monografi. 1969. *Marga Kayuagung*. Palembang: Penerbit Cipta Karya.

⁴⁶ Sekarang menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

⁴⁷ Sekarang menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk.

⁴⁸ Sekarang menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

ga Kayuagung berpusat di Sukadana yang memiliki sembilan buah dusun sehingga disebut *Morge Siwe*, sembilan marga, yang masing-masing dusun dikepalai oleh seorang *depati*. Pemerintahan *marge siwe* berada di bawah pemerintahan Kesultanan Palembang yang diatur dengan Undang-undang Simbur Cahaya. Pemerintahan mereka yang otonom ini dikepalai oleh seorang Adipati yang diberi Sultan Palembang gelar pangeran, putera mahkota namun tidak memiliki hak menjadi raja. Selain itu, suku Komering Kayuagung juga berdiam pada dua marga lainnya, yakni Marga Teloko yang berpusat di Serigeni dan Marga Pegagan Ulu Suku I yang berkedudukan di Sugih Waras.

Pada daerah Iliran Palembang bagian utara, menyebar suku Musi Sekayu yang umumnya mendiami *Onderafdeeling* Musi Ilir⁴⁹ dan *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken⁵⁰. Pada umumnya mereka disebut suku Musi, namun seringkali juga disebut suku Musi Sekayu. Suku ini dianggap gabungan antara suku Ogan yang berasal dari aliran sungai Ogan dan suku Musi yang berasal dari Rawas yang turun dari gunung Kabah di daerah Rejang. Secara kultural hampir tidak ada perbedaan antara suku Ogan dan suku Musi Sekayu ini, mereka umumnya mendiami sepanjang aliran sungai Musi dan sungai Batanghari Leko anak sungai Musi serta hampir seluruh daerah *Onderafdeeling* Musi Ilir. Sebagian lain berdiam di Kecamatan Babat, Sungai Lilin, Talang Kelapa di *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken. Sebagian lagi berdiam di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan⁵¹ di Kabupaten Musi Rawas⁵². Dalam wilayah *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken berdiam juga orang Banyuasin yang sering membedakan diri dengan orang

⁴⁹ Sekarang menjadi Kabupaten Musi Banyuasin.

⁵⁰ Sekarang menjadi Kabupaten Banyuasin yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin.

⁵¹ Dulu Marga Sikap Dalam Musi.

⁵² Dulu *Onderafdeeling* Lubuk Linggau.

Musi Sekayu, suku ini terutama tinggal di Marga Babat Toman, Banyu Lincir, Sungai Lilin, dan Banyuasin Dua dan Tiga. Umumnya mereka tinggal di dataran rendah yang diselingi rawa-rawa dan berada di daerah aliran sungai. Sungai terbesar adalah sungai Musi yang memiliki banyak anak sungai. Mata pencaharian pokoknya adalah bertani di sawah dan ladang. Mereka masih percaya terhadap berbagai takhyul, tempat keramat dan benda-benda kekuatan gaib.



Gambar 26. Sungai Batang Rawas di Sarolangun, 1879.

Selain suku Musi Sekayu, di *Onderafdeeling* Lubuk Linggau juga berdiam suku Rawas berkonsentrasi di Marga Ulu Rawas, Muara Rupit, Rupit Ilir, Rupit Tengah dan Rupit Dalam. Bahasa Suku Rawas ini termasuk dalam kelompok bahasa Melayu yang terbagi dalam tiga dialek yakni Rupit, Rawas Ulu dan Rawas Ilir. Bentuk hubungan kekerabatan dalam masyarakat ini umumnya dapat dibagi tiga. Pertama melalui sistem perkawinan yang mereka sebut *ambek anak*, ambil anak, karena setelah kawin suami tinggal dalam keluarga pihak istri dan anak-anak yang lahir langsung mewarisi garis keturunan pihak istri. Dalam perkawinan seperti ini suami tidak usah membayar *uang jujur*, mas kawin. Kedua, perkawinan yang bersifat patrilinear, karena

istri dibawah masuk ke dalam lingkungan keluarga pihak suami dan anak-anak mewarisi garis keturunan suami. Dalam perkawinan ini suami harus membayar uang *jujur*, karena itu disebut juga perkawinan *jujur*. Ketiga, apa yang disebut perkawinan *rajo-rajo*, sifatnya bilateral dan tempat tinggal setelah kawin adalah neolokal. Sistem kepemimpinan dan pemerintahan tradisional suku ini dipengaruhi oleh adat Simbur Cahaya, yaitu kodifikasi peraturan adat yang berasal dari zaman Kesultanan Palembang.

Menariknya, selain itu di *uluhan* juga terdapat Suku Rejang⁵³, suku ini mendiami daerah Rejang, termasuk Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah sekarang ini. Selain di Propinsi Bengkulu tersebut sebagian dari mereka banyak yang menyebar ke *Onderafdeeling* Tebing Tinggi, *Onderafdeeling* Pagaralam dan *Onderafdeeling* Lubuk Linggau. Migrasi mereka tidak lepas dari penggunaan transportasi sungai, sehingga mereka dapat masuk ke Air Ketahun, Air Kelingi, Sungai Musi, Air Lakitan, dan Air Rupit. Melalui jalur sungai, suku Rejang memasuki wilayah Keresidenan Palembang, Sumatera Selatan sekarang ini. Pada *Onderafdeeling* Lubuk Linggau mereka mendiami Marga Muara Rupit, Marga Rupit Ilir yang berkedudukan di dusun Batu Gajah atau Maur, Marga Rupit Tengah yang berpusat di dusun Ambacang, Marga Rupit Dalam yang berkedudukan di di dusun Terusana atau Sukamenang, Marga Proatin V berkedudukan di dusun Muara Beliti atau Taba Pingin, Marga Tlang Pumpung Kepungut berpusat di dusun Muara Kati, Marga Sindang Kelingi Ilir ber-

⁵³ Asal usul suku Rejang hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas. Kisah-kisah mengenai suku Rejang sampai saat ini hanya didasarkan pada keterangan-keterangan ahli Tembo dan Adat Rejang. Menurut Tembo dan Adat Rejang, suku Rejang berasal dari Bedaracina yang datang ke daerah Bengkulu melalui Pagarruyung dan menetap di suatu lembah subur, yang kemudian mereka sebut Renah Sekalawi. Orang pertama yang memimpin suku bangsa Rejang adalah Sutan Sriduni.

kedudukan di dusun Nangka, Marga Batu Kuning Lakitan berpusat di dusun Selangit, Marga Suku Tengah Lakitan Ulu yang berkedudukan di Terawas.

Sementara di *Onderafdeeling* Tebing Tinggi, mereka mendiami Marga Sikap Dalam Musi Ulu berkedudukan di Karang Dapo, Marga Tedadjin berpusat di Lubuk Puding, Marga Kedjatan Mandi Musi Ulu berkedudukan di Karang Caya atau Tanjung Raya, Marga Lintang Kiri Suku Sadan di Tanjung Raman, Marga Semidang berpusat di Seleman, Marga Kedjatan Mandi Lintang berkedudukan di Gunung Meraksa, Marga Lintang Kanan Suku Muara Pinang, Marga Lintang Kanan Suku Muara Danau, dan Marga Lintang Kanan Suku Babatan. Berdasarkan masyarakat hukum adat Rejang yang ada di daerah *Onderafdeeling* Lubuk Linggau dan *Onderafdeeling* Tebing Tinggi tersebut karena sudah berbaur dengan suku lainnya hukum adatnya berdasarkan geneologis.

Suku lain yang dianggap sebagai suku migran adalah suku Lembak, yang sebetulnya berasal dari Bengkulu. Suku ini terdapat pada daerah *Onderafdeeling* Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas sekarang ini, di daerah ini suku ini memiliki *puyang* yang bernama Dayang Matorek, kuburannya ada di Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Dayang Matorek mempunyai tujuh orang anak yang berpencar ke beberapa tempat dan membentuk satuan kelompok hidup dalam bentuk marga di *Onderafdeeling* Lubuk Linggau, terutama di Marga Batu Kuning Langitan yang berpusat di Selangit.⁵⁴

Selain suku Rawas dan Suku Musi Sekayu, pada tiga daerah *Onderafdeeling* Musi Ilir, *Onderafdeeling* Banjoeasin en Koeboestrekken serta *Onderafdeeling* Lubuk Linggau, terdapat suku Kubu⁵⁵. Kebanyakan suku ini hidup *melangon* atau *melangun*,

⁵⁴ Lihat dalam Hambali Hasan, dkk. 1992/1993. *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Depdikbud.

⁵⁵ Dikenal juga dengan nama orang Lubu atau orang Ulu, atau sering juga disebut Suku Talang Mamak, sekarang lebih dikenal dengan nama Suku Anak

berpindah-pindah di sekitar daerah aliran sungai Musi, sungai Rawas, sungai Lalan dan sungai Banyulincir. Kesatuan hidup mereka dalam keluarga inti cukup penting, tetapi masyarakat pengembara ini lebih senang hidup mengelompok dalam lingkungan keluarga orang tuanya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang laki-laki senior yang dianggap bijaksana dan berpengalaman. Masyarakat ini umumnya masih menganut sistem perkawinan endogami kelompok tetapi disertai dengan larangan kawin saudara sekandung dan saudara sepupu pihak ibu.



Gambar 27. Suku Kubu di Air Itam, *Onderafdeeling* Lamatang Ilir, Keresidenan Palembang, 1920

Dalam. Suku ini dianggap sebagai suku terasing, dengan wilayah persebaran pemukiman meliputi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Penyebutan komunitasnya dengan istilah Suku Anak Dalam, atau orang Dalam, kalau disebut suku Kubu mereka sering marah karena merasa terhina, kubu menurut mereka artinya udik, bodoh, atau liar. Masyarakat suku Kubu relatif eksklusif, dalam arti mereka cenderung membatasi kontak sosial dengan masyarakat di luar mereka, biasanya mereka ini tinggal secara mengelompok di dalam hutan yang sulit dijangkau oleh orang luar.

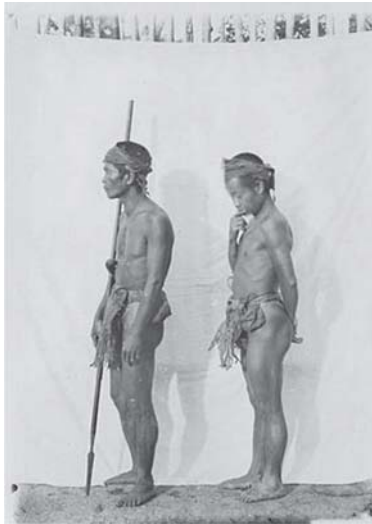
Suku Kubu yang selama menetap dan terpengaruh oleh kebudayaan orang Melayu biasanya mempunyai pemimpin setempat yang disebut *depati*. Selain itu mereka masih memandang tokoh *besale*, dukun, sebagai pemimpin spiritual yang disegani. Ada juga kelompok-kelompok yang ahli dalam masalah adat dan kemasyarakatan serta menguasai pengetahuan esoteris warisan nenek moyang mereka, tokoh ini disebut *malim*, tetapi perannya juga bisa dirangkap oleh *besale*.



Gambar 28. Rumah Suku Kubu di Rawas, *Onderafdeling* Lubuk Linggau, Keresidenan Palembang, 1910.

Rumah asli suku Kubu ukurannya kecil, cukup untuk duduk sekitar lima orang saja, beratapkan daun serdang, tidak berinding, beralaskan ranting dan dahan kayu. Biasanya mereka kalau tidur di “rumah asli” dalam posisi sambil duduk. Di depan rumah kepala suku masih terdapat rumah atau pondok seperti itu. Pada aspek mata pencaharian, suku Kubu bertani di ladang dengan cara menugal secara berpindah-pindah, tanaman yang ditanam adalah padi, cabai, dan karet. Padi biasanya satu tahun sekali panen dengan hasilnya untuk dimakan sendiri, agar awet maka padi disimpan di dalam “*blubur*” atau lumbung yang letaknya

berada di dalam rumah. Tanaman padi tidak dipupuk tetapi rumputnya disiangi. Selain bertani ladang, suku Kubu juga berburu binatang dan menangkap ikan di sungai. Di hutan tempat tinggal mereka masih bisa ditemukan binatang buruan seperti; kijang, rusa, *napo* atau kancil. Masih ada juga gajah dan ular tetapi binatang itu tidak mereka makan, karena tidak terbiasa sejak dari dulu. Pola perkawinan, biasanya diresmikan oleh para tetua masyarakat, tidak ada makanan khusus. Setelah menikah pasangan itu bisa tinggal di rumah orang tua si laki-laki, rumah orang tua si perempuan, atau membuat rumah sendiri.



Gambar 29. Peralatan berburu Suku Kubu di Keresidenan Palembang, 1910.

Dalam hal kematian, mayat suku Kubu yang meninggal tidak dikubur melainkan diletakkan di tempat yang jauh di dalam hutan dengan dibuatkan pondok, dan tidak boleh dikunjungi. Yang melakukan ritual tersebut adalah para orang tua laki-laki dan perempuan. Saat ritual berlangsung maka dibacakan mantra-mantra untuk memanggil arwah-arwah nenek moyang agar menjemput dan membawa arwah orang yang baru meninggal untuk dibawa menghadap Tuhan.

Menurut kepercayaan suku Kubu, arwah orang yang telah

mati bisa berubah menjadi harimau dan naik ke gunung-gunung untuk tinggal disitu.⁵⁶ Harimau dianggap binatang suci, bahkan dianggap dewa, suku Kubu tabu membunuh harimau karena mereka takut melanggar sumpah para moyang dan takut terkena kutukan para tetua. Ada semacam perjanjian dalam keyakinan suku Kubu bahwa antara orang Kubu dan harimau tidak akan saling mengganggu, apalagi arwah orang bisa berubah menjadi harimau yang artinya harimau juga nenek moyang suku Kubu. Ada perkecualian di mana jika ada harimau yang melanggar sumpah dengan mengganggu orang maka harimau itu bisa dibunuh. Ada juga keyakinan bahwa harimau yang suka mengganggu adalah harimau jadi-jadian yang berasal dari “*tabuhan*” atau sarang lebah, apabila *tabuhan* sudah besar dan bentuknya mirip harimau lalu jatuh ke tanah, maka *tabuhan* itu seketika akan berubah menjadi harimau. Harimau seperti inilah yang sering mengganggu manusia.

Pada perbatasan teritorial, antara Iliran Palembang dan Uluan Palembang, terdapat daerah pemisah secara administrasi yakni, *Afdeeling Ogan en Komering Oeloe*, di daerah pemisah ini berdiam salah satu suku besar yang disebut suku Komering. Suku Komering ini dianggap suku yang mendiami sungai Komering bagian ulu sampai ke bagian tengah dari aliran sungai Komering.

Ulusan utama tentang suku ini pada masa lalunya terdapat dalam Van Royen yang disebutnya sebagai suku “*jelma daya*”, di mana *daya* diidentikkan dengan aktif dan dinamis. Mungkin, secara antropologis, suku ini digolongkan sebagai orang Proto-Melayu⁵⁷, Melayu Tua, yang tetap mampu eksis secara kultural

⁵⁶ Lihat dalam Kementerian Penerangan. 1954. *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Kementerian Penerangan. Hlm. 781.

⁵⁷ Anggapan dasar yang menggolongkan suku Komering ke dalam kelompok Proto Melayu, tidak lepas dari asal usul suku bangsa ini. Menurut Slamet Mulyana. 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu.

mempertahankan jati diri dan identitasnya ditengah-tengah suku bangsa lain yang lebih condong ke Deutro Melayu, Melayu Muda, terutama dalam bahasa sebagai alat komunikasi utamanya.

Kata Komering sendiri, menurut Arlan Ismail⁵⁸, berasal dari bahasa Sansekerta, India yang artinya Pinang. Karena mereka ditenggarai menghasilkan pinang yang mampu dieksport sampai ke seberang lautan di India. Makelar utama perdagangan Pinang sampai ke luar negeri ini adalah seorang yang diberi gelar nama India, Komering Sing yang dalam bahasa setempat diartikan, "juragan pinang". Makam juragan ini, Komering Sing, ada di antara pertemuan sungai Selabung dan sungai Waisaka di ulu Muara Dua. Menurut cerita setempat, dari nama makam inilah sungai yang mengalir di daerah ini disebut sungai Komering. Kenyataan historis ini dapat dihubungkan dari catatan sejarah, bahwa perdagangan pinang masih terus dilakukan sampai dengan abad ke-XIX. Suku ini seperti diuraikan di depan tadi berasal dari Gunung Seminung, dan menyebar di aliran sungai Komering mulai dari tepian Danau Ranau menyebar sampai ke Gunung Batu pada Marga Semendawai Suku I di *Onderafdeeling* Komering Ulu, terus melewati Tanjung Baru, Tanjung Lubuk di Marga Bengkulah sampai ke Marga Kayu Agung di *Onderafdee-*

Hlm. 119. Suku bangsa Proto Melayu yang pertama bermigrasi ke Indonesia berasal dari daerah Assam, India Selatan yang mengungsi melewati Laut Andaman yang kemudian menelusuri pantai barat Sumatera dengan memencar berkelompok. Kelompok pertama menempati bagian utara pulau Sumatera berlabuh di daerah Singkel, Barus dan Sibolga yang merupakan cikal bakal suku Batak Karo, Batak Toba, Dairi dan Alas. Kelompok kedua terus ke selatan dan mendarat di Krui, antara Bengkulu dan Lampung. Mereka menyebar ke daerah pegunungan dan menetap di Gunung Seminung. Inilah dalam banyak kata antara bahasa Komering dan bahasa Batak memiliki keserupaan dan kesamaan, sehingga orang Komering dan Batak dianggap bersaudara. Lihat juga dalam Arlan Ismail. *Ibid*.

⁵⁸ Arlan Ismail. 2004. *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluhan Sumatera Selatan*. Palembang: Unanti Press.

ling Komering Ilir. Suku komering ini memiliki sub-sub suku yakni suku Ranau, suku Daya dan suku Peminggir yang ada di Lampung pesisir.

Cikal bakal suku Komering berpuyang pada tokoh yang dinamai Sakala Berak atau Skala Bhra. Sakala, artinya jelmaan atau titisan, sementara Berak artinya besar, lebar, suci dan mulia. Jadi Sakala Berak diartikan sebagai titisan atau jelmaan dewa. Kelompok Sakala Berak yang berada digunung lambat laun berkembang dan didorong keinginan untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik dan mempertahankan kelangsungan kelompok menyebabkan mereka mengadakan migrasi dari daerah asalnya di pegunungan. Mereka menyusuri sungai Komering menuju muara, dengan kelompok pertama yang menyusuri, dalam bahasa Komering disebut *Samanda*, berdiam di muara Minanga, kelompok ini menamakan diri *Samandaway*, *samanda-di-way*, menyusuri sungai.

Menurut sastra tutur, kelompok pertama ini kemudian mendirikan tujuh *kepuhyangan*, kepuyangan. Pertama, mereka yang dibawah pimpinan Puyang Ratu Sabibul yang menempati pangkalan teluk agak membukit yang disebut daerah Gunung Batu⁵⁹. Keturunannya mendiami Marga Semendaway Suku I yang berpusat di Gunung Batu, Marga Semendaway Suku II yang berpusat di Cempaka, dan Marga Semendaway Suku III yang berpusat di

⁵⁹ Walaupun belum dibuktikan analisis sejarah secara mendalam, menurut Arlan Ismail, Dusun Minanga Tuha, di daerah marga Semendawai Suku I, atau dusun keenam dari Dusun Gunung Jati diperkirakan merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya bagian awal. Sedangkan Palembang diyakini sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya bagian tengah, dan Jambi sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya bagian akhir. Kala itu, Minanga Tuha, sebagai kota pelabuhan, atau tempat berlangsungnya aktivitas bongkar dan muat barang serta bersandarnya kapal-kapal Sriwijaya maupun kapal-kapal asing yang memiliki baik hubungan dagang, politik, budaya, maupun religi dengan Sriwijaya. Lihat dalam Arlan Ismail. 2002. *Periodisasi Sejarah Sriwijaya: Bermula di Minanga Komering Ulu Sumatera Selatan, Berjaya di Palembang, Berakhir di Jambi*. Palembang: Penerbit Unanti Press.

Betung. Kelompok kedua dibawah pimpinan Puyang Kaipatih Kandil yang menempati daerah dataran rendah bernama *Maluway* atau *Manduway*, generasi ini menempati Marga Buay Pamaca. Kelompok ketiga dibawah pimpinan Puyang Minak Ratu Damang Bing yang menempati daerah Muara atau Minanga.

Kelompok keempat dibawah pimpinan Puyang Umpu Sipadang yang menempati daerah madang, padang yang luas. Generasi penerusnya diperkirakan mendiami Marga Madang Suku I berpusat di Kota Negara dan Madang Suku II berpusat di Rasuan. Kelompok kelima dibawah pimpinan Puyang Minak Adipati yang senang membawah peliung, sehingga daerah yang didiami olehnya dan generasinya diwilayah yang dinamai Marga Buay Pemuka Peliung yang berpusat di Pulaunegara dan Marga Buai Peliung Pangsaraja yang berpusat di Muncakkabau. Kelompok keenam dibawah pimpinan Puyang Jati Keramat yang beristrikan seorang wanita yang keluar dari bunga mayang, sehingga daerah yang didiaminya dinamai Marga Bunga Mayang yang berpusat di Negeriratu. Kelompok ketujuh yang dianggap paling muda dibawah pimpinan Puyang Sibalakuang daerah yang didiaminya berkembang menjadi beberapa marga, seperti Marga Kiti dan Marga Lengkayap di *Onderafdeeling* Lematang Ulu yang berpusat di Martapura serta Marga Buai Rawan, Buai Sandang, dan Buai Rujung di *Onderafdeeling* Muara Dua. Ketujuh kepuyangan ini pada awalnya berdiri sendiri-sendiri dibawah sesepuhnya yang disebut puyang dalam sebuah daerah berdasar kelompok-kelompok kesatuan masyarakat yang dinamakan "*buway*" atau "*kebuwayan*" yang dibawah oleh dinasti Paksi Pak.

Sejak abad pertengahan, suku Komerling, sama halnya dengan rumpun Melayu lainnya, menerima Islam sebagai sebuah agama dan kepercayaan. Kedatangan Islam itu melahirkan mitos, mitosnya mengenai seorang panglima dari bala tentara Fatahilah, Banten, bernama Tandipulau, yang menjadi tamu di daerah marga Semendawai Suku III. Ia datang menggunakan perahu mene-

lusuri Sungai Komering, Tandipulau berlabuh dan menetap di daerah marga Semendawai Suku III, tepatnya di Dusun Kuripan. Keturunan Tandipulau membuka permukiman baru di seberang sungai atau seberang dusun Kuripan, yang disebut Dusun Gunung Jati. Selanjutnya, marga Semendawai disebut keturunan Tandipulau dari Dusun Kuripan. Tandipulau dalam bahasa Komering berarti “tuan di pulau”. Makamnya, yang terletak di Dusun Kuripan, hingga kini masih terpelihara, masyarakat Komering, khususnya marga Semendawai, sering berziarah kubur ke makam tersebut.

Selain suku Komering, di daerah ini terdapat juga suku Ranau, suku Daya, Kisam, Semendo dan suku Ogan. Suku Kisam dan Semendo, jika dilihat dari bahasanya termasuk sub suku Pasemah. Suku Ranau⁶⁰ umumnya bermukim di dusun-dusun Marga Ranau yang berpusat di Jepara, *Onderafdeeling* Muara Dua. Sebagian lain Suku Ranau ini berdiam di Keresidenan Lampung, yakni di *Onderafdeeling* Kota Bumi, di Lampung Utara dan dikenal sebagai golongan masyarakat *Beradat Ranau*. Bahasa Ranau

⁶⁰ Suku Ranau umumnya adalah kelompok masyarakat yang tergabung mendiami lembah sekitar Danau Ranau, oleh karena Danau Ranau tersebut sangat luas, meliputi wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan (OKUS) sekarang ini di Propinsi Sumatera Selatan dan Wilayah Kabupaten Lampung Utara di Propinsi Lampung, sekarang ini, maka Suku Ranau juga meliputi wilayah di kedua propinsi tersebut. Marga Ranau, pada masa lampau tergabung dalam *Onderafdeeling* Muara Dua merupakan bagian dari Kepaksian Sekala Berak yang pembagian wilayahnya diatur oleh Umpu Bejalan Diway dari Paksi Buay Bejalan Diway Paksi Pak Sekala Brak pada Abad ke VII M. Suku Ranau sebenarnya berasal dari Lampung Barat yang pada abad ke XV pindah dari daerah asalnya, kemudian menetap di tepian danau di Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan sekarang ini. Namun suku asli yang sebelumnya tinggal di kawasan danau justru hijrah ke Lampung Tengah. Suku Ranau mampu mengusir suku yang semula didiami daerah ini yakni Suku Abung keluar dari wilayah pemukiman di sekitar Danau Ranau, dan mendesak mereka yang ke Lampung menjadi suku Abung sementara ke iliran sungai Komering mereka menjadi suku Komering.

dianggap sama dengan bahasa Lampung dan masih merupakan bahasa Melayu dialek Ranau. Masyarakat Suku Ranau terbagi dalam kelompok suku, dalam arti paroh masyarakat secara genealogis, ada yang disebut suku Balak dan suku Lunik. Kehidupan sosial tradisional Suku Ranau dikenal pemimpin adat yang disebut *raja adat*.

Pada waktu mereka mendiami pemukiman sekitar Danau Ranau ini mereka terbagi dalam tiga kelompok yakni yang menetap di sebelah timur dipimpin Raja Singa Juhku, kelompok sebelah utara dipimpin oleh Puyang Empu Sejadi Helau dan kelompok sebelah timur Danau Ranau dipimpin Pangeran Liang Batu serta Pahlawan Sawangan. Ketiga kelompok itu kemudian berbaur dan terpilah lagi dalam tiga kawasan, yaitu di Banding Agung, Pematang Ribu, dan Warku. Kehidupan semua kelompok diatur dengan sistem marga yang masing-masing dipimpin seorang *pasirah*. Mereka itulah yang menjadi cikal bakal dan akhirnya disebut suku Ranau sampai sekarang. Sistem pemerintahan marga mengatur hampir semua sisi kehidupan masyarakat. Suku Ranau otonom dan tidak tunduk kepada kerajaan mana pun, termasuk Kesultanan Palembang Darussalam yang berpusat di Palembang sepanjang abad XVI sampai XVIII, namun pada abad XVIII, Suku Ranau ditaklukkan Belanda. Pada tahun 1908, Belanda menyatukan tiga marga suku Ranau menjadi satu marga saja yang dipimpin satu orang *pasirah* yang berkedudukan di Banding Agung. Tugas *pasirah* adalah mengatur pemerintahan, adat, dan budaya anggota suku yang tersebar di 32 desa yang disebut *kerio*. Di bawah sistem marga, suku Ranau memiliki semacam anggaran belanja sendiri yang disebut *nilayan marga*, yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintahan marga.

Suku Daya⁶¹ menetap di pinggir aliran sungai Ogan dekat

⁶¹ Orang Daya adalah salah satu kelompok masyarakat asli di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi

dengan Simpang dan Pulauberingin, dan sekitar kota Martapura, sebagian juga menetap di Baturaja. Selain suku Daya terdapat juga suku Aji, masyarakat suku ini tidak mementingkan kesatuan geografis sebagai suatu kesatuan hidup setempat, melainkan sebagai masyarakat geneologis, misalnya, marga Aji atau Buay Aji. Itulah sebabnya nama-nama kampung suku Aji berdomisili banyak menggunakan kata Aji atau Haji, umpamanya Haji Mena, Haji Pemanggilan, Pekon Aji, dan sebagainya.

Selain di *Onderafdeeling* Ogan Ilir dan *Onderafdeeling* Komering Ilir, suku Ogan umumnya menyebar di *Onderafdeeling* Ogan Ulu. Mereka berdiam di Marga Buay Langit Lubuk Kulon yang berkedudukan di Baturaja, Marga Samikrian yang berkedudukan di Pengandonan, dan Peninjauan. Bahasa Ogan termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dua dialek khusus yakni Ogan Ilir dan Ogan Ulu. Suku Ogan di *Onderafdeeling* Ogan Ulu termasuk berbahasa Melayu dialek Ogan Ulu. Prinsip kekerabatan patrilineal, namun bisa juga matrilineal, tergantung kesepakatan dan persetujuan kedua pihak. Sistem dan struktur masyarakatnya dipengaruhi oleh aturan adat Simbur Cahaya.

Suku Kisam dianggap sebagai suku bangsa baru karena terjadi akibat perkawinan campuran antara orang Suku Pasemah dan Suku Semendo. Mereka umumnya berdiam di Marga Kisam Tengah Suku 1 berkedudukan di Muara Dua Kisam, Marga Kisam Tengah Suku 2 berpusat di Balayan, Kisam Ulu beribukota di Tenang dan Kisam Ilir yang berkedudukan di Pulau Kemiling pada *Onderafdeeling* Muara Dua. Bahasa sehari-hari masyarakat suku Kisam adalah bahasa Pasemah dialek Kisam.

Sumatera Selatan. Wilayah persebarannya meliputi Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Simpang, dan Muara Dua. Mereka menggunakan bahasa Daya, yang termasuk rumpun bahasa Melayu. Sebagian besar orang Daya adalah pemeluk agama Islam



Gambar 30. Wanita Uluan menggendong anak dengan bedak yang terbuat dari beras yang dihaluskan, Muara Enim, 1925.

Suku Semendo sering menyebut dirinya orang *Semende*, berasal dari kata *se* yang arti satu dan *mende* yang artinya induk atau ibu, kira-kira berarti “orang satu ibu” atau satu asal nenek moyang. Pada *Onderafdeeling* Muara Dua umumnya mereka mendiami Marga Mekakau Ilir dan Mekakau Ulu, sementara pada *Onderafdeeling* Ogan Ulu mayoritas menetap di Buay Langit Lematang Kulon. Pada daerah yang berhawa sejuk perbukitan ini mereka disebut Semendo Lembak atau Semendo Ulu.

Sementara di *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim⁶², ada lima suku besar yakni suku Semendo, suku Lematang, suku Enim, suku Abab Penukal, suku Belida. Suku Semendo sudah

⁶² Sekarang menjadi Kabupaten Muara Enim dan pecahannya kota Prabumulih.

dibicarakan ketika membahas *Onderafdeeling* Muara Dua, namun terdapat sedikit perbedaan antara kedua Semendo ini, di *Onderafdeeling* Muara Dua mereka disebut Semendo Ulu⁶³, sedangkan di *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim mereka disebut Semendo Darat⁶⁴. Masyarakat suku Semendo sering dikategorikan sebagai salah satu penganut prinsip kekerabatan matrilineal yang mereka wujudkan dalam sistem perkawinan *tunggu tubang*, di mana laki-laki harus membayar sejumlah *uang jujur* kepada pihak istrinya. Selanjutnya ia harus ikut berperan sebagai anggota kerabat istrinya. Namun, sebetulnya bentuk ini hanya berlaku untuk anak perempuan tertua dalam keluarga yang bersangkutan, karena setelah ayah ibunya tua, anak perempuan sulunglah yang harus memelihara mereka dan adik-adiknya. Harta pusaka diwariskan dan diturunkan kepada anak perempuan tertua, terutama berupa sebuah rumah besar dan beberapa bidang sawah. Harta pencarian lain diwariskan menurut ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat suku ini. Pada *Onderafdeeling* Lematang Ilir suku ini mendiami umumnya Marga Semendo Darat yang berpusat di Muara Tenang.

Suku Lematang dan suku Enim⁶⁵ masih digolongkan sebagai suku Ogan, namun disebut suku Ogan di talang. Suku Enim berdiam disepanjang Sungai Enim, sementara Suku Lematang mendiami aliran Sungai Lematang, mulai dari Kota Lahat di Kabupaten Lahat sampai ke Daerah Muara Enim.

⁶³ Pemerintah Kolonial menyebutnya sebagai Semendo Oeloe Loeas yang berbatasan dengan suku Kisam di *Onderafdeeling* Muara Dua, sekarang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

⁶⁴ Semendo Darat Inim dalam istilah Pemerintahan Kolonial Belanda yang ada di *Onderafdeeling* Lematang Ilir Muara Enim.

⁶⁵ Suku Enim mendiami lokasi sepanjang aliran sungai Enim sampai ke kota Tanjung Enim. Mata pencaharian mereka adalah petani. Bagi yang tinggal di tepi sungai menikmati kekayaan sungai Lematang. Orang Enim memakai dialek dari bahasa Melayu.



Gambar 31. Gadis-gadis uluan di Muara Enim dengan pakaian adatnya, 1925

Pada dasarnya, kelima suku tersebut mendiami tepian sungai Lematang. Sungai Lematang memiliki anak sungai yakni sungai Enim, sungai Penukal dan berakhir alirannya di sungai Belida yang merupakan perbatasan langsung dengan sungai Musi. Suku Belida dan daerahnya memiliki kesamaan dengan suku Ogan Pegagan di *Onderafdeeling* Ogan Ilir yang dimasukkan sebagai daerah *kepungutan* pada zaman Kesultanan Palembang.



Gambar 32. Sungai Lematang, 1935.

Menariknya, hampir semua suku di *Onderafdeeling* Lematang Hilir Muara Enim ini memiliki bahasa yang sama dengan tekanan pada huruf terakhir yang berbunyi “e”. Namun khusus untuk suku Belida terdapat perbedaan, karena suku ini memiliki akhiran “a” yang dipengaruhi oleh bahasa Palembang Melayu yang juga berakhiran “a” atau “o”.



Gambar 33. Arca-arca megalitik manusia Pasemah, 1920.

Pada daerah yang disebut *Afdeeling* Palembangische Bovenlanden, yang terdiri dari *Onderafdeeling* Lematang Hulu Lahat, *Onderafdeeling* Pagaralam, dan *Onderafdeeling* Tebing Tinggi berdiam tiga suku besar yakni suku Pasemah, suku Semidang dan suku Gumay. Secara historis berdasar cerita tutur, awalnya ketiga suku ini, suku Pasemah, suku Semidang dan suku Gumay adalah satu kelompok juga yang sama-sama berasal dari keturunan *puyang* dewa.

Suku Pasemah merupakan suatu suku yang mendiami daerah yang disebut sama dengan nama sukunya, Pasemah. Suku Pasemah juga dikenal merupakan gabungan dari sub suku-sub suku lainnya seperti Lematang, Kikim, Lintang, Ampat Lawang, Gumay dan Semendo. Daerah Pasemah sekarang ini secara geografis terletak di daerah Bukit Barisan dengan ketinggian

600 sampai 700 meter dari permukaan laut dengan puncaknya gunung Dempo yang bertinggi 3.159 meter dari permukaan laut.

Pada masa lalu daerah Pasemah meliputi daerah *Onderafdeeling* Lematang Hulu Lahat, *Onderafdeeling* Pagaralam, dan *Onderafdeeling* Tebing Tinggi. Secara historis, daerah Pasemah yang dimaksud pada intinya terdiri dari 4 wilayah bagian, yakni Pasemah Lebar, Pasemah Ulu Lintang, Pasemah Ulu Manna dan Pasemah Ulu Air Keruh. Daerah Pasemah Lebar⁶⁶ merupakan pusatnya Pasemah yang meliputi *Onderafdeeling* Lematang Hulu Lahat dan *Onderafdeeling* Pagaralam. Pasemah Ulu Air Keruh dan Pasemah Ulu Lintang⁶⁷ berada di *Onderafdeeling* Tebing Tinggi, sementara Pasemah Ulu Manna secara administrasi berada dalam Keresidenan Bengkulu⁶⁸. Selain keempat wilayah ini, pada masa lalunya tersebut, wilayah juga mencakup Mulak Ulu di *Onderafdeeling* Lematang Ulu, Semendo Darat di *Onderafdeeling* Lematang Ilir serta Semendo Ulu Luas, Semendo Darat, Kisam dan Mekakau di *Onderafdeeling* Muara dua.

Menariknya, secara lembaga di Pasemah, bukan dipegang oleh seorang pemimpin tunggal, secara administrasi Pasemah dibagi dalam 4 sumbai yang terdiri dari 146 dusun, yakni Sumbai Besar yang berkedudukan di Kota Agung yang memiliki 50 dusun, Sumbai Ulu Lurah yang memiliki 40 dusun, Sumbai Pangkal Lurah yang berkedudukan di Tanjung Raya yang memiliki 25 dusun dan Sumbai Mangku Anom yang berkedudukan di Pajar Bulan yang memiliki 19 dusun yang ditambah dua sumbai lain, yakni Sumbai Penjalang yang memiliki 6 dusun dan Sumbai

⁶⁶ Pasemah Lebar adalah daerah lama dekat gunung berapi yang sangat besar dengan tiga puncaknya yaitu Gunung Berapi, Gunung Lumet dan Gunung Dempa, yang terakhir ini yang paling tinggi. Faille, P. de Roo de la. *Ibid*.

⁶⁷ Sekarang menjadi Kabupaten Lintang Empat Lawang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat.

⁶⁸ Masuk dalam *Onderafdeeling* Manna, sekarang menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Semidang yang memiliki 6 dusun. Keempat sumbai ini mengepalai suku-suku yang ada di Pasemah, yang batasannya tidak terletak pada geografis, namun lebih pada kultural, sehingga setiap dusun terletak beracakan pada tiap-tiap sumbai. Maksudnya, kadang ditengah dusun Sumbai Pangkal Lurah terdapat dusun yang secara adminstrasi masuk di daerah Sumbai Ulu Lurah atau dusun Sumbai Mangku Anom ada di Sumbai Besar.

Sumbai-sumbai ini masing-masing memiliki kepalanya sendiri-sendiri *pasirah Lampit Ampat*. Di atas suku-suku initerdapat lembaga yang lebih tinggi kedudukannya yang disebut *Lampit Ampat Merdeka Dua*. Lembaga ini merupakan suatu rapat besar yang dihadiri selain para *pesirah Lampit Ampat*, juga duduk para kepala proatin perwakilan dusun serta para jurai tua untuk membuat keputusan yang berisi hal-hal penting. Selain kepala-kepala empat sumbai tadi beserta kepala dusun dan jurai tuanya, dalam rapat ini juga hadir kepala sumbai, para proatin kepala dusun dan jurai tua dari Sumbai Penjalang dan Sumbai Semidang.



Gambar 34. Jalan menembus dusun untuk mempercepat pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan di uluan, 1926.

Menariknya, pengertian *pasirah* di suku Pasemah ini memiliki perbedaan dengan para *pasirah* di marga-marga pada daerah uluan lainnya yang sering disebut juga dengan nama *depati*.

Pengertian *pasirah* di Pasemah lebih pada kedudukan *depati* itu sendiri, yang mengacuh pada pengertian *lampit*, tikar besar untuk duduk bersama.

Suku Pasemah dianggap sebagai masyarakat tertua yang mendiami wilayah Sumatera Selatan, menurut Heine-Geldern⁶⁹, mereka datang melalui dua gelombang yang memiliki latar belakang budaya berbeda yang menciptakan kebudayaan megalitikum. Gelombang pertama yang terdiri dari orang negro yang datang Assam, India Selatan, menciptakan kebudayaan berbentuk menhir, dolmen dan arca tambun primitif, sementara gelombang kedua yang datang dari bagian timur Asia antara tahun 200 sampai 100 sebelum masehi menciptakan bentuk batu kubur. Namun kedua, pendukung kebudayaan megalitikum Pasemah ini masih tetap mampu membaur satu sama lain dengan bukti adanya beberap peleburan gaya seperti arca Batugajah.

Asal-usul suku Pasemah memiliki dua versi, pertama berdasar cerita tutur yang menyebutkan bahwa *puyang* Pasemah berasal dari dewa yang turun dari langit. Keturunan dewa ini menempati daerah Gunung Dempo dan menyebar di berbagai penjuru Basemah. Versi kedua, menyebutkan bahwa orang Pasemah berasal dari tanah Jawa, tanah Jawi, raja Jawa bernama Puyang Ratu Senuhun yang memiliki putra bernama Atung Bungsu. Kisah puyang inilah yang dapat dihubungkan mengapa suku Pasemah bersandar pada kepemimpinan para jurai tua. Atung Bungsu diperintahkan oleh ayahnya untuk berkelana mencari Benua Keling yang subur dan kaya akan hasil alamnya.

Atung Bungsu mengembara dari Jawa melewati dan mengarungi laut, masuk ke perairan sungai Musi. Ketika sampai di sungai Musi, Atung Bungsu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang *melimbang*, mencuci dengan tampian, beras yang

⁶⁹ Heine-Geldern, Robert. "the Archeology and Art of Sumatera" dalam Edwin M. Loeb. 1972. *Sumatra: Its History and People*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Hlm. 305-331.

akan ditanak. Ternyata, perempuan yang dijumpainya ini adalah adik kandungnya sendiri yang telah diperistri oleh raja Palembang, sehingga daerah tempat ia bertemu dengan adiknya ini disebut *Pelebangan*, yang kemudian berubah menjadi Palembang.

Atung Bungsu diberi nasehat oleh adiknya agar meneruskan perjalanan ke ulu sungai Musi, masuk ke aliran sungai Batanghari Sembilan untuk menjumpai negeri Dunia Keling dengan dikasih timbangan emas oleh adiknya tersebut. Atung Bungsu diberi pesan tambahan, jika ia sudah mencapai sebuah daerah pertigaan yang merupakan pertemuan dua buah sungai, ia harus menimbang kedua air tersebut, di mana jika salah satu air memiliki timbangan yang lebih berat, maka ia harus menempuh dan melayari air sungai tersebut. Atung Bungsu meneruskan perjalanan, dan setelah dipertigaan tersebut, ia memilih dan menelusuri sungai Lematang yang airnya banyak terdapat ikan *semah*⁷⁰, sehingga daerah ditepian sungai Lematang, di mana ia kemudian memutuskan untuk tinggal dan mendirikan pemukiman ini disebut dengan nama *Besemah*, namun orang luar lebih menyebutnya dengan nama Pasemah.



Gambar 35. Gambaran "Pedagang Keliling" dengan perahu kajangnya di sebuah Dusun Teluk Bingin, Rawas

⁷⁰ Ikan *Semah* termasuk jenis *cyprimus*, famili dekat ikan "tambra" dan ikan mas. Faillie, P. de Roo de la. *Ibid.*

Suku Kikim⁷¹ mendiami daerah aliran Sungai Kikim, bahasa mirip dan masih satu rumpun dengan bahasa Melayu dan banyak kesamaan dengan bahasa Pasemah. Suku bangsa ini masih satu kelompok budaya dengan suku Pasemah, suku Serawai dan suku Gumay yang mendiami daerah bagian timur Gunung Dempo tersebut.

Suku Gumay, mendiami wilayah Pasemah bagian ilir, menganggap diri keturunan dari Puyang Ngawak Diwe Gumay yang muncul di Bukit Siguntang. Setelah beberapa masa berdiam di Bukit Siguntang dengan memunculkan sepuluh generasi, salah satu generasi pertamanya bernama Ratu Sekendar Alam, lalu pada keturunan kesebelas Puyang Suke Milung berpindah ke Rambang Niru, Muara Enim.

Setelah berada di Rambang Niru, salah satu anaknya bernama Puyang Diwe Ya' Bingkuk yang dianggap sebagai cikal bakal puyang suku Gumay, berpindah ke Lubuk Sepang dan mempunyai tiga orang anak yaitu Raja Atung Kalidiwe berkedudukan di Lubuk Sepang, Guna Raja di dusun Indikat Ilir atau Gumay Talang, kemudian Dayang Pandan di Bandar Agung.

⁷¹ Suku Kikim penduduk asli yang bermukim disekitar aliran sungai Kikim di Onderafdeeling Lematang Ilir, Kabupaten Lahat sekarang ini. Pada masa lalu mereka tersebar Marga Penjalang Suku Empayang Ilir yang berpusat di Gunung Kerto, Marga Penjalang Suku Kikim dan Saling Oeloe berpusat di Muara Cawang, Marga Penjalang Suku Lising yang berpusat di Pagarjati dan Marga Penjalang Suku Pangi yang berpusat di Nanjungan, yang setelah penghapusan sistem Marga tahun 1983 menjadi penyokong utama Kecamatan Kikim. Lihat dalam Marzuki Bedur, dkk. 2005. *Sejarah Besemah: dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdike Due, Sindang Merdike ke Kota Pagaralam*. Pagaralam: Penerbit Pemerintah Kota Pagaralam. Orang Kikim menggunakan bahasa Kikim yaitu bahasa Melayu dengan dialek tersendiri yang disebut bahasa Basemah. Secara umum mereka sering disamakan dengan orang Pasemah atau Basemah yang juga bertempat tinggal di sekitar kediaman mereka. Mata pencaharian mereka umumnya adalah petani dan berladang. Tanaman pokoknya padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sistem irigasi pertanian yang baik merupakan kebutuhan orang Kikim.

Suku Semidang menganggap diri masih satu keturunan dengan suku Pasemah dan suku Gumay. Kalau orang Pasemah dan Gumay memiliki hubungan dan berasal dari Puyang Atung Bungsu, suku Semidang merasa berasal dari Puyang Serunting Sakti atau Puyang Diwe Semidang atau Puyang Pahit Lidah yang memiliki nama asli Bardin. Bardin ini bukan anak pertama, namun dianggap sebagai anak tertua dalam istilah setempat disebut *anak tue turun kedian*, anak tua turun kemudian.

Suku Lintang⁷² umumnya tersebar mengikuti aliran Sungai Lintang yang melewati Marga Lintang Kiri Suku Sadan yang berpusat di Tanjung Raman, Marga Kedjatan Mandi Lintang berkedudukan di Gunung Meraksa, Marga Lintang Kanan Suku Muara Pinang yang berkedudukan di Muara Pinang, Marga Lintang Kanan Suku Muara Danau yang berpusat di Muara Danau, dan Lintang Kanan Suku Babatan yang berkedudukan di Batatan pada *Onderafdeeling* Tebing Tinggi. Bahasanya disebut bahasa Lintang.

Pada *Onderafdeeling* Tebing Tinggi, juga berdiam suku Saling yang berdiam di sekitar daerah aliran Sungai Saling. Daerah adat mereka yang disebut Marga Saling, berada dalam wilayah *Onderafdeeling* Tebing Tinggi disebut Suku Saling Ilir dan berada di *Onderafdeeling* Lematang Ulu disebut Suku Saling Ulu, umumnya ada di Marga Penjalang Suku Kikim dan Saling Oeloe.

Menariknya, dalam pembahasan mengenai keanekaan suku-suku di Keresidenan Palembang masa lalu ini, hal ini memperlihatkan bahwa komposisi kultural masyarakatnya memiliki keberbedaan dengan pola-pola yang ada dalam raung lingkup

⁷² Secara geografis, ada 4 “pintu masuk” ke daerah suku Lintang ini meliputi wilayah Muara Pinang, Pendopo, Tebingtinggi dan Ulu Musi. Suku Lintang hidup dari bercocok tanam yang menghasilkan: kopi, beras, kemiri, karet dan sayur-sayuran dan beternak. Pemimpin masyarakat biasanya adalah kaum pria dan orang Lintang asli. Kepemimpinan kaum pria ini sudah melekat kuat dalam masyarakat Muslim.

wilayah lain di Pulau Sumatera. Masing-masing suku kecil ini memiliki asal-usul keturunan yang berbeda-beda, sehingga tata cara, pandangan, adat dan kebiasaan memiliki keberagaman. Hubungan-hubungan kekerabatan di dalam masing-masing suku ini umumnya sangat erat, sehingga memunculkan konsep *wong lain*, orang lain yang memiliki makna pada orang di luar lingkup sukunya.



Gambar 36. Bujang, anak laki-laki *pasirah* di Lesung Batu, *Onderafdeeling* Lubuk Linggau, dengan pakaian tradisionalnya, 1877.

Selain itu, pemberlakuan terhadap konsep "orang lain", seringkali dalam batasan yang paling memungkinkan seringkali memunculkan sebetulnya polarisasi masyarakat di Uluan Palembang, bahwa dalam aneka suku ini ada sebuah konsep lain yang menyatukan antara diri suku-suku, sehingga pemberlakuan makna orang lain menjadi absurd, yakni konsepsi mengenai satu seketurunan, satu *puyang* lainnya. Jadi pada dasarnya suku-suku yang banyak ini kalau dikerucutkan akan menjadi beberapa klan suku besar saja, yang terindikasi dari istilah-istilah, *jelma daya*

atau *Jelma* Komerling pada tokoh Sekala Berak, *Jagad* Besemah pada tokoh Atung Bungsu, atau *Jagad* Belide pada wilayah *sikep*.

Sekala Berak adalah nenek moyang yang mewarisi tidak saja suku Komerling, namun juga Komerling Kayuagung serta suku Ranau, Daya dan Aji sampai ke suku Paminggir yang ada di Lampung. Kesatuan genealogi yang terpecah-pecah ini, masih dapat dikategorikan orang jelma daya, jelma Komerling, turunan Sekala Berak.

Jagad dalam peristilahan Ahmad Bastari Suan dkk⁷³, memang benar tidak mengacu pada pengertian dunia semesta, alam raya atau seluruh dunia. Namun sebenarnya, yang dimaksud dengan kata *jagad* di situ adalah konsepsi mikro kosmos pada daerah-daerah satu keturunan, dunia kecil dari kelompok satu keturunan. Oleh karena itu, sangat realitis kemudian mengartikan kata *Jagad* Basemah mikro kosmosnya orang-orang kelompok suku satu keturunan dari *Puyang* Atung Bungsu, mereka yang memiliki garis keturunan dari Atung Bungsu.

Oleh sebab itu, dalam konsep *Jagad* Basemah, ia tidak berafiliasi pada geografis administratif, namun jelas mengacuh pada wilayah genealogis, satu keturunan tadi, maka berbicara mengenai Basemah, orang Basemah, tidak saja tentang wacana tunggal, suku Basemah atau Pasemah, namun menyangkut sub-sub sukunya yang meliputi suku Lematang, suku Kikim, suku Lintang, suku Gumay, suku Lintang, suku Mekakau, suku Semendo, suku Kisam, suku Kaur, dan suku Rebang yang masuk dalam konsepsi *Basemah sekali nuduh*, Basemah sekali sebut.

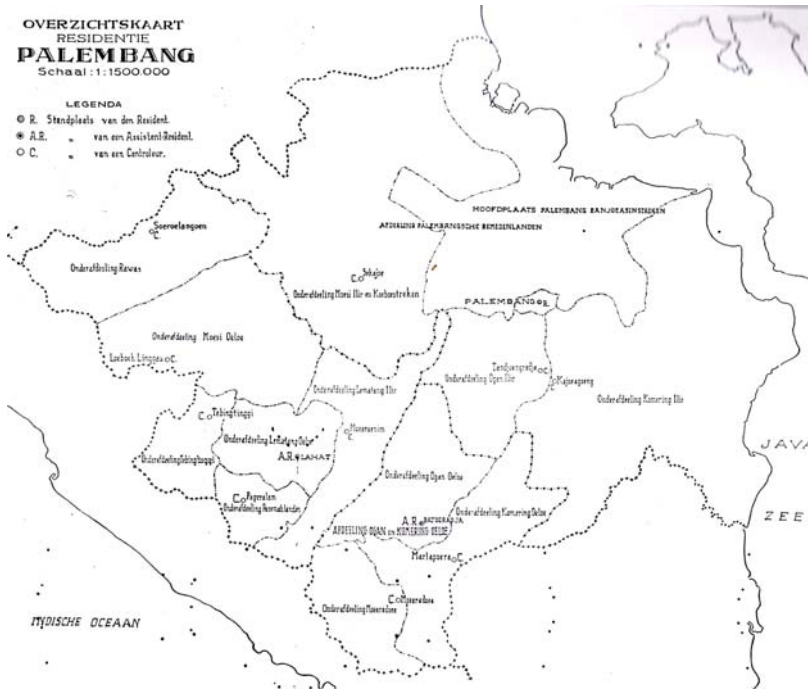
Demikian juga dengan *Jagad* Belide, maka selain orang Belida, klan suku ini menyangkut juga suku-suku lain di muara sungai atau yang masuk wilayah *sikep* dalam pengakuan politik Kesultanan Palembang. Maka *Jagad* Belide yang dimaksud di sini

⁷³ Lihat dalam Ahmad Bastari Suan, dkk. 2007. *Atung Bungsu: Sejarah Asal Usul Jagad Basemah*. Pagaralam: Pesake & Pemkot Pagaralam.

menyangkut suku Belida, Ogan, Penukul, Abab, Musi Sekayu, Musi Rawas dan Enim.

Jadi selain acuan pemberlakuan orang lain di luar suku asalnya, juga ada kesamaan diantara beberapa suku tadi dan menanggapnya sebagai sebuah entitas dari kesamaan. Misalnya, acuan orang lain dalam diri suku Pasemah terhadap suku lainnya, akan berbeda makna jika dihubungkan dengan suku-suku Lematang, Gumay, Kikim, Lintang, Mekakau, Semendo, Kisam, Kaur, dan Rebang. Pasemah akan menganggap bahwa suku-suku tersebut, masih dalam lingkup orang diri mereka sendiri. Penganggapan pada makna konsep orang lain, akan memunculkan sebuah bentuk perasaan senasib jika dihadapkan dengan suku di luar mereka, atau klan suku di luar mereka.

Polarisasi yang lebih besar lagi, akan terlihat jika sebuah bentuk dari apa yang diistilahkan oleh Jousairi Hasbullah sebagai kebudayaan *inward looking*, melihat kedalam tersebut, memiliki friksi dengan bagian yang lebih besar lagi. Maka ketika muncul konsepsi *iliran* yang dihadapkan dengan *uluhan*, dengan serta merta orang-orang *uluhan* akan merasa senasib dengan sesama orang *uluhan* ini. Identitas genealogis keberbedaan suku akibat ketidak-samaan *puyang* yang ada di kalangan suku-suku di daerah *uluhan*, akan menemukan bentuk senasib tadi dalam bentuk identitas wilayah. Jadi, ketika para masyarakat *uluhan* bermigrasi ke kota, identitas genealogis lebih banyak disimpan pada kedalaman, sementara pada permukaan yang muncul adalah identitas kewilayahan, mereka sama-sama berasal dari daerah *uluhan*.



Gambar 37. Peta pembagian *afdeeling* dan *onderafdeeling* dalam Keresidenan Palembang

BAGIAN EMPAT
KETIKA ULUAN KE ILIRAN:
KEMUNDURAN ILIRAN
DAN KEMAKMURAN ULUAN

A. Desakan Kebijakan Kolonial: Kemunduran Iliran

Dalam dasawarsa tahun 1900-1930-an, *melaise* hebat sekali “mengamuk” di Hindia Belanda, terutama di Jawa, orang sudah banyak kehilangan mata pencaharian. Namun di Sumatera, termasuk kota Palembang, belum kelihatan pengaruh desakannya.¹ Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini disebabkan oleh kemajuan dalam dua tananam pasar, karet dan kopi robusta yang mulai berkembang. Kedua produk pertanian ini menjadi penyumbang lebih dari delapan puluh persen penghasilan pertanian ekspor tersebut.² Kemajuan pesat secara ekonomis tersebut, menyebabkan Palembang dijadikan daerah baru tempat tinggal dan persinggahan para pedagang maupun perantau lain, baik pencari kerja maupun kelompok profesional lainnya. Palembang tumbuh sebagai kota berkem-

¹ Lihat dalam *Hanpo*, Palembang, Rebo, 1 Oktober 1930.

² Lihat dalam “*Een an ander over de bevolkingscultuur van robustakoffie ter Sumatra’s Weskust en ini Palembang*”. (Batavia/Weltreveden: Nijverheid en Handel van het Departement van Landbouw, 1926), hlm. 18.

bang terbesar dengan penduduk paling padat se-Sumatera, mengalirnya para pendatang baru dari luar daerah secara besar-besaran tersebut, khususnya terjadi pada tahun 1930-an.³

Yang menarik dari kemajuan ekonomi ini adalah bagaimana “warga kota” dapat memanfaatkan hal tersebut. Dalam tahun 1920-an, rumah-rumah dagang besar milik kompeni dagang orang Belanda banyak berdiri di kota Palembang⁴, seperti *Borsumij*, *Indrustreele Mij Palembang*, *Moluksche Handelsvenootschap*, *Jambi Mij.*, *Geo Wehrij* dan *Ben Meijer* sudah berdiri sebelumnya. Dan dalam hitungan satu tahun, sejak 1925 sampai 1926, agen-agen telah bertambah empat sampai lima lebih perusahaan dagang besar di Palembang, seperti *Internatio*, *Hoppenstedt*, *Schnitzler*, *Jacobson van den Berg* dan *Borneo Compagnie*.⁵ Ini baru dalam hi-

³ Sebagai perbandingan tiga penduduk kota besar di luar Pulau Jawa memperlihatkan komposisi sebagai berikut: Palembang penduduknya berjumlah 109.069 jiwa, Makassar penduduknya berjumlah 86.662 jiwa, dan Medan sebesar 74.976 jiwa. Lihat dalam J.W.J. Wellan, “de Stad Palembangsche in 1935: 275 Jaar Gelegen als een Phoenix, uit haar Asch Herrezen”, dalam *Kolonial Tijdschrift*, 1935, hlm. 232.

⁴ Keadaan meningkatnya perusahaan dagang di kota ini didukung ekspansi perusahaan swasta yang terus meningkat pada awal abad ke-20 di Palembang yang dimungkinkan oleh adanya perluasan administrasi pemerintah kolonial di daerah pedalaman Palembang. Dalam memudahkan komunikasi dengan pusat, Kota Palembang, para kontrolir berusaha melakukan perbaikan prasarana, seperti jalan dan alat transportasi. Pada tahun 1870-an, di mulai pembangunan jalan trayek Lahat dan Tebing Tinggi, dalam dasawarsa berikutnya dibangun jalan dari Muara Enim ke Baturaja dan dari sana terus ke Muara Dua. Lihat dalam Pruys van der Hoven. *Vertig Jaren Indische dienst*. (Den Haag, 1894), hlm. 226-229.; Lihat juga Ida Liana Tanjung, “Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan, Abad Ke-20”, *Tesis Pascasarjana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 59.

⁵ Lihat dalam *Kemoedi*, Palembang, Sabtoe, 3 Juli 1926. Pendirian dan perkembangan perusahaan “warga kota Barat”, Belanda dan Eropa di Palembang lebih jauh dapat dilihat dalam buku panduan *Jaarverslag Handelsvereniging Palembang 1924-1936*, (Buitenzorg: Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw 1924-1938).

tungan satu tahun. Selain itu, menyusul kemudian berbagai perusahaan besar “warga kota Barat” lainnya seperti *Escompto*, *Hagemijer*, *Posma en Co*, *N.V. Tichelwerkers Palembang*, *Nederlandsch Indisch Handelsbank*.

Keadaan ini disebabkan para “warga kota dari orang-orang asing” dengan perusahaannya tersebut, mengerti baik bagaimana strategisnya Palembang sebagai pusat perdagangan. Apalagi kota Singapura dan Jakarta, dua kota di bagian Asia Selatan yang berpengaruh besar di dalam perniagaan, terletak tidak berapa jauh dari Kota Palembang ditambah hasil bumi dari pedalaman Palembang sangat banyak jumlahnya. Hasil dan letak kota ini, merupakan dua faktor yang amat penting dalam dunia perdagangan. Dua hal inilah yang membuka mata “warga kota asing” untuk mendirikan wakil-wakil perusahaan dagangnya di sini. Kongsi kapal besar Belanda, *Koninklijk Pakketvaart Maatschappij* atau KPM, juga memiliki tingkat tinggi dalam mengartikan hal tersebut, sehingga mereka menambah dan mempermudah pelayaran di sungai Musi. Hasil-hasil yang dapat dibawa keluar dari kota ini dengan tidak memerlukan waktu yang lama dapat dikirim ke mana-mana. Demikian juga, apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh kota ini dapat dengan segera dan bertambah mudah didapat.

Keadaan seperti ini jelas merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan buat orang-orang dagang. Orang-orang Cina di Palembang, termasuk dalam kelas warga kota yang dapat melihat peluang ini. Oleh karena itu, mereka berusaha kuat untuk memelihara perdagangannya di Kota Palembang. Mereka tidak berusaha melawan perdagangan asing, tetapi dengan baik berusaha mempertahankan perdagangan sendiri. Mereka tetap menjalin dan memelihara kongsi-kongsi dagang dengan sebaik mungkin sesama mereka, seperti kongsi dagang Siang Loen Tjoen atau bernama lain *Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi* dan *Han Lie*. Mereka jarang sekali mengirim barang-barang dagangan-

nya dengan kapal KPM, paling-paling kalau terpaksa hanya untuk membawa barang-barang ke tanah Jawa.⁶

Pedagang-pedagang Cina, mampu bertindak sebagai agen yang mengandalkan pengalaman-pengalaman mereka sebagai pedagang tangguh. Warga kota ini, hampir semuanya menerjunkan diri dalam berbagai kegiatan dagang, mulai dari penunggu warung atau toko, pedagang kecil-kecilan, pengecer kebutuhan sehari-hari, sampai kepada agen penyalur komoditas kopi dan karet sekaligus eksportir dan importirnya yang memiliki jaringan usaha luas ke luar kota Palembang.



Gambar 38. Kapal penumpang "Hong Sing Bie" milik kongsi Cina Berlayar jauh ke uluan sampai di sungai Enim, Muara Enim.

Demikian juga dengan orang-orang Arab, termasuk di dalamnya sebenarnya ada orang-orang India serta Timur Asing

⁶ Lihat dalam *Kemoedi*, Palembang, Sabtoe, 3 Juli 1926. Beberapa orang-orang Cina ini juga memiliki perusahaan besar dalam sektor ekspor seperti N.V. Palembang Ruber dan N.V. Hok Tong, eksportir kopi Firma Lim Kim Hin, Firma Ong Tek Jang, N.V. Goei's Handelmaatschaappij, dan Handelmaatschaappij Kian Gwan serta perusahaan balok es N.V. Nieuwe Ijsfabriek. Lihat juga dalam Wellan, 1932. *op. cit.* hlm. 300-398. Lihat juga dalam Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, (Jakarta : INIS, 1997), hlm. 133.

lainnya, dalam pertengahan abad ke-19 juga tidak mau kalah dengan orang-orang Cina, mereka mendominasi perdagangan kain dan tekstil serta kapal dan perusahaan kayu.⁷ Salah satu perusahaan besar yang dimiliki warga kota yang berasal dari golongan ini adalah perusahaan Said Aboe Bakar bin Ahmad yang bergerak dalam usaha tanaman tebu dan industri gula dipinggiran kota. Walaupun menjelang abad ke-20, para pengusaha Arab ini mengalami kemunduran karena tekanan pemerintah kolonial dengan menjalankan kebijakan diskriminasi yang tidak memperbolehkan mereka untuk berdagang memasuki daerah pedalaman, namun ada sedikit yang dapat bertahan sampai pertengahan abad ke-20 seperti firma Assegaf dan firma Alimoenar, P.T. Ali yang bergerak pengergajian kayu.⁸



Gambar 39. Sebuah kapal pedagang Arab masuk sungai Musi dari pelayaran di pantai Sumatera, 1905.

⁷ Lihat dalam G. Fischer, *Een papierfabriek te Palembang*, (Palembang: (s.n.). 1920), hlm. 13.

⁸ *Pertja Selatan*, Palembang, 16 Januari 1932.

Kondisi, di mana warga Kota Palembang masa kolonial yang digolongkan ke dalam “warga kota asing” dan “warga kota lain” mendapat keuntungan dari Palembang sebagai simbol kota dagang tersebut, ternyata tidak banyak berimbas bagi “warga kota asli”, orang-orang Palembang sendiri. Memang ada indikasi, sebagian dari “warga kota asli” mengerti akan keuntungan letak kota ini sebagai pusat perdagangan, terutama oleh letak strategisnya tersebut. Namun karena persoalan “modal dagang”, “warga kota asli” yang bergerak dalam bidang niaga ini jauh lebih kurang dari orang kulit putih, termasuk dalam hal ini kepintaran ilmu dagang dan kapitalnya. Maka, pada zaman ini, “warga kota asli” tidak banyak yang mengetahui dengan baik bahwa mereka harus hidup dengan perdagangan dan dalam dunia perniagaan. Kalau pun ada “warga kota asli” yang berkecimpung dalam dunia perniagaan dan perdagangan, bentuk perdagangan mereka dianggap masih berkonsep tradisional. Pola tradisional dalam perdagangan ini paling tidak dapat dilihat dalam dua bentuk. Pertama, warga kota asli ini lebih banyak menjalankan perdagangannya dalam bentuk yang tidak terorganisasi. Kedua, perdagangan dan perniagaan yang dijalankan adalah bersifat “perdagangan keliling”.⁹

Pada tataran awal dari gambaran di atas, dapat kita lihat bagaimana simbol kota dagang ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh “warga kota asing”, Belanda dan Eropa lainnya dan “warga kota lain”, orang-orang Cina, Arab dan timur asing lainnya. Tetapi sebagian justru kurang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh “warga kota asli”, orang-orang pribumi. Sebenarnya, pergerakan dalam usaha perdagangan tersebut, merupakan usaha juga untuk kemajuan perbaikan nasib “orang-orang miskin”, yang banyak terjadi pada “warga kota asli”¹⁰. Namun, ka-

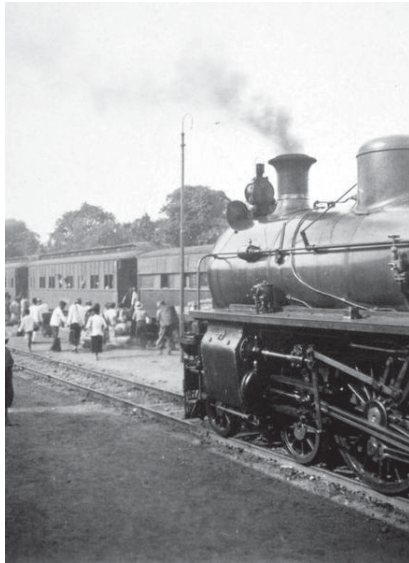
⁹ Lihat dalam *Boemi Melajoe*, Palembang, 21 Juli 1927.

¹⁰ Lihat dalam *Tjahaja Palembang*, Palembang, Kamis, 4 Nopember 1926.

dang kala pada tataran seperti ini terdapat juga saingan yang lebih besar dalam mencari jalan supaya mereka mempunyai harta benda dan dapat memiliki pencaharian hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menyangkut dunia perniagaan dan perdagangan di Palembang, karena kota ini telah tumbuh menjadi kota pusat perdagangan terbesar di Sumatera Selatan. Namun dalam perdagangan ini banyak “warga kota asli”, orang-orang pribumi tidak memiliki perserikatan dagang yang dapat membedakan mereka dari pedagang-pedagang lainnya, beberapa pemodal *maatschappij*, perusahaan yang memiliki kongsi-kongsi dagang di beberapa pabrik. Kalau kongsi-kongsi dagang ini menguasai maka beberapa perniagaan kecil-kecilan akan mengalami kemunduran.

Pada masa kolonial, friksi antara *uluhan* dan *iliran*, mendapat tempatnya, ketika muncul pola baru perubahan dalam bentuk dunia perdagangan di Keresidenan Palembang. Perubahan tersebut secara tidak langsung menyebabkan mundurnya nilai kebersamaan yang cukup hebat. Transformasi ini terutama tercipta oleh dua hal, pertama secara ekonomi Belanda mampu memutuskan hubungan-hubungan langsung perdagangan yang bernuansa *partnership* orang *iliran* dan *uluhan* dengan dunia luar. Kedua, secara politis, jatuhnya Kesultanan Palembang dalam genggaman Belanda pada dekade awal abad ke-19, membuat terpukul mundurnya para bangsawan Palembang *iliran* dalam dunia dagang, peran mereka mulai tergantikan oleh “warga kota lain”, orang Cina dan Arab, serta sedikit orang *iliran* yang mampu dengan cepat mengalihkan rasa loyalnya kepada Belanda.

Kenyataan politis ini juga berdampak pada persoalan pendidikan di Kota Palembang. Ketika Pemerintah Belanda membuka kran pendidikan, yang paling banyak dapat memanfaatkan keadaan ini, justru datang dari *si ulu*. Anak-anak bangsawan *iliran* mendapat batasan dan seleksi ketat untuk berpendidikan di sekolah Barat, karena persoalan “perasaan” ragu



Gambar 40. Lokomotif dengan latar kesibukan penumpang di Stasiun Kereta Api Prabumulih, tahun 1932. Orang Uluang, pedalaman Palembang banyak yang bermigrasi ke Iliran, Kota Palembang. Salah satunya lewat pintu masuk jaringan rel kereta api yang diperkenalkan kolonial. Orang Komerang, Pasemah dan Rawas dapat dengan mudah pergi ke kota.

Belanda terhadap kesetiaan bangsawan *iliran* yang ditakutkan masih berafiliasi terhadap kaum sisa-sisa Kesultanan Palembang.¹¹ Tetapi keadaan sebaliknya, justru dialami oleh orang-

¹¹ Mengenai perasaan “ragu” Belanda terhadap loyalitas bangsawan *iliran*, tidak lepas dari banyaknya kejadian rapat-rapat priyayi yang dicap sebagai “pemberontakan” terhadap hegemoni Belanda ditenggarai datang dari para bangsawan yang masih memendam keinginan untuk “menghidupkan” kembali kejayaan mereka pada masa Kesultanan Palembang. Deskripsi dari buku Ki Agoes Mas’Oed. *Sejarah Palembang: Moelai sedari Seri-Widjaja sampai kedatangan belatentara Dai Nippon*. Palembang: Pertjetakan Meroeyama, 1941. Hal. 78-79, dapat memperlihatkan adanya keinginan tersebut. Selain itu, untuk membatasi ruang gerak bangsawan Palembang, Pemerintah Belanda pada tahun 1874 di Kampung Kraton membuka sebuah sekolah rakyat pertama yang diperuntukkan untuk anak-anak bangsawan kesultanan. Lihat dalam F.J.B. Strom van ‘s-Gravensande, “de Stad Palembang,” dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-Land- en Volkenkunde*, Deel v, Nieuwe Serie II, 1856, hlm. 77-78.

orang *uluhan*, banyak anak-anak *pasirah*, pada marga-marga uluan, bersekolah di kota, karena sikap loyalitas tinggi mereka terhadap Belanda tidak diragukan¹².

B. Ke Ilir untuk Sekolah: Kemajuan Uluan

Sepanjang tahun 1919 sampai dengan tahun 1922, kehidupan masyarakat di Uluan Palembang merasakan kesengsaraan, karena semua hasil hutan dan kebun amat murah harganya, begitupun dengan harga getah karet. Waktu itu masyarakat *uluhan* hampir

¹² Anak-anak *uluhan* yang bersekolah Belanda, baca Budiriyanto. *Darah Pemimpin Terus Mengalir: Biografi Inspektur Jenderal Polisi Haji Achmad Bastari Gubernur/KDH Sumatera Selatan Pertama*. (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2002). Kenyataannya, birokrat Palembang, pasca kemerdekaan banyak yang datang dari *uluhan*. Selain itu, terbukanya peluang baru pada masa kolonial mendorong para *pasirah* untuk ikut terlibat sebagai pedagang yang sangat giat. Mereka mampu menumpuk kekayaan lewat usaha-usaha diberbagai lapangan ekonomi yang diperoleh secara pribadi. Di daerahnya, seorang *pasirah* dapat bertindak sebagai orang besar, baik karena pengaruh politik maupun karena kekayaan secara ekonomisnya. Kekayaan *pasirah* di uluan banyak yang melebihi kekayaan saudagar yang berada di iliran. Dengan kenyaataan ini, mereka tidak sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Belanda. Menarik, selain *pasirah* ada anak-anak orang kaya dari Uluan Palembang yang juga menyekolahkan anaknya ke kota. Selain *pasirah*, golongan orang kaya mesti juga diperhitungkan dalam elit politik dan ekonomi di dusun-dusun *uluhan*. Menurut Bambang Purwanto, “*From Dusun to the Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890-1949*”, (London: Desertasi Doktorat University of London, 1992). hlm. 56, penduduk pribumi di daerah *uluhan*, di dusun-dusunnya dapat dibedakan dalam tiga lapisan, orang kaya, orang biasa dan *budak*. Kelompok orang kaya terdiri dari elit politik, pemimpin kampung, pedagang besar dan beberapa petani kaya. Umumnya, sebagai pemeluk Islam taat, mereka dengan kekayaannya menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Haji selain merupakan ibadah dalam menjalankan rukun Islam, juga sarana dalam menaikkan status sosial mereka, dengan gelar haji, mereka dapat dipersandingkan derajatnya dengan *depati*, *pasirah* atau *pangeran*. Kadangkala sering terjadi perkawinan antara anak-anak *pasirah* dengan anak-anak seorang haji. Kelas penduduk biasa mayoritas bekerja sebagai petani. Sedangkan kelompok *budak* dapat digolongkan dua macam yaitu *budak* abdi yang biasanya diperoleh dari peperangan dan *budak mengiring* yang diperoleh karena adanya hutang-piutang, umumnya mereka dapat bebas kalau hutangnya dilunasi.

putus harapan tentang kebun-kebun karetinya, sehingga banyak karet yang dibiarkan bercampur baur dengan semak-semak belukar. Mereka ada yang menjual kebun karetinya dengan harga yang teramat murah. Beban pikiran mereka bertambah berat karena pada waktu itu harga beras juga melambung tinggi, sementara hasil ladangnya kurang baik. Namun semenjak tahun 1923, kehidupan mereka mengalami perubahan karena semua hasil kebunnya mulai memiliki harga kembali, lebih-lebih harga getah yang mengalami pelonjakan harga.¹³ Kenaikan harga karet tersebut membawa implikasi besar dengan munculnya orang kaya baru di dalam masyarakat mereka. Hampir disetiap dusun pada daerah *uluan* tersebut memiliki empat atau lima mobil, sehingga apabila di akhir pekan berpuluh-puluh mobil ilir mudik penuh orang pelesir membuang-buang uangnya. Kalau kereta angin, sepeda, hampir setiap rumah di *uluan*, terutama di daerah Musi memiliki dua atau tiga buah sepeda. Kalau ada keramaian pengantin, mobil berpuluh-puluh datang membawa orang-orang pelesir, orang-orang bersepeda berpuluh-puluh juga yang mondar-mandir melihat keramaian ini.¹⁴

¹³ Lihat *Tjahaja Palembang*, Palembang, Kemis, 14 Januari 1926.

¹⁴ Berbeda dengan di Jawa, di mana *onderneming*, perkebunan-perkebunan besar menghambat dan melindas perkembangan pertanian rakyat. Lebih jauh lihat dalam Boeke, J.H. *The Evolution of the Netherlands Indies Economy*. (Haarlem : H. D. Tjeenk Willink & Zonen, 1947). atau Clifford Geertz. *Agricultural Involvement: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Barkeley and Los Angeles: University of Chicago, 1966). Dalam kasus Palembang dan daerah pedalamannya, justru terindikasi hal sebaliknya *onderneming* hampir tidak berurusan dan mengganggu pertanian rakyat setempat, tetapi sebaliknya *onderneming-onderneming* tersebut dapat dan ikut mengangkat pertanian mereka sehingga menjadi lebih berharga dan bernilai dalam pasaran internasional. Mungkin, kenyataan ini lebih disebabkan daerah Palembang memiliki hamparan *woeste gronden*, “lahan tidur” milik tanah ulayat marga yang tidak sedikit, sehingga *onderneming-onderneming* ini membuka perkebunan pada tempat-tempat tersebut, tanpa mengganggu dan menindih kebun rakyat. Lebih jauh lihat dalam H.J. Vingershoed, “Enkele opmerkingen over in de Margaden in Palembang,” dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 17, 1928, hlm. 55-57.



Gambar 41. Suasana keramaian di pedalaman Palembang. Judi, sabung ayam, dan lelang sebagai daya tarikanya. Para pesirah dan kerio dari marga sebelah dusun banyak yang datang ke keramaian tersebut.

Arus urbanisasi dari *uluhan* ke *iliran*, dalam catatannya dari pedalaman Palembang ke kota Palembang, pada masa kolonial, terutama tahun 1930-an, lebih banyak dilakukan oleh “orang-orang terdidik”. Mereka datang ke kota pada awalnya, lebih disebabkan oleh persoalan meneruskan sekolah. Mereka adalah anak-anak “pembesar” *uluhan* paling tidak anak *pasirah* atau *depati*. Kedatangan mereka untuk sekolah dan nanti bekerja di kota Palembang, terutama untuk mengisi jabatan bawah pemerintah kota, *gemeente*¹⁵. Akibatnya, dalam kota pada “warga kota asli”,

¹⁵ Menurut catatan dalam *Volkstelling 1930: Overzicht voor Nederlandsch Indie*, pegawai negeri sipil yang menjadi petugas pada Kantor Pemerintah Belanda di Palembang berasal dari pribumi sebanyak 7.490 orang yang terdiri laki-laki 7.446 orang dan wanita sebanyak 44 orang. Golongan terbesar, pegawai yang merupakan orang-orang “terdidik” masyarakat Palembang ini, sebagian besar berasal dari kelompok orang Uluan Palembang, anak-anak para *pasirah*.

penduduk pribumi, muncul suatu dikotomi yang walaupun tidak terlalu ketat namun menarik untuk dibicarakan, tetapi pada intinya “orang-orang *uluan* terdidik”, sebagian besar jumlah siswa-siswi sekolah berasal dari anak-anak “pembesar *uluan*”, anak *pasirah* yang merupakan kepala marga. Pendidikan yang dijalankan Belanda dapat membuat penduduk di Keresidenan Palembang dalam *Volkstelling* 1930 menduduki tingkat melek huruf sebesar 12 persen. Jika dipersentase dengan jumlah penduduknya, maka tingkat melek huruf ini, untuk wilayah Pulau Sumatera, menempati posisi yang tinggi. Sebagai catatan tambahan, masyarakat Keresidenan Palembang pada abad tersebut, cukup beruntung, bahkan mereka bisa membaca dan menulis dalam Bahasa Belanda cukup tinggi jumlahnya tercatat sebanyak 2.950 orang. “Keberuntungan” orang *uluan* dalam mengakses pendidikan Barat dikarenakan adanya diskriminasi pendidikan yang dijalankan pemerintah Belanda, “hanya” anak-anak pembesar pribumi yang telah teruji loyal dapat bersekolah, akibatnya anak-anak *depati*, *pangeran* dan *pasirah* “*uluan*” yang paling banyak bersekolah di sekolah Belanda.¹⁶

Dalam konstruksi identitas warga kota, orang-orang *uluan* ini tetap menggolongkan dan tergolong “warga kota asli”. Namun sebuah catatan kultural sangat menarik untuk membicarakan adanya dikotomis terbelah dalam golongan “warga kota asli”, yang lazim dikelompokkan dengan orang ilir, *iliran* dan ulu, *uluan*. Menurut Jousairi,¹⁷ pada dasarnya tidak terdapat dikotomi yang tajam antara kebudayaan *iliran* dan *uluan*. Walaupun secara emosional, antara orang *iliran* dan *uluan* sebetulnya memiliki jarak yang renggang. Kultur tani orang *uluan* lebih rendah dari

¹⁶ Lihat dalam Jousairi Hasbullah. *Mamang dan Belanda: Goresan-goresan Wajah Sosial Ekonomi dan Kependudukan Sumatera Selatan Zaman Kolonial dan Refleksi pada Hari ini*. Palembang: Penerbitan Unsri, 1996. hlm. 63.

¹⁷ Jousairi Hasbullah, 1996. *op. cit.* hlm. 45.

kultur non-tani orang *iliran*. Tetapi, di Keresidenan Palembang relatif terintegrasi secara baik dalam kebudayaan kerja, yaitu kultur dagang orang *iliran* bersimbiosis secara harmonis dengan kultur berproduksi orang *uluhan*. Kebudayaan berproduksi orang *uluhan* diberbagai sisi tertentu, khususnya karet dan kopi, sebabnya juga kebudayaan merkantilistik, karena apa yang diproduksi, orientasi utamanya juga untuk diperdagangkan.

Kemunduran di kalangan masyarakat *iliran* seperti diuraikan di atas, menyebabkan aktivitas industri dan perdagangan orang *iliran* “perlahan” mengalami masa kemunduran, sementara *si uluan* mulai mengalami masa keemasan secara mendadak, puncaknya ketika hasil-hasil karet rakyat mengalami *booming* pada awal abad ke 20-an. Proses interaksi perdagangan, orang *uluhan*, sejak saat itu dengan penjualan hasil-hasil pertanian dan perkebunan karet, kopi, pisang kepada orang Cina, Arab dan saudagar Palembang yang kaya juga mengalami suatu konjuktur yang naik. Akibatnya, *si ulu* menerima kelimpahruahan uang dengan situasi terputusnya perdagangan dengan dunia luar. *Si ulu* yang memiliki uang banyak mampu membeli segala jenis belanja mulai dari makanan kaleng, tekstil dan kain, sampai barang-barang mewah lainnya yang dilakukan langsung pada toko-toko orang *iliran*. Orang-orang *uluhan* yang lusuh mampu menghambur-hamburkan uangnya di depan mata orang-orang *iliran* yang dipersepsikan lebih maju. Cikal bakal dari adanya friksi dalam “warga kota asli”, antara *si iliran*, yang menganggap dirinya Palembang asli dan *si uluan*, Palembang pendatang mulai meningkat dari sini.

Keadaan fisik yang memprihatinkan untuk kepentingan kota dagang modern tersebut kemudian meningkat tajam dengan mulainya geliat pembangunan transportasi kota modern dalam bentuk kereta api. Pada dasarnya, jalan kereta api untuk memudahkan mengangkut hasil-hasil perkebunan, di daerah perbatasan Palembang dan Bengkulu banyak terdapat daerah-daerah

yang merupakan kantong-kantong perkebunan karet, baik yang dikelola oleh *onderneming* maupun petani karet itu sendiri. Hasil-hasil perkebunan ini kebanyakan tidak diperdagangkan di dalam negeri, melainkan untuk pasaran luar negeri dengan pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintunya. Hasil bumi kalau mau dikeluarkan dengan cara melalui jalur barat, lewat Bengkulu tidak memiliki pelabuhan yang baik, sehingga dipilah lewat jalur kereta api dari daerah Lahat sekitarnya ke Kertapati di Palembang yang diteruskan oleh rel kereta api ke Tanjung Karang, Lampung dari sana menuju pintunya di Tanjung Priok.¹⁸

Di Keresidenan Palembang sekarang ini telah tergalang jalan kereta api yang panjangnya 323 Km yang menghubungkan Keresidenan Palembang dan Lampung.¹⁹ Pada akhir tahun 1925, galangan ini diteruskan ke Teluk Betung sepanjang 28 Km, sementara dari Keresidenan Palembang ke Bengkulu sudah terhubung jalan darat sepanjang 1194 Km. Jalan kereta api yang dibangun dari pangkal ke ujung Keresidenan Palembang, dibangun untuk memudahkan dan mempercepat perjalanan dan hubungan dari

¹⁸ Lihat dalam *Moesi*, Palembang, Minggu, 1 Juli 1928.

¹⁹ Suplai perdagangan, termasuk oleh perusahaan dagang pada awalnya masih mengandalkan angkutan tradisional lewat jalur air, diangkut dengan kapal roda lambung, namun pada tahun 1920-an, transportasi angkutan mengalami modernisasi dengan diperkenalkannya jalur kereta api. Sepanjang tahun 1909 sampai dengan 1910, diselesaikan pengukuran pertama yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunannya, sepanjang 387 km rel yang menghubungkan Palembang dan Teluk Betung, Lampung dengan cabangnya Prabumulih dan Muara Enim sepanjang 65 km selesai dibangun. Dengan demikian sumbu perekonomian yang penting dengan mengikuti arus Sungai Lematang ke pedalaman dapat dibuka. Pada tahun 1917, di daerah Palembang dimulai pembangunan jalur Kertapati, Palembang sampai ke Muara Enim. Akhirnya pada tahun 1927 telah terhubung jalur lintasan kereta api Palembang, Baturaja, Martapura sampai ke Lampung. Lihat dalam Wellan. *op. cit.* hlm. 474. lihat juga G. F. de Bruyn Kops. *Overzicht van Zuid-Sumatra*. (Amsterdam: Druk van J. H. De Bussy, 1919), hlm. 144. serta J. P. F. Richter, *Rapport nopens den aanleg van staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra*. Jilid 3. (Batavia, 1910), hlm. 22.

suatu tempat ke tempat lain. Namun jika dilihat secara keseluruhan dari hubungan antara rel-rel di pedalaman Keresidenan Palembang hal ini dapat dipertanyakan. Hubungan antara rel-rel tersebut dapat dirasakan untuk memudahkan keluarnya hasil-hasil perkebunan-perkebunan. Pada batas-batas di uluan pedalaman Keresidenan Palembang banyak terdapat perusahaan-perusahaan perkebunan yang setiap waktu perlu alat untuk mengeluarkan hasil-hasil kebunnya.

Hasil-hasil tersebut kebanyakan tidak diperniagakan di dalam negeri, melainkan untuk pasaran luar negeri dan pelabuhan Tanjung Priok di Batavia merupakan pintu utama dari perniagaan tersebut. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan misalnya kenapa rel kereta api ini tidak sampai ke sebelah barat Bengkulu. Sebab di Bengkulu tidak ada pelabuhan laut yang baik. Oleh sebab itulah, kemudian barang-barang dari pedalaman tersebut diangkut sepanjang Linggau, Lahat, Muara Enim, Prabumulih dan terus ke Kertapati, Palembang dan dari sini baru ke pintunya Tanjung Priok lewat laut²⁰.

Pengadaan angkutan untuk menarik hati peminat penanaman modal asing agar betah tinggal di Palembang, untuk meluaskan *onderneming-ondernemingnya* di daerah *uluhan* Palembang, adanya pengangkutan ini, karena di sana banyak barang-barang hasil buminya. Kalau dilihat sebelah dalam, bisa dilihat berapa banyak tambang-tambang batu bara seperti di Muara Enim dan sebagainya, masuk sedikit lagi dapat dilihat tambang minyak di Plaju dan *onderneming-onderneming* dari para kapitalis asing. Perusahaan-perusahaan minyak tersebut sudah dibuka oleh "*Royal Duitsc Compagnie for exploiting petroleum wells in the Neterlands*

²⁰ Jarak antara Palembang dengan Jakarta sepanjang 345 mil, sementara dari Palembang ke Singapura jaraknya lebih dekat lagi sepanjang 298 mil. Lihat dalam J. W. J. Wellan, "de Stad Palembangsche in 1935: 275. Jaar Gelegen als een Phoenix, uit haar Asch Herrezen", dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 1935. hlm. 11.

Indies” mulai tahun 1890.²¹ *Fabrik snijverheid*, yang ada di Plaju, Bagus Kuning, dan Sungai Gerong mampu memproduksi minyak 1.137.386 ton per-tahun dengan keuntungan sebesar 65 juta gulden. Tambang batu bara Bukit Asam, pada tahun 1930 mampu mendatangkan penghasilan sebesar 5 juta gulden dengan produksi batunya sebanyak 413.762 ton per-tahun.²²



Gambar 42. Para *pasirah* dari pedalaman Palembang. Anak, keponakan, dan orang-orang kampungnya yang mengaku masih memiliki hubungan darah dengannya banyak yang bersekolah di Palembang.

Sebuah catatan tersebut berawal dari adanya permasalahan yang menyangkut dalam diri “warga kota asli” tersebut. Catatan tersebut berawal dari munculnya “warga kota-warga kota asli” *uluan* yang menempuh kesuksesan di Kota Palembang, terutama sejak awal abad ke-20²³. Karena pendidikan mereka mampu

²¹ Lihat dalam *Pertja Selatan*, Palembang, 29 Juli 1926.

²² Lihat dalam Wellan, 1932. *loc. cit.* hlm. 392.

²³ Pada masa kesultanan, orang *uluan* dapat dikatakan terisolir dari daerah luar. Mereka dapat menghasilkan berbagai hasil hutan seperti damar, rotan, tumbuh-tumbuhan obat, gading gajah dan lain sebagainya namun diproduksi dalam jumlah terbatas. Mereka mampu berternak, berkebun dan bertani, namun masih terbatas pada pertanian subsistem. Orang-orang *uluan*, baik yang berada di bekas daerah *sindang* maupun *kepungutan*, kemudian makin lebih terbuka pada

menempatkan diri seolah-olah “kalangan” baru di atas orang-orang iliran. Adanya tuntutan baru, bahwa syarat untuk menjadi seorang *pasirah* harus mahir membaca dan menulis huruf latin pada awal abad ke-20²⁴, mendorong orang-orang uluan, terutama *pasirah* untuk menyekolahkan anaknya. Salah satu, penyebab dari munculnya ketentuan ini, disinyalir bahwa dalam *pancang*, pemilihan *pasirah* ada indikasi *money politic*, politik uang, yang nanti berujung timbulnya tindak negatif, diantara kedua pendukung tersebut.²⁵ Persiapan untuk menggantikan mereka, orang tuanya,

abad ke-19 dan 20, sejak penghapusan Kesultanan Palembang. Lebih jauh lihat dalam J.W. Van Royen, “Adatverband en Bestuurshervorming in Zuid Sumatra,” dalam *Koloniaal Tijdschrift*. 21, 1932, hlm. 321-372.

²⁴ Aturan tersebut dapat dilihat pada “Regeringsrapporten Betreffende Palembangisch 1906,” dalam *Adatrechtbundels VI*, 1913. Den Haag.

²⁵ Jabatan *pasirah* dianggap memiliki *prestise* yang sungguh besar sekali artinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau dalam hal ini pengaruh uang sangat memegang peranan penting. Di daerah uluan, bukan rahasia lagi apabila habis *pancang* terdengar “gosip-gosip miring”, si “anu” jadi *pasirah* habis sekian ribu rupiah. Selain menggunakan uangnya sendiri dalam *pancang* tersebut, seorang kandidat juga sering pinjam dari kanan kiri dahulu. Belum pernah ada yang dengar bahwa kandidat tersebut habis sekian puluh, sekian ratus, tetapi dalam jumlah ribuan. Namun, kandidat yang mengeluarkan uang lebih tersebut, kalau ia terpilih, tidak rugi, sebab kalau menjadi *pasirah* semua orang mengetahui dan dapat menghitung berapa besar ia dapat memiliki penghasilan dari kekuasaan dan pengaruh di dalam marganya. Dengan gampang, ia dapat mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya tadi. Tidak usah dikatakan lagi bahwa *pasirah* memiliki senjata yang tajam dalam bentuk kekuasaan besar dalam rapat marga. Namun untuk kandidat yang tidak terpilih, selain rugi dalam bentuk uang, ia juga harus menanggung beban “malu”, sehingga tidak jarang timbul pikiran yang kurang baik dari “si kalah” terhadap “si menang”. Pencideraan bisa sangat sengit dan jahat, sehingga tidak heran kalau hampir di setiap marga-marga di uluan Palembang, terdapat masyarakat yang terbagi sekurang-kurangnya dalam dua pihak yang saling berlawanan. Bibit-bibit seperti ini, kadangkala tidak mendatangkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran. Maka pendidikan menjadi jalan satu-satu untuk mengatasi hal ini. Untuk masalah *toeroenansijsteem*, sistem keturunan, dalam pemilihan *pasirah*, yang kadang secara tidak langsung sering “dilembagakan” sebagai adat suatu marga, dianggap tidak layak lagi, karena memiliki kejelekan.

para *pasirah*, orang-orang uluan banyak yang bersekolah lanjutan hingga di perkotaan, iliran. Pemerintah kolonial dalam menampung hal tersebut mendirikan sekitar 93 sekolah di daerah pedalaman dalam kurun waktu 1912 sampai 1913, namun anak-anak pembesar uluan tidak banyak yang mau bersekolah di daerah asalnya, mereka lebih senang dan bergengsi jika bersekolah di Kota Palembang. Pada Kota Palembang sendiri, selain terdapat delapan buah sekolah rakyat, pada tahun 1911 juga dibangun satu sekolah bergengsi yaitu *Sekolah Kelas Satu*. Sekolah ini, selain diperuntukkan untuk anak-anak bangsawan Palembang, ternyata dalam kenyataannya justru banyak anak pembesar uluan yang bersekolah di sana.²⁶ Selain memanfaatkan *Sekolah Kelas Satu*, walaupun sedikit, banyak anak *pasirah* uluan yang bersekolah di sekolah bergengsi Belanda, yaitu *Europeesche Lagere School* atau ELS.

Kesempatan besar untuk orang *uluan* menjadi warga kota, muncul ketika *gemeente* memberi kesempatan untuk orang-orang terdidik menempati lapangan pekerjaan baru, seperti untuk posisi *commis*, *klerk*, *schrijver*, *veld-politie*, *agenten*, *mantri-politie*, *opziener*, atau pekerjaan-pekerjaan rendah lain yang diperbantukan pada instansi-instansi *Gemeente* Palembang. Anak-anak keluarga

Orang uluan harus tidak lagi memikirkan hal ini, sebab mereka harus *ontwikkeling*, berkembang, dibuat pintar dengan pendidikan. Lebih jelas lihat dalam *Adatrechtbundels: Zuid-Sumatra bezorgd door de Commissie voor het Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie*. (-“S-Gravenhage: Nijhoff, 1930), hlm. 168; baca juga D.G. Stibbe dan F.J.W.H. Sandergen, “Palembang”, dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede Druk. (S-Gravenhage: Martinus Nijhoof, 1935), hlm. 331-332; Lihat dalam *Tjahaja Palembang*, Palembang, Kemis, 20 Mei 1926. Mengenai pendapatan seorang *pasirah* dapat diilustrasikan sebagai berikut bahwa seorang *pasirah* Kedaton, Marga Ngabehi IV, di Onderafdeeling Ogan Oeloe memiliki penghasilan kira-kira F. 1.200 dalam sebulan. Lihat dalam *Tjahaja Palembang*, Palembang, Kemis, 6 Mei 1928.

²⁶ Salah satu anak *pasirah uluan* yang dapat bersekolah di sana adalah Achmad Bastari, disekolahnya tersebut juga banyak anak-anak *pasirah* lainnya. Baca dalam Budiriyanto, 2002. *Ibid*.



Gambar 43. Suasana pemilihan Pesirah atau Kerio di Pedalaman Palembang. Orang yang memilihnya cukup membentuk barisan memanjang di belakang atau di depan tempat ia berdiri. Pemilihan kepala daerah paling demokratis dalam sejarah di Sumatera Selatan, namun ditenggarai masuknya unsur uang (*money politic*) dianggap sebagai salah satu kelemahannya. Selanjutnya, pada masa kolonial pengangkatan Pesirah atau Kerio di Pedalaman Palembang berdasarkan pendidikannya.

pasirah yang datang dari uluan untuk bersekolah agar dapat menggantikan posisi bapaknya kelak di daerah uluan, justru dapat memanfaatkan kesempatan ini. Mereka akhirnya, menjadi elemen “warga kota asli” meskipun bukan berasal dari *iliran*, tetapi dari *uluan*. Selain sekolah rendahan, sejak tahun 1927, untuk pertama kali di kota Palembang kemudian dibuka sekolah lanjutan MULO. Berbeda dengan sekolah rakyat lainnya, MULO hanya diperuntukkan bagi anak-anak kelompok pejabat pemerintah yang berlatar sosial bangsawan dan *pasirah* dari uluan.²⁷

²⁷ Anak-anak tersebut muncul sebagai generasi baru “elit pemerintah pribumi” yang sudah dibelandakan, karena kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan institusi plus selera dan pandangan hidup kolonial yang eksklusif. Lihat dalam Mestika Zed. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 62.

Bagi orang *iliran*, orang-orang Palembang asli dalam komposisi “warga kota asli”, memandang penduduk yang berasal dari *uluan*, orang-orang pendatang dari pedalaman Palembang, bagaimanapun pintar dan majunya orang *uluan* bagi orang *iliran*, tetap dianggap “belum memiliki apa-apa”. Orang *iliran* tetap menganggap bahwa *uluan* hanya bersifat dapat memuji dirinya sendiri dan ingin memashyurkan namanya, menjadi terkenal, namun hanya untuk kalangannya saja, orang *uluan*, bukan saja untuk orang *uluan* di Palembang, tetapi sampai ke semua *uluan* di Keresidenan Palembang. Kadang bagi orang *iliran*, orang *uluan* ingin menganggap dirinya “paling pintar sendiri” dari orang lain, sebab orang Palembang belum ada yang menjabat seperti dia.



Gambar 44. Potret salah seorang kaum terdidik *uluan* yang berasal dari Soeroelangoen Distrik Rawas.

Bagi orang *uluan*, warga kota pendatang dari pedalaman Palembang, mereka merasa berhasil dari orang Palembang asli, karena kemampuan dan keberhasilan mereka menduduki jabatan di pemerintahan, yang tidak dimiliki banyak orang *iliran*. Namun

orang *iliran*, warga kota asli Palembang, tetap menganggap, masyarakat *uluwan* di Palembang bagai air dan minyak yang tidak dapat dicampurkan menjadi satu, biar bagaimanapun sekolahnya. Orang *uluwan* mereka anggap tidak dapat menjadi orang Palembang, orang kota, sebab si *uluwan* tetaplah *si ulu*, yang bergelar dan dijuluki “*ulu kama*”. Orang *uluwan* yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Kota Palembang, malah tidak dapat diakui sebagai *iegen natji*. Sebabnya hal tersebut lebih terletak pada persoalan adat sopan santun yang berbeda dengan orang *iliran*, orang Palembang. Jauh sekali perbedaannya, baik dalam pengaturan rumah tangga, tentang hal makan dan minum dan sebagainya. Bagi orang Palembang, sebutan untuk orang *uluwan* sebagai *ulu kama*²⁸, sangat tepat.²⁹

“Warga kota asli” yang berasal dari Palembang asli, orang *iliran*, lebih menganggap diri, tidak sekolah tinggi, bahkan tidak ada yang sekolah sampai ke luar negeri, memang kehendak mereka sendiri. Bagi orang tua *iliran* lebih menganjurkan untuk menuntut ilmu akhirat, mengaji dan sembayang. Setelah itu barulah anaknya disuruh ke sekolah rendah. Setelah tamat dari sekolah rendah tersebut, mereka diajari berdagang dan diberi modal, tiada niat orang tua masyarakat *iliran* untuk menyuruh anaknya makan gaji, menjadi budak orang lain. Sehingga muncul realita, bahwa penduduk *iliran* merupakan kelompok masyarakat yang “dilahirkan dengan bakat dagang”.³⁰

²⁸ Kata “*kama*” dalam bahasa Palembang memiliki padanan arti “pengotor atau ceroboh”. Lihat dalam *Kamus Bahasa Palembang*. Selain sebagai “*ulu kama*” konotasi serupa sering pengidentifikasian orang *iliran* pada kata lainnya, seperti “*udik*” atau “terbelakang”. Lihat dalam Mestika Zed, 2006. *loc. cit.* hlm. 47.

²⁹ Lihat dalam *Terajoe*, Palembang, 13 Oktober 1919.

³⁰ F.J.B. van S-Gravensad, “de Stad Palembangsche”, dalam *Tijdschrift voor Instituut Taal- Land- en Volkenkunde*, V, 1859, hlm. 459. Lihat juga dalam J.A. van Rijn van Alkemedede, “de Hoofdplaats Palembangsche,” dalam *Tijdschrift voor Algemene Genootschap*. 7, 1883, hlm. 66.

Kalau kita selidiki lebih lanjut, bahwa realita ini, lebih disebabkan oleh dua hal. Pertama, faktor alam bahwa penduduk *iliran*, penduduk kota, tidak pernah berhasil mengembangkan sistem pertanian secara baik dan leluasa. Daerah kota yang didiami orang *iliran* ini merupakan dataran rendah yang mengandung minyak. Terbukti, ketika mereka mencoba usaha pertanian, tanah yang coba digarap, airnya tampak berwarna kemerah-merahan atau rawan banjir.

Orang *iliran* Palembang cenderung tidak menyenangi orang yang berpakaian ala Eropa atau menjadi, "*Blando Gadungan*", Belanda Gadungan. Mereka berpendapat bahwa tidak semua orang Palembang berdagang, tetapi boleh dibilang dalam sembilan puluh sembilan persen dari per seratus persennya orang Palembang ada sembilan puluh sembilan persen dari per seratus persennya yang berdagang, dan boleh dikatakan yang satu persen dari per seratus persen tersebut karena tidak memiliki modal terpaksa menjadi juru tulis dan sebagainya. Tetapi orang Palembang yang "makan" gaji, tidak bertindak seperti orang uluan, padahal mereka tersebut bergaji lebih dari 200 Gulden. Kadang orang uluan dianggap, orang *iliran* sebagai "*bungkuk baru lurus atau buta baru melek*". Orang *uluan* yang cenderung sedikit sudah berhasil, sering dipandang sinis, karena sedikit-sedikit sudah menunjukkan kepandaian berbahasa dan berbicara Belanda, yang menurut orang *iliran*, orang Belanda sendiripun susah mengartikannya, sebab kadang bahasa Belanda orang *uluan* bercampur dengan bahasa Melayu.

Menurut orang *iliran*, kalau mau berbahasa Belanda, sebaiknya seperti ucapan dan lafal serta ekspresi orang Belanda, kalau tidak jangan berbahasa Belanda. Orang *iliran* yang sekolah Belanda selama kurang lebih sembilan tahun dan telah lulus ujian pegawai rendahan Belanda baru bahasa Belandanya agak baik dengan *klemtoen* dan isyarat-isyaratnya semua betul seperti orang Belanda sendiri. Kalau belum seperti itu, sebaiknya orang *uluan*

janganlah gampang berbahasa Belanda. Menurut orang *iliran*, kalau orang *uluan* dapat seperti orang Jawa yang telah menjadi profesor, doktor dan inspektur atau *officer* serta *arohicer* dan sebagainya yaitu di Eropa dan Jawa, mereka khawatir kota Palembang dapat dibolak-balikan oleh orang-orang ini, sedangkan orang Jawa yang begitu tinggi jabatan pekerjaannya tidak ada seperti orang *uluan* tersebut. Dalam perspektif orang *iliran*, orang *uluan* mesti berlangganan majalah-majalah atau surat-surat kabar Eropa seperti *Java Bode*, *het Nieuws van de Dag*, *Locomotief*, atau *Batavia Nieuwsblad*, agar dapat mengetahui bagaimana pangkat orang-orang yang lebih tinggi dari orang-orang *uluan* tersebut.



Gambar 45. *Si Uluan* yang berhasil di perkotaan dengan menjadi pegawai rendah Belanda pulang menjenguk dusun kampung halamannya, tahun 1937. Perhatikan latar foto yang memuat mobil sebagai simbol "kekayaan" dan "kesuksesan" mereka.

Bagi orang *iliran*, menolong orang *uluan* dianggap perbuatan celaka, jangan sekali-sekali menolong "*si uluan*" sebab kebanyakan dari mereka setelah ditolong tidak tahu berterima kasih.

Sudah diberi tumpangan dan ditolong, lupalah mereka dengan orang yang menolong, “*bagai kacang lupa kulitnya*”. Malang-malang, “*si ilir*” dapat diakali oleh “*si uluan*” pula. Orang *iliran*, menganggap kalau orang *uluan* menyebut dirinya sudah kawin dengan orang Palembang, harus ditanyakan, sebab boleh jadi Palembang yang dikawininya berasal dari *uluan* juga, gadis Palembang yang sebenarnya berasal dari *uluan* juga.³¹ Kisah paling tragis dalam friksi antara *si iliran* dan *uluan* terdapat dalam roman karya Sultan Takdir Alisyahbana³², *si uluan* yang dilambangkan dalam sosok Yasin, pemuda *uluan* yang dianggap “*kama*”, tidak tahu dan tidak pandai menempatkan diri karena mencintai seorang gadis bernama Cek Molek, putri Raden Mahmud, bangsawan Palembang. Roman ini merupakan sebuah imajiner menarik tentang bagaimana posisi orang *uluan* yang dianggap tidak sejajar dengan orang *iliran* tersebut.³³

Sementara bagi elit *uluan* sebagai “pendatang” dalam “warga kota asli” yang terdiri dari “orang kaya baru” dan “orang terdidik baru” tersebut, mereka juga memiliki pandangan dan identitas tentang orang *iliran*. Orang-orang *iliran*, dimata *uluan*, tidak

³¹ Lihat dalam *Terajoe*, Palembang, 13 Oktober 1919.; Wawancara Palembang, 14 Nopember 2006; 12 Desember 2006.

³² Lebih jelas baca dalam Sutan Takdir Alisyahbana. *Dian Yang Tak Kunjung Padam*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1993). Roman ini aslinya berjudul *Dian jang ta' Koenjoeng Padam*, terbitan tahun 1932. Sebuah kisah percintaan yang berlatar belakang budaya kental antara orang *iliran*, kota, dengan orang *uluan*, pedalaman dengan *setting* masa-masa *booming* karet di Palembang. Menurut alur ceritanya, kisah ini mirip dengan roman Romeo dan Juliet. *Endingnya*, si Romeo *uluan*, dalam bentuk Yasin gagal mempersunting, si Juliet *iliran*, Cek Molek.

³³ Perasaan orang *iliran* yang menganggap diri “lebih baik” dari orang *uluan*, tidak terlepas dari identitas kultural masa lalu, zaman kesultanan. Kemajuan Palembang zaman itu, menyebabkan munculnya kebanggaan orang *iliran* akan kotanya. Akibatnya, orang *iliran* mengasosiasikan diri sebagai bagian dari pusat kekuasaan dan peradaban yang sudah maju, kota, yang dipertentangkan dengan keterbelakangan orang-orang *uluan* di pedalaman Palembang. Wawancara Palembang, 25 Juli 2010.

lebih dari sekedar “*Plembang buntung*”. Istilah “*buntung*”, adalah julukan yang diberikan untuk orang *iliran* yang dahulu memiliki kejayaan, namun pada masa kini, saat itu maksudnya, kejayaannya tinggal kenangan belaka. Kenangan akan kekayaan dan kejayaan ini, dianggap memiliki pengaruh kuat pada memori kolektif orang *iliran*. Mereka menganggap seakan masih berkuasa atas orang *uluhan*, namun kekuasaan tersebut sebenarnya hanya serpihan dari masa lalu, sebab sebaliknya justru orang *uluhan* yang sekarang lebih berjaya dari orang *iliran*, tetapi orang *iliran* tidak dapat lagi memahami perubahan ini dengan jelas. Orang *iliran* yang menganggap bisa menata rumah tangganya dengan baik, tidak dapat lagi melihat realitas atas kemunduran kekayaan dan kejayaannya.

Didepan orang lain, pragmen-pragmen skenario sandiwara dari ironi hidupnya kadang mereka perankan, kalau beli ikan kecil, memotong dan membersihkan dagingnya dilakukan di dapur secara diam-diam, namun kalau lagi masak ikan besar, maka pemotongan dan pembersihannya “harus” dilakukan di sungai agar dapat disaksikan orang lain.³⁴ Nostalgia akan kekayaan masa lalu, bagi orang *uluhan* yang dialamatkan untuk orang *iliran* sering disinonimkan pada sebutan orang *uluhan* terhadap orang *iliran* sebagai “*kayo lamo*”, orang kaya lama. Pesta perkawinan anaknya dilakukan secara besar-besaran dengan mahar dan bawahan yang luar biasa jumlahnya. Namun istilah “*cekwan-cekwih*”³⁵ selalu dialamatkan pada ironi bentuk pesta tersebut,

³⁴ Kadang dapat juga dikatakan, ketika memotong dan membersihkan ikan untuk lauk pauknya, yang kecil apalagi yang besar akan dilakukan dengan kuat dan keras-keras, sehingga didengar orang lain. Hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan bahwa mereka sedang “*makan besar*”. Wawancara Palembang, 22 Juli 2010.

³⁵ Sebuah konsep cara “*mengecek, mengejek*” dari warga kota asli pendatang, orang *uluhan* pada perkawinan anak-anak orang Iliran Palembang. “*Cekwan-Cekwih*” adalah kisah paradoks penuh ironi tentang dua orang saudara anak orang Palembang, orang *iliran*. *Cekwan* kakak laki-laki, *Cekwih* adik perempuan-

maksudnya mahar yang diberikan hanya sebatas “*pemanis*” dan “*pembagus*” dari sebuah perasaan gengsi si orang tua pengantin *iliran* tersebut. “Emas” atau *uang asap* dalam perkawinan ini, kadang hanya diberikan jumlah terkecilnya, sementara jumlah terbesar yang “wajib” disebutkan ketika akad nikah tadi ternyata, akan dikembalikan lagi karena emas dan *uang asap* tersebut pinjaman pada keluarganya yang lebih kaya. Kelihatan bagi si *kayo lamo*, di “*luannyo*”, didepannya bagus, namun di “*burinyo*”, di belakangnya jelek.



Gambar 46. Pernikahan pengantin Palembang. Si *Iliran* dengan menantu Arabnya.

Pesta perkawinan bersamaan, kakak dan adiknya, oleh orang *iliran* dilakukan supaya kelihatan “*gah*”, *gerot*, *anggon*, megah, kaya, *anggun*. Padahal, sebetulnya di mata orang uluan

nya. Melamar dan dilamar dalam waktu berbarengan. Ketika *Cekwih* dilamar, antar-antaran, barang asap dari calon suaminya, yang datang dari *luan*, pintu muka rumahnya, kemudian diterima oleh keluarga *Cekwih* namun barang asap ini diteruskan untuk dikeluarkan kembali lewat *buri*, pintu belakang dan akan menjadi barang asap sang kakaknya, *Cekwan*, ketika ia akan melamar calon istrinya. Wawancara Palembang, 4 Agustus 2010.

tidak lebih cara orang iliran dalam menghemat biaya perhelatan perkawinan anak-anaknya. Artinya, “sekali jalan, dua tiga pulau akan terlampaui”. Pada acara *nyanjo*, berkeliling keluarga, dalam prosesi pernikahan yang dilakukan dalam beberapa tahap menurut adat Palembang asli, biasanya pangantin wanitanya akan dipakaikan dan dihiasi banyak emas dan permata. Tetapi menurut perspektif orang *uluhan* mereka tidak akan ditipu oleh gaya orang *iliran* tersebut, sebab menurut mereka emas dan permata yang dipakaikan dan dihiaskan pada pengantin perempuan orang *iliran* tersebut sebenarnya didapat dengan cara meminjam dari kakak-kakak dan iparan perempuan pengantin laki-laki tersebut. Jadi, hal tersebut, tidak lebih dari cara *si iliran* untuk pamer harta, agar dapat dibicarakan memiliki banyak harta benda.

Para gadis-gadis atau perempuan *iliran*, menurut orang *uluhan*, merupakan wanita pungutan. Mereka jarang keluar rumah, *singitan*. Anak-anaknya jarang bermain di tanah lapangan terbuka, takut akan panasnya terik matahari. Namun yang mengherankan, walaupun jarang keluar rumah, tetapi hampir seluruh isi dunia diketahui dengan baik. Seolah-olah dalam rumah, tidak pernah *metu*, keluar rumah, tetapi *cerudikan*, cenderung menggosipkan segala yang ada diluar mereka. Kalau mengobrol dalam rumahnya, biasanya dilakukan dekat dan kadangkala sambil duduk di jendela rumah, mereka membicarakan semua sifat dan tingkah laku orang-orang yang berlalu lalang, siapa saja yang lewat. Kalau *si iliran* yang sedang mengobrol didepan jendela *dijingoki*, dilihat oleh orang-orang yang lewat tersebut, maka mereka akan berlaku *mincep*, memalingkan muka, bersembunyi di balik tirai, seolah-olah tidak melihat.

Bagi orang *uluhan*, *si iliran* ini sangat besar *kelakar*, *kelakar betok*, “*besak ga*”, banyak dan besar gayanya. Seolah-olah orang intelektual, pintar, dan terpelajar dengan gaya bicara, bahasanya, bahan dan materi pembicaraannya terkesan “tinggi”. Padahal, mereka

ini kadang kala pendidikannya tidak tamat sekolah rakyat. Mereka taat menjalankan agamanya, aturan Islam ditegakkan, namun umumnya mereka sangat senang dipuji, kadang kalau dipuji seolah apa yang ada diperut akan mereka keluarkan. Menariknya, jika terjadi perkawinan antara bujang *iliran* dan gadis *uluan*, maka betapapun kaya si gadis dan betapa miskinnya si bujang, ketika menjadi suami istri, maka si lelaki seakan memiliki hak untuk mengatai-ngatai si istri, seolah-olah posisi si suami *iliran* lebih tinggi dari istrinya si wantia *uluan*.³⁶

Rumah orang *iliran* bagi orang *uluan*, memang besar dan panjang, namun yang tinggal disana terdiri dari banyak kepala keluarga. Yang kaya adalah orang tuanya, giliran anaknya *si iliran* tidak kaya lagi. Sehingga ada sebutan lain untuk istilah ini, jika ada *si iliran* bergelar raden, masagus, ki agus, yang lewat di depan *si uluan* dan berlagak sok kaya, tetapi kenyataan tidak demikian, si uluan secara diam-diam menggosipkannya sebagai “keturunan ke delapan”. Kakek buyutnya memang kaya raya, sehingga kekayaannya tersebut dapat diturunkan dalam “tujuh keturunan”. Jadi ketika orang tuanya masih dapat menikmati kekayaan si buyutnya, namun giliran *si iliran* ini, dia hanya bisa gigit jari karena sudah “keturunan ke delapan”.

Friksi *iliran* dan *uluan* ditambah adanya sebuah kenyataan historis, bahwa di Keresidenan Palembang tanahnya bersuku-suku, maksudnya, komposisi masyarakat keresidenan ini sangat berbeda dengan pola-pola yang ada dalam lingkup keresidenan di Pulau Sumatera lainnya. Masyarakat Keresidenan Palembang hidup bersuku-suku. Secara administratif, Keresidenan Palembang, dibagi atas tiga *Afdeeling*³⁷. *Afdeelingen Palembangse Boven-*

³⁶ Wawancara Palembang, 2, 4, 5 dan 7 Agustus 2010.

³⁷ G. .F. de Bruyn Kops, *Overzicht van Zuid-Sumatra*, (Amsterdam: Druk van J. H. De Bussy, 1919), hlm. 33-34. Sebetulnya sistem sentralistis ini mengalami beberapa kali perubahan dengan undang-undang yang termuat dalam *Staadblad*. Ketika pertama kali penerapan sistem sentralistik, dalam *Regeerings*

landen, Palembang daerah-daerah dataran tinggi, yang beribukota di Lahat terdiri dari suku-suku Lematang, Kikim, Pasemah, Lintang, Semendo, Belido, Rawas dan Musi. *Afdeelingen Ogan en Komering Oeloe* yang beribukota di Baturaja terdapat suku-suku Ogan, Komering dan Ranau. Sementara, *Afdeelingen Palembangische Benedenlanden*, Palembang daerah-daerah dataran rendah, yang beribukota di Palembang berdiam suku-suku yang menggolongkan diri orang Melayu, kota dan orang Palembang sendiri pada mulanya dihuni oleh suku Melayu Palembang. Masing-masing suku-suku di atas memiliki asal-usul keturunan yang berbeda-beda. Sebagai akibatnya, mereka memiliki tata cara, pandangan, adat dan kebiasaan yang beragam dan berbeda pula.

Hubungan-hubungan kekerabatan di dalam masing-masing suku pada Keresidenan Palembang tersebut umumnya sangat erat, sehingga konsep "*wong lain*", orang lain, biasanya memiliki makna pada orang diluar lingkup sukunya. Umumnya, suku-suku yang ada tersebut cenderung feodal, nilai dan status seseorang banyak ditentukan oleh garis turunan kebangsawanan,

Almanak Tahun 1866 Keresidenan Palembang dibagi atas lima *Afdeeling* sejak 1852. Namun Keresidenan Palembang menurut Keputusan Pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam *Regeering Almanak* tahun 1870 terbagi lebih besar lagi atas 9 *Afdeeling*. Kemudian pada tahun 1872, *Afdeeling* ini diperkecil menjadi 7 *Afdeeling* saja. Tetapi pada tahun 1878, Keresidenan Palembang kembali mempersempitnya menjadi 6 *Afdeeling*, Palembang sebagai ibukota Keresidenan statusnya bukan lagi sebuah *Afdeeling*. Dari 6 *Afdeeling*, Keresidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi 4 *Afdeeling* lewat penetapan dalam *Staadblad* 1906 no. 466 dan *Staadblad* tahun 1907 no. 528. Penetapan Keresidenan Palembang menjadi 3 *Afdeeling* saja seperti di atas, diatur dalam tiga *Staadblad* yaitu *Staadblad* 1918 no. 612, *Staadblad* 1921 no. 465, dan *Staadblad* 1930 no. 352. Pematatan terhadap *Afdeeling* yang ada di Keresidenan Palembang ini dilaksanakan oleh keberadaan Pemerintah Kolonial yang sudah diakui di kota pusat, Palembang, namun masih belum dapat berkuasa penuh di daerah pedalaman atau uluan. Selain itu, pembagian tersebut lebih disebabkan oleh karena adanya pemisahan antara Palembang dengan Jambi, di Jambi dibentuk keresidenan tersendiri. Pembagian atas empat *Afdeeling* ini bertahan hingga akhir masa kolonial tahun 1942.

ketokohan, kesaktian dan kekayaan. Dalam konstruksi ideologis kepercayaannya, orang *uluan* selalu mengedepankan konsepsi poyang, sebagai penanda satu keberasaan, asal usul mereka. Perspektif *uluan* dalam asal usul ini hampir selalu mendekati kesamaan, terutama pada daerah dataran tinggi yang mengambil garis poyangnya dari keturunan Majapahit, Jawa atau Pagaruyung, Minangkabau. Dengan asumsi ini, orang *uluan* selalu menganggap bahwa mereka sama, bukan orang lain, satu garis keturunan, untuk menghadapkannya dengan orang Palembang, orang kota, sebagai “*orang lain*” mereka.³⁸

Istilah-istilah dalam kisah *si iliran* dan *si uluan*, yang disulam, dielaborasi dan selalu diulang, sebenarnya dapat dikatakan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari pada sekedar cerita untuk sebuah hiburan saja. Kisah ini bisa dikatakan sebuah bentuk dinamika dari mulai munculnya istilah yang lebih besar dari apa yang dinamakan “warga kota”, dalam sebuah arena yang disebut kota, Palembang. Deskripsi ini, tampaknya sebuah perang kecil dalam sebuah perang dingin simbol-simbol antara *si iliran*, yang menyebut dirinya warga kota asli yang dulu jaya namun secara perlahan mulai mengalami kemunduran, baik dari sisi ekonomi maupun politiknya, dengan *si uluan*, warga kota “pendatang”, yang diklaim dan mengklaim diri sebagai “warga kota baru” dari komunitas “warga kota asli”, mereka yang mulai menempati posisi-posisi strategis kota, yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Walaupun kedudukan mereka tersebut di mata orang *iliran* tidak lebih sebagai pegawai Belanda rendahan. Namun perlahan tetapi pasti, “warga kota pendatang” ini dapat memposisikan

³⁸ Poyang, puyang, moyang, muyang, kata yang sama untuk acuan kata nenek moyang, suatu bentuk ideologi kesadaran genealogi dari masyarakat *uluan*, pedalaman Palembang. Ideologi kesadaran genealogi lihat dalam Jeroen Peeters, 1997. *op. cit.* hlm. 87. Lebih jauh konstruksi *puyang* sebagai asal muasal keturunan dapat dilihat dalam tulisan “Aantekeningen en Schetsen over Palembang,” dalam *Tijdschrift voor Nedeerlandsch Indie*. 6, 1844, hlm. 320-324.

diri sebagai sebuah “kelas” baru perkotaan yang hidupnya walaupun masih dibawah “warga kota asing”, orang-orang Barat, Eropa dan Belanda, namun di atas rata-rata “warga kota asli”, dari komunitas Palembang asli, si orang *iliran*.



Gambar 47. Potret bujang, laki-laki yang belum menikah anak para pembesar dari pedalaman Lesoeng Batoe, Rawas dengan latar belakang sekolah desanya. Mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi ke kota, dan banyak yang menjadi *si uluan* yang berhasil hidup di kota zaman kolonial.

Kisah tentang kedua dikotomis, *si iliran* dan *si uluan*, lebih jauh tampaknya harus diakui sebagai sebuah sendi utama dari suatu bangunan ideologis yang mulai dan sedang terbangun. Sebagai ideologi, kisah ini melambangkan suatu kritik terhadap realita yang sedang ada dan sedang berjalan. Jika dibaca, kisah ini merupakan sebuah teks sosial dari suatu pandangan terbalik tentang apa yang dinamakan warga kota. Kata “*kama*”, pengotor, lusuh, sebuah ejekan yang dialamatkan untuk *si ulu* warga baru perkotaan Palembang, yang ingin tampil dengan “wajah” barunya, yang berbeda dengan kehidupannya di pedusunan *ulu*. Ketika, hidup di kota, simbol-simbol ideologis wajah baru ini mereka tampilkan dalam bentuk pekerjaan, pakaian, bahasa

atau cara berbicara. Sementara, kata “*buntung*” yang dialamatkan untuk *si iliran*, warga kota asli, yang juga tampil dengan “wajah baru”, kehidupannya yang mulai terdesak, disiasati dengan “cara”nya sendiri, berpura-pura masih kaya dan jaya.

Friksi yang terlihat di atas, sebenarnya dapat dikatakan sama sekali tidak dramatis. Pada satu sisi, situasi perang istilah ini merupakan suatu pertarungan mengenai defenisi identitas, yang bertujuan untuk mengontrol simbol-simbol berdasarkan pengalaman-pengalaman tentang konsep warga kota dari “warga asli”, pribumi. Sebuah konsep warga kota, yang tidak “*kama*”, pembersih dan tidak “*buntung*”, kaya dan berpendidikan. Namun, pada sisi lain yang lebih besar tentu saja sebaran penghistilahan tersebut sebagai sebuah pertarungan baru dari bentuk warga kota, yang harus bekerja, memiliki pendapat dan kekuasaan ditengah-tengah perubahan besar sebuah perkotaan yang disebabkan oleh adanya sebuah revolusi kota, dari kota di bawah pemerintah kesultanan ke pemerintahan Belanda, yang lebih mengutamakan sifat administratif. Friksi ini sebagai akibat dari munculnya indikasi sebuah pengaruh konstruksi ideologi perubahan wajah kota, yang sedang bertransformasi dari sebuah kota dagang tradisional, feodalistik zaman kesultanan mengarah pada perubahan ke wajah kota modern kolonial. Kota modern kolonial akan memberi kesempatan luas, bagi siapa saja yang dapat “berjuangan dan memperjuangkan” hidupnya dengan cara-cara modern.

C. Kemerosotan Ulu dan Arus Urbanisasi: *Uluan* dan *Iliran* Pasca Kolonial.

Pasca kemerdekaan, ekonomi di daerah *ulu*an mengalami kemerosotan sebagai dampak dari kemunduran perdagangan eksport dan keadaan harga karet, kopi dan lada dalam pasaran internasional. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat *ulu*an mengalami keterpukulan, terutama masyarakat di daerah

monokultur atau mata pencaharian tunggal. Masyarakat di daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berarti, dalam mengatasi “beban” kesulitannya, “pelarian” keluar dari daerah asalnya menjadi solusi bagi mereka. Kebanyakan kaum urban ini, di Kota Palembang berkerja sebagai buruh.

Menariknya, timbul “*satire*” ironis di lapangan, pasca kemerdekaan, masyarakat “Palembang asli” yang dulu berjaya di daerahnya, sejalan dengan kemajuan perdagangan, di mana Palembang mengalami perkembangan pesat di sektor ekonomi dan penambahan penduduk, ternyata umumnya masyarakat yang menggolongkan diri “Palembang asli” tersebut mengalami ketertinggalan dengan golongan masyarakat pendatang, terutama dari luar Sumatera Selatan sendiri. Kecuali, masyarakat “Palembang asli” yang dari semula, pada awal kemerdekaan telah merintis usahanya. Mereka mempunyai kesanggupan untuk menerima perkembangan dan pertumbuhan dari berbagai segi budaya dan ekonomi, tetapi jumlah mereka tersebut sangat tidak banyak dibanding golongan mereka itu sendiri.

Penduduk Palembang dalam dekade 1950-an, mengalami perkembangan pesat mencapai empat atau lima kali lipat dari masa perang kemerdekaan.³⁹ Arus urbanisasi tersebut, selain datang dari Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sumatera Tengah juga mengalir masyarakat dari daerah pedalaman Palembang. Sebagai kota dagang dan industri yang mulai menggeliat, di mana kilang-kilang minyak dan penggilingan karet di kota

³⁹ Pertambahan penduduk ini dapat dilihat dari perkembangan pesat pada tahun 1930-an Palembang memiliki penduduk 100.000 jiwa, sedangkan sepuluh tahun kemudian, tahun 1940 bertambah menjadi 150.000 jiwa. Dalam tahun 1955 pertambahan berjalan sangat pesat mencapai empat kali lipat dari tahun 1930 atau tiga kali lipat tahun 1940, yaitu 400.000 jiwa. Dari jumlah tersebut yang terdaftar berjumlah 285.348 jiwa, sedangkan selebihnya belum terdaftar. Penduduk yang belum terdaftar tersebut umumnya penduduk datangan dari pedalaman Palembang.

membutuhkan pegawai dan karyawan yang menyebabkan migrasi berjalan pesat.⁴⁰ Kota-kota di Jawa, Medan dan Padang tidak memiliki hal seperti di Palembang, sehingga penduduknya banyak yang bermigrasi ke Palembang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus urbanisasi pasca kemerdekaan di Palembang. *Pertama*, faktor kesempatan untuk bersekolah yang sangat besar di kota. Kurangnya sekolah-sekolah, terutama sekola-sekolah lanjutan di desa-desa menyebabkan banyak orang-orang tua murid menyekolahkan anaknya di kota. Hasrat yang besar dari masyarakat desa untuk menambah pengetahuan di perkotaan menyebabkan terjadinya urbanisasi pelajar dari desa ke kota. Menurut catatan, pada tahun 1956, kota memiliki lima puluh tiga Sekolah Rakyat Negeri dengan murid sekitar 18.000 orang, empat Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dengan murid sekitar 1.766 dan lima belas sekolah swastanya dengan murid lebih kurang 2.500, dua Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri, sementara partikulir ada dua yaitu misi Katolik Roma, Xaverius dan Methodist. Perguruan tinggi di Kota Palembang, mulai dibuka pada tanggal 31 Oktober 1953 dengan mendirikan sebuah yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti dengan jurusan ekonomi yang memiliki 237 mahasiswa. Pada tanggal 17 September 1955, yayasan ini juga membuka sebuah Akademi Perniagaan dengan 117 mahasiswa.

Faktor kedua yang tidak kala penting dalam persoalan urbanisasi di kota Palembang dari masyarakat pedalaman adalah adanya daya tarik keadaan penghidupan di kota. Penghidupan di kota dipandang sebagai penghidupan yang ideal, yang diliputi

⁴⁰ Pesatnya penambahan penduduk, terutama dari daerah pedalaman memiliki resiko terhadap kota Palembang. Mereka, umumnya datang ke Palembang dengan tidak memiliki skill yang memadai, sementara kota hanya untuk industri minyak dan karet, akibatnya mereka hanya bekerja pada bidang-bidang perburuhan, seperti beca dan bidang perburuhan kasar lainnya.

serba kemewahan dan keistimewaan. Kunjungan orang-orang kota berasal dari desa yang sekali-kali pulang menjenguk keluarga dan familinya di desa dengan kegagahan dan kementereangan disertai cerita-cerita yang hebat-hebat tentang keadaan kota yang tidak dapat dijumpai di desa, semua itu menimbulkan daya tarik besar bagi masyarakat desa di pedalaman Palembang untuk ikut berduyun-duyun ke kota. Faktor psikologis semacam inilah yang pada hakekatnya paling menonjol di muka.

Arus migrasi, selain daya tarik kota disebabkan juga munculnya kemunduran ekonomi masyarakat pedalaman. Pedesaan-pedesaan di Sumatera Selatan, produksi pertanian tidak mengalami pertambahan yang signifikan, harganya tertekan rendah, perhubungan sulit dan rusak, sehingga menyebabkan semakin mahalnya keperluan penduduk di pedalaman Palembang. Keadaan ini jelas menjadi faktor pemicu pengaduan keberuntungan orang-orang desa untuk mencari penghasilan lebih dengan bermigrasi ke kota. Resiko urbanisme kota seperti ini berimbas pada sektor perumahan, kota mengalami penambahan jiwa namun tidak diiringi dengan pengadaan perumahan yang baik. Hal inilah yang kemudian membawa persoalan pelik sejalan dengan persoalan perumahan penduduk ini. Palembang sebagai kota pusat bertemunya sungai-sungai batanghari sembilan, memang mendapat rahmat dalam bidang ekonomi dari keadaan ini. Namun kota makmur yang menarik orang luar tersebut, dengan kekayaan airnya menimbulkan masalah pelik bagi pemerintah kota dan warganya dalam hal kesehatan kota. Pertambahan penduduk tersebut, tanpa penyediaan perumahan yang memadai, menyebabkan terpusatnya pola penghunian warga kota pada suatu areal wilayah dipemukiman yang berawa-rawa dengan pasang surutnya air Musi yang mengengang dipemukiman rendah dan padat penduduk.

Keadaan, bertambah padatnya penduduk kota yang tidak diimbangi dengan sarana perumahan cenderung memiliki



Gambar 48. Pedagang Duren dari *uluan* menjajakan barang dagangannya berperahu di anak-anak sungai Palembang, 1947.

keadaan yang memiluhkan, akibatnya muncul pembagian ruang-ruang rumah “penduduk asli” Kota Palembang. Rumah panggung mereka dibagi dalam kamar-kamar. Ironisnya, penambahan kamar-kamar untuk tempat penyewaan tersebut dilakukan di kolong rumah mereka. Persewaan rumah kolong ini yang makin menyebabkan terciptanya kesemrawutan kota. Beberapa keluarga “*tumpakan*” berkumpul dalam satu rumah, hidup berdesak-desakan dan banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat kota. Selain itu, mengalirnya masyarakat “pendatang” dari pedalaman yang tidak diimbangi dengan tersedianya perumahan, menyebabkan terjadinya penyerobotan-penyerobotan lahan dan pendirian rumah-rumah liar. Hal semacam ini dapat menimbulkan akibat yang jalin-menjalin, dan berujung pada persoalan keamanan kota, yaitu muncul tindak kejahatan.

Bagi mereka yang sudah lama menetap, biasanya telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap⁴¹ namun bagi penduduk

⁴¹ Penduduk datangan ini bersifat menumpang, umumnya datang dari desa-desa dalam daerah Sumatera Selatan. Perincian penduduk kota Palembang yang



Gambar 49. Pedagang kaki lima salah satu pilihan pekerjaan tanpa skill yang dilakoni orang uluan di Kota Palembang, 1955.

datangan ini, sering menimbulkan persoalan-persoalan baru untuk dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup yang penuh persaingan dan liku-likunya. Pada mulanya banyak mereka yang menyangka berangkat dari desa dapat mencari pekerjaan dengan mudah di kota. Bagi yang memiliki skill seperti sopir, montir, dan tukang tidak terlalu memiliki kendala serius untuk hidup di kota, tetapi untuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan, banyak yang menemui kesulitan dalam perjuangan mencari nafkah untuk hidup di kota, apalagi bagi mereka yang belum terlatih dalam penghidupan diperkotaan. Akibatnya, banyak yang kembali ke tempat semula di desa atau mencari modal un-

terdaftar dalam tahun 1955 adalah 241.039 warganegara Indonesia, 37.737 jiwa warga Tiongkok, 3.629 jiwa Arab, 2.030 jiwa warga Belanda, 860 jiwa India, 30 Amerika, 9 Jepang, 1 Jerman, 3 Belgia, dan 10 dari negara-negara Barat lainnya.

tuk berdagang kecil-kecilan.

Di Kota Palembang pada dekade 1950-an tersebut, masyarakat datangan ini, walau menganggur jarang ada yang hidup terlantar.⁴² Mereka dapat menumpang hidup sementara pada keluarga atau famili yang sudah hidup terlebih dahulu di kota. Percampuran penduduk asli dan datangan dari desa-desa pedalaman, menimbulkan hubungan-hubungan sosial yang menarik. Masyarakat urban dari pedalaman, biasanya menjadi anggota masyarakat kota, sekaligus anggota dalam lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Akib,⁴³ masyarakat *uluan* dari desa yang memasuki kota, datang dengan keserbasahajaannya, memasuki kota yang memiliki bermacam-macam kepentingan dan keinginan. Mereka mencoba menerima paham-paham baru dan pengertian-pengertian baru. Ikatan-ikatan sosial, adat istiadat dan kekeluarga yang tadinya erat terdapat didesanya, ketika hidup di kota menjadi longgar dan menipis. Jika di desa mereka harus tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dan harus dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan pekerjaan dan tempat tinggalnya.

Namun, ikatan-ikatan kekeluargaan antara mereka yang berasal dari desa tidak lantas hilang sama sekali. Ikatan tersebut masih nampak dalam bentuk usaha dan organisasi sosial, seperti tolong-menolong dalam kematian dan perkawinan. Dengan demikian walaupun mereka sudah ada di perkotaan, tetapi tetap merasa bersatu dalam memenuhi rasa kekeluargaan. Jika diperluas lagi pengertian dari sudut paham dan cara berpikir mereka, maka dari satu sisi dapat dikatakan mereka masuk dalam ikatan masyarakat kota yang modern, tetapi pada sisi lainnya, mereka tidak dapat melepaskan ikatan kekeluargaan dan desanya yang

⁴² Lihat dalam *Batanghari Sembilan*, Palembang, 13 April 1958.

⁴³ Raden Muhammad Akib. *Kota Palembang 1272 Tahun dan 50 Tahun Kotapradja (Haminte) Palembang*. Palembang: Rhama, 1956. hlm. 168.



Gambar 50. Keadaan alun-alun Masjid Agung Palembang, 1953. Mobil di jalanan dengan latar kios dan beca, pemilik kios dan tukang beca pekerjaan yang banyak dilakukan orang-orang uluan di Kota Palembang

tradisional. Tinggal di kota, bagi penduduk pendatang dari pedalaman Palembang, merubah corak pekerjaannya, jika di desa, lapangan pekerjaan tersebut hanya beberapa macam saja, namun ketika di kota pilihan mata pencarian lebih banyak dan terbuka. Tetapi tinggal di kota harus dapat menggunakan bakat dan pengetahuan, kalau tidak akan sulit untuk memasuki dunia kerja yang lebih baik lagi.

BAGIAN LIMA
ILIRAN DAN ULUAN,
MASA LALU DAN MASA KINI:
SEBUAH REFLEKSI

*Kapal api, masuk Palembang
Banyu tenang, jadi begelumbang
Oi, mak mano hati tak bimbang
Gadis dusun, bujang Palembang
 Cop mailang, mailang cagak batu
 Di mano kucing belang di situ rumah aku
 Cop mailang, mailang cagak batu
 Di mano kucing belang di situ rumah aku*

.....
.....
*Tempayo, di palai lemak
Batang padi di belah duo
Jangan takut, di marah umak
Asak jadi kito beduo
 Cop mailang, mailang cagak batu
 Di mano kucing belang di situ rumah aku¹*

Iliran dan uluan, pada awalnya, masa kesultanan, sebelum kolonial, merupakan konsep dikotomis bermuatan politis ekonomis untuk membedakan suatu wilayah yang berada

¹ Penggalan bait lagu rakyat di Sumatera Selatan, terutama Kota Palembang, *Cop Mailang* yang dipopulerkan Karel Simon.

di ilir sungai dengan wilayah-wilayah lain yang ada di ulu sungai. Kesultanan Palembang dan Keresidenan Palembang, secara geografis kewilayahan mengacu pada pengertian daerah Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini, wilayah tersebut, secara ekonomis merupakan daerah yang bersifat masyarakat akuarian, sangat tergantung dengan air, sungai. Kosmologis air, melekat dalam peristilahan batanghari sembilan², poros utama sungai Musi yang berada di muara dan *iliran*, merupakan pintu keluar menuju laut semua aliran delapan sungai lain yang berpengaruh di daerah pedalaman, Uluan Palembang. Pada masa lalu tersebut, *uluhan*, daerah pedalaman, secara politik walaupun memiliki otonomi sendiri, namun ketergantungan ekonomis terhadap daerah *iliran* mempengaruhi semua kehidupan masyarakatnya. Semua barang yang dihasilkan *uluhan*, kalau mau menjadi barang ekonomis, maka posisinya harus ditujukan ke iliran sungai, di bawah ke ibu kota, dari ibu kota barang ini baru dapat di bawah ke luar, bisa regional untuk pasaran kawasan nusantara maupun internasional untuk dibawah ke daerah selat Malaka. Sebaliknya, persediaan barang-barang, terutama yang dapat dikategorikan luks, mewah untuk meningkatkan derajat dan martabat serta wibawa kelas atas sekaligus pembedanya dengan kelas bawah kebanyakan, di daerah *uluhan* pasokannya datang dari *iliran*, ibukota.

Ketergantungan ekonomi, memiliki konsekuensi logis pada ketergantungan secara politik, *uluhan* walaupun memiliki otonomi dalam pemerintahan, namun harus tetap tunduk dengan memberi “pengakuan” kepada *iliran*. *Iliran*, Kota Palembang, ibukota kesultanan, dianggap superior, lebih tinggi dibanding daerah-

² Batanghari penyebutan lain untuk sungai. Batanghari sembilan, tidak saja realita, yang memang sembilan sungai, namun juga simbol kosmologi sebagai bentuk implementasi dari delapan penjuru mata angin, dengan penjuru kesembilan, bagian pusat, tengah berada di Keraton Palembang. Wawancara, Yudhi Syarofie, Palembang 8 Agustus 2010.

daerah di uluannya. Pelembagaan dalam ideologi *milir sebah* seperti yang uraikan pada bagian-bagian sebelumnya, dianggap sebagai bentuk kepatuhan dari pengakuan terhadap *iliran* tersebut. Sultan memiliki kontrol dalam mengirimkan wakil dalam sosok para *jenang* atau *raban* di daerah wilayah kesultanan³, di daerah *sikap*, serta kewajiban-kewajiban terhadap tugas sultan lain di daerah *kepungutan* dan *sindang*.

Iliran yang dianggap sebagai daerah yang lebih tinggi, hebat dan kuat dibanding daerah-daerah *uluan*, membentuk citra sosial terhadap dikotomis kemasyarakatan kedua bagian ini. Orang *iliran* mempopisikan diri berada jauh di atas orang-orang *uluan*, baik secara politik dan ekonomi, serta sosial. *Iliran* adalah orang kota, warga utama ibu kota pemilik semua keunggulan politik, keamanan ekonomi, kemodernan hidup sebagai pemilik adat dan sopan santun secara sosial, sebab mereka gerbang utama dari semua itu.

Uluan yang dipandang inferior, lebih rendah, walau betapa pun tingginya seorang *uluan* di kalangan orang *uluan* itu sendiri, masih tetap dibawah dan kalah dari kalangan orang *iliran*. Entitas ini tidak terlepas asal mereka dari daerah dusun, yang udik, terbelakang, tidak mengerti dan tahu adat, kurang rasional cen-

³ *Sikap*, dianggap sebagai wilayah lapis kedua, merupakan dusun atau kumpulan dusun yang terlepas dari marga, yang letaknya strategis di muaramuara sungai yang masyarakatnya mengerjakan *gawe raja*. *Kepungutan*, dari istilah *pungut* dilindungi, sultan memberi perlindungan terhadap daerah-daerahnya yang berada langsung dalam daerah kekuasaannya. Daerah *kepungutan* dianggap wilayah lapis ketiga dalam kosmologi kekuasaan Kesultanan Palembang, lapis pertama daerah ibukota, Kota Palembang. Daerah lapis ketiga ini merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayah ibukota. Mereka dikenakan segala pajak dan ini yang membedakan dengan wilayah lapis keempatnya yang disebut *sindang*, yang dianggap daerah sekutu, sehingga tidak dibebani pajak, hanya dikenakan cukai. *Sindang* dianggap daerah “luar”, karena letaknya yang jauh, paling ujung atau pinggir dari ibukota dan disertai tugas menjaga batas-batas kesultanan.

derung konvensional dan tradisional kalau boleh dikatakan primitif, *kama*, pengotor dan lusuh dan segala cap rendahan lainnya.

Pada masa kesultanan, mereka dianggap “orang lain” oleh orang *iliran*, betapa pun mereka juga masih memiliki ketergantungan dari keuntungan yang disubsidikan oleh orang-orang *uluhan* tersebut. Ada ketidakpantasan jika mereka tinggal di ibukota, kedatangan mereka ke ibukota, kalau mau menetap dalam jangka waktu yang lama, masih dibiarkan tinggal di rumah-rumah rakit, sama dengan orang-orang Cina atau Melayu lainnya dibawah politik *settlement* sultan yang diskriminatif. Keadaan ini berubah, setelah runtuhnya kesultanan Palembang, berkuasanya pemerintah kolonial Belanda. Orang *uluhan* yang dianggap lebih rendah dimata orang *iliran*, mampu memiliki posisi dan jabatan yang strategis, karena kemampuan mereka memanfaatkan politik pendidikan kolonial. Pada masa ini kedatangan orang *uluhan* ke daerah *iliran*, membawah citra baru dalam ruang warna konsepsi *iliran* dan *uluhan*, sebagian masyarakat *uluhan* yang ada dan tinggal di kota kolonial, *Gemeente* Palembang, dianggap sebagai penyokong baru dan utama kebudayaan Palembang. Gaya sosial baru muncul dalam bentuk adopsi orang *uluhan* terhadap budaya kolonial dan *iliran*, di antara rumah-rumah limas khas *iliran* Palembang, mulai menyisip rumah kayu gudang berpanggung, gaya tutur bahasa Belanda walaupun tidak sempurna mulai mengalun dari lidah kaku pejabat rendahan kolonial orang *uluhan* ini. Tanjak dan baju kebesaran calon pangeran *uluhan* dari orang-orang *uluhan* terdidik ini, mulai bersalin bentuk ke pakaian *beskap* khas orang Eropa yang serba putih dan bersih. Keris dan pisau sebagai senjata kebesaran para *pasirah* dan *pangerannya* di *uluhan*, berubah bentuk ke senjata mata pena yang digoreskan sebagai pejabat rendah kolonial, namun memiliki posisi tinggi di kalangan para pribumi. Mereka tumbuh menjadi elit baru di kalangan pribumi Kota Palembang.

Walaupun, setelah Palembang muncul sebagai kota Indonesia, pasca kemerdekaan, menjadi puncak kedatangan para pendatang dari *uluan* ini dan kebanyakan tidak lagi semata karena proses pendidikan. Mereka sebagian besar adalah tenaga kasar, tanpa skill dan pengetahuan kerja yang terdorong karena ketergiuran hidup di kota dan terdesakan kehidupan dari *uluan* sendiri, sehingga banyak yang terserap dalam tenaga kerja serabutan. Namun, daya letup akibat friksi konsep *iliran* dan *uluan* tetap menjadi medan magnet yang kuat. Ejekan dan *-olok-olokkan*, masih kerap kali terdengar dari lidah-lidah orang asli Palembang, *wong iliran* dan *wong uluan*, walaupun mereka sebenarnya sudah dalam posisi *fifty-fifty*, orang *iliran* yang semakin terdesak dan menderita, orang *uluan* yang juga mulai datang sebagai masyarakat kelas bawah.

Namun, menariknya, dalam sejarah kebudayaan yang panjang pada masa kolonial ini, ketika Palembang tumbuh sebagai kota administrasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan kota kesultanan sebelumnya, maupun ketika Palembang muncul sebagai kota pasca kemerdekaan, konsepsi dari percikan budaya *iliran* dan *uluan* tetap berada dalam koridornya, yakni lebih banyak berupa konflik sosial, berupa perang ideologi sosial, dibanding konflik bersifat politik dan ekonomi. Konflik sosial ini pun, tidak menampakan data sejarah yang bersifat pertikaian berdarah secara etnis, antar orang *iliran*, yang menganggap diri sebagai asli Palembang dan orang *uluan* yang dianggap sebagai "orang lain". Konflik ini lebih banyak memosisikan diri dalam ranah perang ideologis, perang urat syaraf, kata-kata "menelanjangi" yang saling sudut menyudutkan.

Konsepsi *iliran* dan *uluan* pada masa sekarang, seiring dengan mulai hapusnya sistem marga di wilayah Sumatera Selatan, berubahnya transportasi dari air ke daratan, orang *uluan* kalau ke Palembang tidak perlu lagi memakai perahu tetapi bisa menggunakan mobil, dan banyaknya pendatang dari *uluan* ke Palembang

bang sehingga mendesak orang *iliran* sendiri menyebabkan pemaknaan terhadap *uluhan* semakin berkurang dan memudar di Kota Palembang. Kalaupun muncul, biasanya dalam bentuk lain, misalnya pemaknaan asal dalam dunia rantau orang Sumatera Selatan. Jika ada pendatang ke Jawa misalnya, dari daerah mana pun di Sumatera Selatan sebagai tempat asalnya, mereka mengidentikan dan mengidentifikasi diri sebagai orang Palembang. Namun, perang urat syaraf kata-kata ejekan seringkali muncul jika para perantau ini berasal dari Kota Palembang dan daerah uluannya, si Palembang masih mengeluarkan kata-kata, bahwa kawannya tersebut datang dari Palembang pedalaman.

Pada masa sekarang, secara kasat mata, konsepsi *iliran* dan *uluhan*, masih tetap terjadi, terutama dalam hubungan kekeluargaan. Umumnya, ketika terjadi perkawinan antara orang *iliran* dan orang *uluhan*, seperti yang nampak dalam bait lagu *Cop Mailang* di atas. *Oi, bak mano hati tak bimbang gadis dusun, bujang Palembang*, bagaimana hati tidak bimbang, bujang Palembang, *iliran*, yang menjalin percintaan dengan gadis yang berasal dari dusun, *uluhan*. *Jangan takut, di marah umak. Asak jadi kito beduo*, jangan takut dimarah ibu, yang penting kita jadi, artinya percintaan tersebut seringkali dan memang itulah realitanya, tidak direstui oleh orang tuanya. Kadang walaupun mereka memaksakan menjadi suami istri, seringkali muncul disharmonisasi antar keluarga.

Namun sebagai sebuah bentuk konflik, walaupun sifatnya konflik sosial, realita budaya yang bernuansa etnis, kesukuan ini, harus segera diputus mata rantainya sama sekali. Dalam sejarah kerusuhan sosial, persoalan etnisitas, kesukuan, selain agama dan ras, menjadi pengancam keberadaan dan penjagaan integrasi suatu bangsa. Oleh karena, penulisan sejarah kebudayaan seperti ini, pada masa sekarang sangatlah penting, sebab tidak saja sebagai sebuah bentuk inventarisasi kebudayaan pada masa lalu dan

sekarang, namun juga dianggap sebagai sebuah bentuk dari aset negara. Oleh karena itu, penulisan sebuah sejarah kebudayaan dianggap akan memiliki multi fungsi, antara lain untuk memperkuat jatidiri dan kepribadian, kebanggaan nasional, percaya diri, persatuan, kemajuan adab, budaya, dan lain-lain.

Jatidiri dan kepribadian yang dilandasi nilai-nilai luhur harus diteladani untuk membentuk jiwa dan pribadi anak bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah pelajaran penting dalam penggalian relevansi kita memahami konsepsi *iliran* dan *uluan*, bahwa *iliran* dan *uluan* bukanlah bahan dan alat untuk saling mengejek, meremehkan dan merendahkan. Namun yang lebih perlu diketahui dan dimengerti, konsepsi *iliran* dan *uluan* sebagai dikotomi yang dipertentangkan, mengandung makna luar biasa sebagai kebhinekaan dan kebaragaman yang berdinamika. Mestinya yang menjadi bahan pertentangan dan dilawankan secara berhadapan-hadapan ini, justru sebaliknya mengandung dinamika kekayaan kultural.

Ilmu sejarah memang mempelajari masa lalu, namun bukan berarti mesti kembali ke belakang dan menghidupkan masa lalu itu kembali di masa kini. Inilah sebuah stigma yang keliru, sebab maksud utama sejarah dengan mempelajari masa lalu justru menuntut setiap orang agar dapat belajar dari masa lalu itu, untuk sebuah refleksi bijak dalam bentuk dekonstruksi yang dapat dii pergunakan untuk tujuan di masa kini dan masa depan. Seperti, arti pentingya masa lalu dalam kehidupan berbangsa yang dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo⁴ bahwa masa kini adalah bagian dari masa lalu.

⁴ Masa sekarang ini sebenarnya tidak lain dari kelanjutan atau perpanjangan dari masa lampau, yang dalam berbagai bentuk masih tampak ditengah-tengah kita. Berbagai macam keadaan dan persoalan dewasa ini tidak mungkin di mengerti betul, kalau tidak diketahui latar belakang historisnya, ialah asal mulanya, perkembanganya pada waktu yang lalu. Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia.

Pernyataan tersebut mempunyai maksud bahwa berbagai nilai kehidupan, nilai luhur yang hidup pada masa kini, demikian juga yang akan berkembang di masa yang akan datang pada hakikatnya merupakan bentuk kesinambungan dari nilai kehidupan dan nilai luhur bangsa di masa lalu. Nilai luhur masa lalu yang bersifat adiluhung harus diteladani. Untuk mempelajari, mengetahui, mengenali dan memahami tentang nilai kehidupan masa lalu maka diperlukan peningkatan pengetahuan berbagai hal masa lalu melalui jalur pendidikan. Konsepsi *iliran* dan *uluhan* pada masa lampau bukan saja membuat kita saling mengejek dan menciptakan masyarakat terkotak-kotak, sehingga selalu memunculkan perang ideologi kata-kata yang sebenarnya menelanjangi diri sendiri. Maka, benar kata bijak bahwa tidak ada kebudayaan yang negatif, yang ada sebenarnya adalah kesalahan pemahaman terhadap budaya orang lain yang sering kali dianggap lebih rendah dan hina atau tidak patut dan sesuai dengan budaya yang disepakati dan telah tercipta sebelumnya. Maka nilai adi luhungnya, pahamiilah kebudayaan yang tampaknya berbeda tersebut, sambil renungilah memang itulah dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Arsip

Algemeene Secretarie, Batavia, 1942-1945, No. 3436.

Algemeene Memorie van Overgave tanggal 3 Desember 1918 No. 13.

Arsip Nomor 2905 Tahun 1896; No. 361 Tahun 1943

Bespreking Palembang, 6-10, April 1949.

Indische Staatblad 1903 Nomor 329 "Decentralisatiewet".

Memorie van Overgave Controlir C. Van de Velde.

Lembaran Negara No. 56 tahun 1979.

Staadblad van Nederlandsch Indie, No. 466, Tahun 1906.; No. 528, Tahun 1907.; No. 506, Tahun 1929.

II. Koran

Batanghari Sembilan

Boemi Melajoe

Hanpo

Kemoedi

Moesi

Pertja Selatan

Pewartar

Soeloeh Marga oentoek Keresidenan Palembang, No. 9 Maret 1932
Tjahaja Palembang
Terajoe

IV. Buku dan Artikel

- "Aanteekeningen en Schetsen over Palembang," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*. 6. 1844.
- Abu Zayid Hasan, "*Voyage du marchand Arabe Sulayman en Inde et en Chine, redige en 851, suivi de remarques par Abu Zayd Hasan, vers 916*", yang dialih bahasakan G. Ferrand. *T. VII des Clasique de l'Orient*. Paris, 1922.
- Ahmad Bastari Suan, dkk. *Atung Bungsu: Sejarah Asal Usul Jagat Basemah*. Pagaralam: Pemerintah Kota Pagar Alam & Pesake, 2007
- Alkemedede, J.A. van Rijn van, "de Hoofdplaats Palembangsche," dalam *Tijdschrift voor Algemeene Genootschap*. 7, 1883.
- Amrah Muslimin. *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1986.
- Arlan Ismail. *Periodisasi Sejarah Sriwijaya: Bermula di Minanga Komering Ulu Sumatera Selatan, Berjaya di Palembang, Berakhir di Jambi*. Palembang: Penerbit Unanti Press, 2002.
- _____, *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Ulu Sumatera Selatan*. Palembang: Unanti Press, 2004.
- Bambang Purwanto, "*From Dusun to the Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890-1949*", (London: Desertasi Doktoral University of London, 1992).
- Berg, L.C.W. van den. *Le Hadramut et les Colonies Arabes dans l'Archipel Indien*. Batavia, 1885. Diterjemahkan "Orang Arab di Nusantara". Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Budenani. *Undang-undang Simbur Tjahaja jang Terpakai di Pedalaman*

- Palembang. Jakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, Kementerian P.P. dan K, Tanpa Tahun (TT).
- Boeke, J.H. *The Evolution of the Netherlands Indies Economy*. Haarlem : H. D. Tjeenk Willink & Zonen, 1947.
- Budiriyanto. *Darah Pemimpin Terus Mengalir: Biografi Inspektur Jenderal Polisi Haji Achmad Bastari Gubernur/KDH Sumatera Selatan Pertama*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002.
- Collenbrader, H.T. *Koloniale Geschiedenis*, Tahun 1925.
- De la Faille, P. de Roo. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta : Bhratarata, 1971.
- Djawatan Penerangan. Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Selatan. Palembang: Djawatan Penerangan, 1956.
- Djohan Hanafiah, "Guguk, Lembaga Sosial Ekonomi di Kota Palembang Pada Abad ke-18 dan 19", dalam majalah *Jambatan: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Indonesia*. (Amsterdam: Jaargang 7, nummer 2, 1980).
- _____, *Kuto Besar: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*,. Jakarta : Penerbit Masagung, 1989.
- _____, *Kuto Gawang: Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Pariwisata Jasa Utama, 1988.
- _____, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1995.
- _____, (ed). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, 1998.
- "Een an ander over de bevolkingscultuur van robustakoffie ter Sumatra's Weskust en ini Palembang". Weltreveden: Nijverheid en Handel van het Departement van Landbouw, 1926.
- Friedrich & W.W. Rockhill (ed.) *Chau-Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the 12 & 13 Centuries, Entiled Chu-Fan-Chi*. Amsterdam: Oreintal Press, 1966.
- Geertz, Clifford. *Agricultural Involution: The Process of Ecological*

- Change in Indonesia*. Barkeley and Los Angeles: University of Chicago, 1966.
- Hambali Hasan, dkk. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Depdikbud, 1983.
- _____, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan, 1991/1992.
- _____, *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Depdikbud, 1992/1993.
- Heine-Geldern, Robert. "the Archeology and Art of Sumatera" dalam Edwin M. Loeb. *Sumatra: Its History and People*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972.
- Ida Liana Tanjung, "Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan, Abad Ke-20", *Tesis Pascasarjana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006
- Jaarverslag Handelsvereniging Palembang 1924-1936*, Buitenzorg: Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, 1924-1938.
- Joko Suryo, "Sejarah Perkotaan di Indonesia: Dari Kota Tradisional sampai Kota Kolonial", Makalah dalam *Workshop: Street Image: Decolonization and Changing Symbolism of Indonesian Urban Culture, 1930-1960s*, PPAT-UGM dan NIOD, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agustus 2004.
- Jousairi Hasbullah. *Mamang dan Belanda: Goresan-goresan Wajah Sosial Ekonomi dan Kependudukan Sumatera Selatan Zaman Kolonial dan Refleksi pada Hari ini*. Palembang: Penerbitan Unsri, 1996.
- Kemetereian Penerangan. *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Selatan*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1954.
- Ki Agoes Mas'Oed. *Sejarah Palembang: Moelai sedari Seri-Widjaja sampai kedatangan belatentara Dai Nippon*. Palembang: Per-tjetakan Meroeyama, 1941.

- Kops, G. .F. de Bruyn. *Overzicht van Zuid-Sumatra*. Amsterdam: Druk van J. H. De Bussy, 1919.
- Kuyper, H.P. 1907. "Katoencultuur in Palembang", dalam *Jaarboek departement van landbouw over 1906*. Batavia.
- "Kumpulan makalah yang membicarakan sistem "Marga", dalam Panitia Penyelenggara Diskusi Adminstrasi Pemerintahan Marga di Universitas Sriwijaya, Oktober 1979.
- Ma Huan, "The Overall Survey of the Ocean's Shores" ahli bahasa oleh Feng Ch'eng-chun. Introduksi dalam catatan J.V.G. Mills, Cambridge University Press, 1970.
- Marsden, William. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
- Marzuki Bedur, dkk. *Sejarah Besemah: dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdike Due, Sindang Merdike ke Kota Pagaram*. Pagaram: Penerbit Pemerintah Kota Pagaram, 2005.
- Mestika Zed. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mosca, Gaetano. *The Rulling Class*. New York: Mc. Grawill, 1939.
- Munoz, Paul Michel. *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malaya Peninsula*. Singapore: Paperback, 2006.
- Nanang S. Soetadji. *Sumatera Selatan Melawan Penjajah Abad 19 (Berdasar Catatan Perang Pasemah tahun 1866 oleh Belifante Bersaudara)*. Jakarta: Millenium Publisher, 2000.
- Peter, Jaroen. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS, 1997.
- Pruys, van der Hoven. *Vertig Jaren Indische dienst*. Den Haag, 1894.
- Raden Muhammad Akib. *Kota Palembang 1272 Tahun dan 50 Tahun Kotapradja (Haminte) Palembang*. Palembang: Rhama,1956.
- "Regeringsrapporten Betreffende Palembangsche 1906," dalam *Adatrechtbundels VI*, 1913. Den Haag, 1913.
- Royen, J.W. van, "Adatverband en Bestuurshervorming in Zuid

- Sumatra," dalam *Koloniaal Tijdschrift*. 21, 1932.
- Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia, 1982.
- Saudi Berlian. *Mengenal Seni Budaya OKI, Ogan Komering Ilir*. Kayuagung: Pemkab Ogan Komering Ilir, 2003.
- Scott, James C. *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2000.
- Sevenhoven, J.L. van. "Beschrijving van de hoofdplaats van Palembang", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten* 9. 1923. diterjemahkan *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Djakarta: Bhartara, 1971.
- 's-Gravensande, F.J.B. Strom van, "de Stad Palembangsche," dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-Land- en Volkenkunde*, Deel v, Nieuwe Serie II, 1856.
- Sutan Takdir Alisyahbana. *Dian Yang Tak Kunjung Padam*. Jakarta: Dian Rakyat, 1993.
- Van Royen, J.W. *De Palembangsche Marga: Haar Grond en Waterrechten, Proefschrift*. Leiden: G.L. van den Berg, 1927.
- Volkstelling 1930: Overzicht voor Nederlandsch Indie.
- Wellan, J.W.J. "de Stad Palembangsche in 1935: 275 Jaar Gelegen als een Phoenix, uit haar Asch Herrezen", dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 1935.
- _____, *Zuid Sumatra: Economisch overzicht van Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Distrikt en Benkoelen*. Weeningen : H. Veenman & Zoon, 1932.
- Westenenk, L. C. "Boekit Sigoentang en Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Melajoe", dalam *Tijdschrift en Binnenland Goevernement* tahun 1923.

V. Sumber Wawancara/Informan

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Saudi Berlian	56	Dosen
2.	Andi Syariffuddin	50	Ulama/Dosen
3.	Yudhi Syazroffie	40	Mantan Wartawan/Peneliti
4.	Hambali Hasan	65	Dosen
5	Ismail Jalili	80 Tahun	Wartawan Senior Palembang
6	Bastari Suan	75 Tahun	Guru/Pencinta Sejarah Palembang
7	Ali Mansyur	75 Tahun	Pensiunan PNS/Pencinta Sejarah
8	Drs. H. Noer Mohammad	72 Tahun	Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan
9	Drs. Hasan Ibrahim	75 Tahun	Pensiunan PNS Kakawil Depdikbud Sumsel/ Tokoh Masyarakat
10	Azhari Hayin	80 Tahun	Pedagang
11	Cik Ipah	80 Tahun	Pengrajin Songket
12	Drs. Thamrin	55 Tahun	Kabag Humas Pemkot Palembang

Nama-nama tersebut hanya sebagian kecil dari lebih 50 orang sumber wawancara.

TENTANG PENULIS



Dedi Irwanto Mohammad Santun. Dilahir di Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan pada tanggal 25 Mei 1973. Mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas semuanya di Pedamaran, OKI. Sekolah Dasar Negeri No. 8, Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 1, dan Sekolah Menengah Atas Negeri No. 1.

Melanjutkan kuliah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyelesaikan S1, Sarjana Sastra tahun 1998. Melanjutkan sekolah S2, Pascasarjana di Program Studi Sejarah Universitas Gadjah Mada, selesai tahun 2009.



Murni. Sosok yang lebih banyak menposisikan diri sebagai penengah dengan ciri khas murah senyumnya. Wanita kelahiran Jambi, 20 November 1964 namun dibesarkan dan asal Palembang ini menyelesaikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya pada tahun 1988. Tahun 1996 menyelesaikan gelar master of arts bidang *social studies* University of IOWA, Amerika Serikat. Pada tahun 2006 menyelesaikan gelar Doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Dedi Irwanto M. Santun, dkk.



Supriyanto. Pria *enjoy* dan terkesan *no problem* ini, akrab dipanggil Pak Pri oleh mahasiswanya. Kelahiran Bantul, Yogyakarta 44 tahun yang lalu, tepatnya 30 Desember 1956. Gelar sarjana diraih pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1984 dan gelar masternya diselesaikan tahun 2002 di almamater yang sama.